



# CoST Lombok Barat

Index Transparansi Infrastruktur

2023 Report

The Infrastructure Transparency Index (ITI) is an instrument developed by CoST – the Infrastructure Transparency Initiative. It provides metrics of the levels of transparency and the quality of processes related to public infrastructure at national or sub-national levels. Applied consistently, it can be used to rank performance and monitor changes over time. Collaboratively designed and based on international good practice and lessons learned, its objective is to provide stakeholders with quality information that serves to promote transparency and prompt improvements in the management of public infrastructure.

**Research team:**

Imam Arief Putrajaya  
Fera Fitri Salsabila  
Moh. Aminullah

**National coordination:**

Imam Arief Putrajaya

**International coordination:**

David Zamora. International Consultant. CoST  
Evelyn Hernandez. Head of Members and Affiliate Programmes. CoST

**Disclaimer**

This report presents the results of an evaluation to measure transparency in the infrastructure sector with the objective of generating information that can be used to help strengthen public institutions. Like other evaluation instruments, its impact will depend on the use to which it is put. It is not a methodology to evaluate corruption, not an instrument of internal control and does not assess perceptions. It does not evaluate public officials, nor does it measure the general quality of procuring entities. The evaluations and reports prepared with this methodology do not represent the opinion of CoST regarding the administrative work of governments or procuring entities.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**January 2024**

# Daftar Isi

<b>Bab 1   Indeks Transparansi Infrastruktur</b>	<b>4</b>
1.1 Tentang CoST	4
1.2 Konsep	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Prinsip	7
1.5 Isi dan Struktur	8
<b>Bab 2   Metodologi</b>	<b>12</b>
2.1 Proses evaluasi	12
2.2 Pengumpulan data	13
2.3 Sampel Entitas Pengadaan	16
2.4 Sampel Proyek Infrastruktur	17
2.5 Protokol interaksi	20
2.6 Tantangan dan Batasan	21
<b>Bab 3   Hasil</b>	<b>22</b>
3.1 Skor ITI Sub-nasional	22
3.2 Skor ITI Entitas Pengadaan	31
3.3 Skor ITI Proyek Infrastruktur	34
<b>Kesimpulan</b>	<b>37</b>
<b>Rekomendasi</b>	<b>38</b>
<b>Lampiran 1   Instrument Evaluasi</b>	<b>39</b>
<b>Lampiran 2   Survey Entitas Pengadaan</b>	<b>53</b>
<b>Lampiran 3   Skor Indikator ITI Nasional</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran 4   Rangkuman Skor Entitas Pengadaan</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 5   Terminologi</b>	<b>92</b>

# Bab 1 | Indeks Transparansi Infrastruktur

## 1.1 Tentang CoST

Inisiatif Transparansi di Bidang Konstruksi (CoST - Construction Sector Transparency Initiative) telah mengembangkan sebuah pendekatan yang fleksibel agar sesuai dengan konteks dan bertujuan untuk melengkapi dan memberi nilai tambah pada praktik baik yang telah diakui. Hal ini memberikan standar global untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas infrastruktur berdasarkan empat fitur inti CoST, yaitu pengungkapan, jaminan, kerja multi-pemangku kepentingan, dan akuntabilitas sosial.

- Keterbukaan Data merupakan publikasi data proyek infrastruktur. Empat puluh titik data diungkapkan oleh entitas pengadaan pada tahap-tahap penting di seluruh siklus proyek sesuai dengan Standar Data Infrastruktur CoST (CoST IDS) dan semakin banyak dalam format Standar Data Kontraktor Terbuka untuk Infrastruktur (OC4IDS).
- Assurance adalah tinjauan independen yang menyoroti keakuratan dan kelengkapan data yang diungkapkan dan mengubahnya menjadi informasi menarik yang membantu mengomunikasikan permasalahan yang menjadi perhatian dan bidang praktik yang baik.
- Kerja sama Multi-stakeholder menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pada akhirnya kinerja dalam persiapan dan penyediaan infrastruktur publik. Hal ini biasanya dicapai melalui kelompok multi-pemangku kepentingan di mana setiap pemangku kepentingan mempunyai suara yang setara dalam memimpin program CoST.
- Akuntabilitas sosial mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diungkapkan dan laporan jaminan diambil dan digunakan oleh para pemangku kepentingan – termasuk masyarakat sipil, sektor swasta dan badan pengawas pemerintah – untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas yang ada dan mendorong tindakan koreksi yang tepat, tidak hanya terkait dengan isu sosial. untuk proyek-proyek tertentu tetapi juga lebih luas di sektor ini.

CoST Lombok Barat mulai diimplementasikan dari akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2019. Hal ini bertepatan dengan diterimanya surat penerimaan Kabupaten Lombok barat sebagai anggota resmi dari CoST. Sebelumnya Lombok Barat telah menerapkan CoST melalui Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi atau (PRIM) bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) mulai dari tahun 2017 yang sebelumnya telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 2013. Dalam program tersebut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat telah membuka 40 mata data proyek untuk 26 Proyek Infrastruktur

Jalan yang terdiri dari 9 Paket PRIM, 5 Paket Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 6 Paket Dana Alokasi Umum (DAU).

Saat ini CoST Lombok Barat telah menerbitkan total 2067 data pekerjaan infrastruktur dalam portal yang berstandar CoST OC4IDS yaitu Infrastruktur Transparansi Portal atau INTRAS dari seluruh entitas pengadaan di Kabupaten Lombok Barat yang dapat diakses oleh publik melalui alamat [intras.lombokbaratkab.go.id](http://intras.lombokbaratkab.go.id). CoST Lombok Barat juga terus mensosialisasikan terkait implementasi CoST agar nantinya daerah lain di Indonesia dapat mengembangkan sistem keterbukaan data infrastruktur yang lebih baik.

Implementasi CoST di Lombok Barat tentunya dapat tercapai dari hasil kerja sama Multi Pemangku Kepentingan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan anggota yang terdiri dari perwakilan pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Kepolisian. Selain itu anggota MSG (Multi-Stakeholder Grup) diperkuat dengan adanya perwakilan organisasi masyarakat seperti PPDI(Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan HWDI(Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) sebagai perwakilan dari penyandang disabilitas, pemuka agama, akademisi, serta yang tidak kalah penting yaitu dari perwakilan swasta/pengusaha seperti IWAPI(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), Telkom, PLN, dan PDAM. Dengan adanya kerjasama Multi-stakeholder tersebut diharapkan implementasi CoST maupun keterbukaan data infrastruktur secara umum dapat menjadi lebih baik lagi dan berdampak terhadap kualitas infrastruktur di Lombok Barat demi kesejahteraan Masyarakat.

## 1.2 Konsep

CoST – Inisiatif Transparansi Infrastruktur – bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam investasi infrastruktur publik. Hal ini dicapai dengan mengungkapkan, memvalidasi, dan menggunakan data infrastruktur pada setiap tahap siklus proyek infrastruktur. Pengalaman CoST menunjukkan bahwa hal ini memberikan bukti dan proses untuk membantu mendorong reformasi yang mengurangi mismanagement, inefisiensi dan korupsi, sehingga meningkatkan kinerja sektor ini. Penerapan pendekatan ini akan menghasilkan penghematan biaya dan membantu menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur. Hal ini juga membantu menyediakan infrastruktur berkualitas lebih baik bagi jutaan orang.

CoST telah mengembangkan instrumen Indeks Transparansi Infrastruktur (instrumen ITI) untuk mengevaluasi, dan memantau dari waktu ke waktu, tingkat transparansi infrastruktur dan kualitas proses terkait yang meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini membantu para pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil memahami kekuatan dan kelemahan relatif dari mekanisme transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam sektor ini. Sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, instrumen ITI yang digunakan untuk memperoleh metrik telah dirancang secara kolaboratif dan didasarkan pada praktik baik internasional dan pembelajaran yang diperoleh.

Index Transparansi Infrastruktur (ITI) memberikan metodologi untuk menghitung skor untuk entitas pengadaan yang dievaluasi, baik dalam konteks nasional atau sub-nasional. Skor individual kemudian digunakan untuk menentukan peringkat entitas pengadaan yang dievaluasi. Skor ITI didasarkan pada kombinasi kondisi yang mendukung penguatan transparansi di sektor ini dan praktik terkait transparansi yang diterapkan pada proyek infrastruktur yang baru saja selesai (lihat Lampiran 1 untuk terminologi ITI). Dalam desainnya, ITI menafsirkan transparansi dalam arti luas dan praktis, tidak hanya dengan melihatnya melalui kaca mata tradisional mengenai akses terhadap informasi, namun juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan kapasitas yang terkait. Hal ini mencakup partisipasi warga negara yang mengarah pada penciptaan nilai publik melalui akses terhadap informasi.

Skor akhir ITI (baik skor ITI nasional maupun skor ITI sub-Nasional) diperoleh dari penjumlahan tertimbang empat dimensi penyusun ITI, yaitu:

1. lingkungan yang mendukung;
2. kapasitas dan proses;
3. partisipasi warga; Dan
4. keterbukaan informasi.

Meskipun ITI dirancang untuk membantu anggota CoST mengevaluasi dan memperkuat program mereka, pihak lain yang berkepentingan juga dapat menggunakannya sebagai alat untuk lebih memahami, dan karenanya memperkuat, lembaga mereka.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari instrumen ITI sebagaimana tercantum dalam laporan ini adalah untuk memungkinkan tingkat transparansi dan akuntabilitas infrastruktur publik dinilai, dan dipantau dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- untuk memberikan ukuran mengenai kondisi transparansi infrastruktur dan kapasitas untuk meningkatkan transparansi di antara lembaga-lembaga pengadaan;
- untuk melacak dan mendorong kemajuan serta memfasilitasi pembelajaran sejawat, sekaligus membantu meminta pertanggungjawaban lembaga pengadaan;
- untuk meningkatkan kesadaran akan transparansi di tingkat nasional dan internasional, berdasarkan standar data yang ada seperti CoST IDS dan OC4IDS;
- untuk memungkinkan perbandingan negara yang konsisten di tingkat internasional guna memfasilitasi pembelajaran sejawat dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internasional yang umum.

Alat ini menghitung skor ITI (baik nasional atau sub-nasional) pada skala nol hingga seratus (0-100) untuk infrastruktur publik nasional atau sub-nasional suatu negara, serta skor ITI Entitas Pengadaan (EP) individu untuk EP terkait. Skor tersebut didasarkan pada sejumlah

besar indikator unik. Hal ini dievaluasi secara independen untuk menilai praktik EP dan kondisi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor infrastruktur daerah.

Skor tersebut kemudian dipublikasikan dalam bentuk indeks ITI yang memeringkat entitas yang melakukan pengadaan. Sorotan dan identifikasi kekurangan dalam praktik yang ada kemudian dapat menjadi masukan bagi pengembangan rencana aksi yang akan membantu meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas di suatu negara atau sektor dan meningkatkan praktik pengelolaan infrastruktur yang sedang berjalan.

Hasil ITI memberikan informasi yang dapat memandu para pemimpin publik, organisasi internasional, lembaga pengadaan, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas terkait infrastruktur. Penilaian tindak lanjut ITI harus dilakukan secara berkala dan konsisten, sambil memberikan waktu untuk memperkenalkan reformasi dan menerapkan dampak di antara evaluasi.

## 1.4 Prinsip

Desain dan pengembangan ITI didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Relevansi: memberikan informasi tentang kondisi kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan potensi perbaikan dalam administrasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Komprehensif: menggunakan serangkaian indikator komprehensif yang memungkinkan dilakukannya penilaian sektor secara luas dan evaluasi EP secara mendalam.
- Kesederhanaan dan dapat dipercaya: metode pengumpulan dan pengolahan data sederhana, sehingga hasilnya mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.
- Replikabilitas dan objektivitas: siapa pun yang mereplikasi metodologi ITI harus dapat memperoleh hasil yang sama dan menyajikannya dalam laporan formal. Metodologinya mencakup proses spesifik yang dirancang untuk mengurangi subjektivitas dalam pengumpulan data.

Prinsip selanjutnya adalah penerapan ITI harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- Imparsial: koordinasi metodologi ITI dan implementasinya dilakukan melalui pihak ketiga independen dengan keahlian yang relevan.
- Berkala: evaluasi dilakukan secara berkala untuk memberikan waktu antar evaluasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan penyediaan infrastruktur.
- Akurat: hasil indikator ditentukan dengan menggunakan sumber informasi utama yang berasal dari situs web nasional dan survei terhadap pejabat publik utama.

- Spesifik: skor untuk setiap indikator ditentukan berdasarkan satu informasi. Informasi yang sama tidak digunakan kembali untuk menentukan skor indikator lainnya.
- Informatif: hasilnya memberikan gambaran mengenai badan-badan pengadaan yang dinilai, yang memberikan gambaran lebih luas mengenai situasi nasional dan sub-nasional.
- Berkembang: di negara-negara yang memiliki banyak EP, jumlah entitas yang dinilai akan bertambah seiring waktu untuk memberikan representasi yang lebih lengkap mengenai konteks nasional atau sub-nasional. Selain itu, ITI diharapkan akan ditinjau dan diperbarui setelah beberapa tahun untuk memastikan ITI terus memberikan panduan yang relevan untuk transparansi dalam infrastruktur publik.
- Konstruktif: ITI dapat membantu para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam membandingkan tingkat transparansi lembaga pengadaan dan negara, sambil memantau perubahannya seiring berjalannya waktu.

Seperti halnya alat evaluasi lainnya, dampak evaluasi ITI bergantung pada sejauh mana hasilnya digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

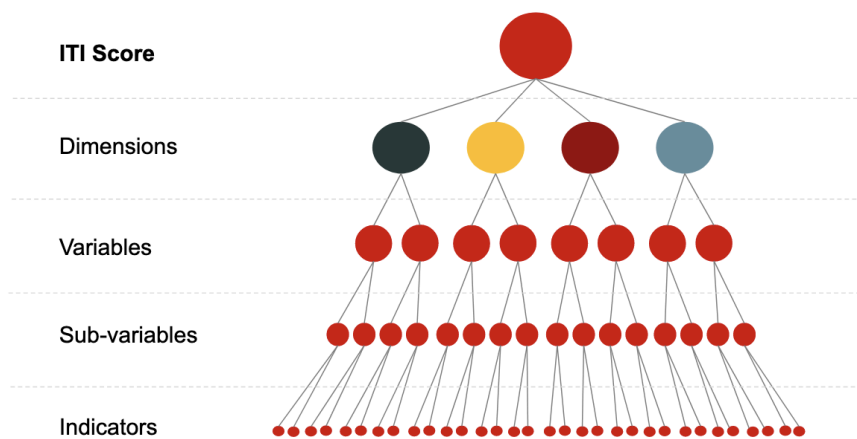
## 1.5 Isi dan Struktur

Indeks Transparansi Infrastruktur (ITI) mengacu pada empat landasan yang dikenal sebagai dimensi, yaitu:

1. lingkungan yang mendukung;
2. kapasitas dan proses;
3. partisipasi warga; Dan
4. keterbukaan informasi.

Dimensi pertama mengevaluasi konteks nasional atau subnasional beserta kerangka hukumnya. Tiga lainnya mengevaluasi kapasitas dan hasil transparansi di tingkat EP. Keempat dimensi tersebut selaras dengan studi empiris yang menggambarkan bagaimana kualitas hasil pengadaan bergantung pada kombinasi kerangka peraturan dan kapasitas kelembagaan.

Masing-masing dari empat dimensi tersebut dibagi menjadi serangkaian komponen untuk memungkinkan evaluasi komprehensif. Hasilnya adalah hierarki empat tingkat: dimensi ditentukan oleh variabel, yang pada gilirannya dibentuk oleh sub-variabel, yang berasal dari indikator (lihat Gambar 1).



Gambar. 1. Contoh hirarki ITI

Semua indikator dievaluasi dan dinilai secara individual. Seperangkat skor indikator tertimbang kemudian memberikan skor sub-variabel; sekumpulan skor sub-variabel tertimbang memberikan skor variabel; dan sekumpulan skor variabel tertimbang memberikan skor dimensi. Skor ITI nasional atau sub-nasional akhirnya diperoleh dari penjumlahan tertimbang skor empat dimensi.

## Dimensi

### Dimensi 1: Lingkungan yang mendukung

Dimensi 1 menilai kondisi nasional atau sub-nasional yang memungkinkan transparansi pada sektor infrastruktur dengan mempertimbangkan kerangka peraturan dan alat digital terpusat. Ini memiliki satu variabel, tiga sub-variabel dan 12 indikator. Daftar lengkap indikator disajikan pada Lampiran 1. Variabel dan subvariabel dimensinya adalah:

- Kerangka hukum dan alat digital
  - Kerangka peraturan untuk akses masyarakat terhadap informasi
  - Standar transparansi di sektor infrastruktur publik
  - Portal - portal informasi digital nasional atau subnasional.

Semua indikator pada dimensi ini berlaku di tingkat nasional atau sub-nasional dan diukur satu kali di tingkat negara atau lokal, terlepas dari jumlah lembaga pengadaan yang dipilih untuk dievaluasi. Hasil-hasilnya memberikan umpan balik untuk memperkuat lingkungan nasional atau sub-nasional, bukan proses di dalam institusi. Skor untuk dimensi tersebut diperoleh melalui penjumlahan tertimbang dari indikator-indikator yang mendasarinya.

Indikator-indikator dalam dimensi ini dievaluasi dengan menggunakan informasi yang biasanya tersedia dari sumber online seperti situs web yang memuat kerangka peraturan nasional dan informasi yang terkait dengan sektor ini, khususnya yang berfokus pada transparansi, pengadaan publik, infrastruktur publik, dan keuangan publik.

## **Dimensi 2: Kapasitas dan proses**

Dimensi 2 menilai kesehatan prosedur dan kapasitas entitas pengadaan untuk mengungkapkan data dan informasi. Ini memiliki dua variabel, lima sub-variabel dan 25 indikator. Daftar lengkap indikator disajikan pada Lampiran 1. Variabel dan subvariabel dimensi tersebut adalah:

- Kapasitas kelembagaan
  - Pengetahuan dasar
  - Kapasitas digital
- Proses kelembagaan
  - Prosedur untuk mengungkapkan informasi
  - Faktor pendukung dan hambatan terhadap keterbukaan informasi
  - Kontrol atas keterbukaan proyek infrastruktur.

Semua indikator pada dimensi ini menyediakan lembaga pengadaan, bukan kondisi nasional atau sub-nasional. Indikator-indikator tersebut dievaluasi satu kali di setiap entitas pengadaan yang dipilih. Hasil dimensi ini memberikan masukan untuk memperkuat kapasitas dan proses di tingkat EP. Skor dimensi diperoleh melalui penjumlahan tertimbang dari indikator-indikator yang mendasari setiap EP.

Data yang diperlukan untuk mengevaluasi indikator-indikator dari dimensi ini diperoleh melalui survei yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah terpilih di setiap lembaga pengadaan melalui penilaian mandiri atau wawancara.

## **Dimensi 3: Partisipasi warga**

Dimensi 3 mengevaluasi peluang yang diberikan oleh EP untuk partisipasi masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan informasi publik yang diungkapkan. Ini memiliki satu variabel, dua sub-variabel dan 12 indikator. Daftar lengkap indikator disajikan pada Lampiran 1. Variabel dan subvariabel dimensinya yaitu:

- Praktik partisipasi
  - Peluang partisipasi
  - Penggunaan informasi oleh warga negara.

Semua indikator dimensi ini mengevaluasi EP. Indikator-indikator tersebut dievaluasi satu kali untuk setiap EP yang dipilih. Hasil dari dimensi ini memberikan masukan untuk memperkuat praktik partisipasi masyarakat EP. Skor untuk dimensi ini diperoleh melalui penjumlahan tertimbang dari indikator-indikator yang mendasari setiap EP.

Data yang diperlukan untuk mengevaluasi indikator-indikator dari dimensi ini diperoleh melalui survei (sama seperti dimensi 2) yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah terpilih di setiap EP melalui penilaian mandiri atau wawancara.

## **Dimensi 4: Keterbukaan informasi**

Dimensi 4 menilai jumlah data dan informasi proyek yang diungkapkan oleh EP berdasarkan Standar Data Infrastruktur CoST atau Standar Kontrak Terbuka untuk Data Infrastruktur. Ini memiliki satu variabel, enam sub-variabel dan 44 indikator. Daftar lengkap indikator disajikan pada Lampiran 1. Variabel dan subvariabel dimensinya yaitu:

- Praktik keterbukaan
  - Identifikasi proyek
  - Persiapan proyek
  - Pengadaan kontrak konstruksi
  - Pengadaan kontrak pengawasan
  - Implementasi kontrak konstruksi
  - Implementasi kontrak pengawasan

Seluruh indikator pada dimensi ini mengevaluasi proyek infrastruktur yang dikembangkan oleh masing-masing EP. Hasil dimensi ini memberikan umpan balik kepada EP terpilih untuk memperkuat keterbukaan informasi mereka. Skor keseluruhan dimensi diperoleh melalui rata-rata jumlah tertimbang dari indikator-indikator dasar untuk setiap proyek.

Indeks dalam dimensi ini dievaluasi menggunakan informasi yang biasanya tersedia dari sumber online seperti situs web yang berisi data proyek infrastruktur publik dan pengadaan publik serta situs web lain yang menunjukkan informasi terkait dengan objek evaluasi.

Tabel 1 di bawah ini menyajikan ringkasan mengenai apa yang dievaluasi dan metode pengumpulan data yang diterapkan untuk masing-masing empat dimensi.

	Dimensi 1 Lingkungan yang Mendukung	Dimensi 2 Kapasitas dan Proses	Dimensi 3 Partisipasi Masyarakat	Dimensi 4 Keterbukaan Informasi
Subjek Evaluasi	Kondisi nasional/subnasional	Entitas Pengadaan	Entitas Pengadaan	Proyek-proyek dari entitas pengadaan
Metode Pengumpulan Data	Pencarian Komputer	Penilaian Sendiri/interview	Penilaian Sendiri/interview	Pencarian Komputer

Tabel 1. Ringkasan mengenai apa yang dievaluasi dan metode pengumpulan data yang diterapkan untuk setiap dimensi ITI

# Bab 2 | Metodologi

## 2.1 Proses evaluasi

Keempat dimensi ITI masing-masing mempunyai proses evaluasinya masing-masing, sebagai berikut.

### **Dimensi 1: Lingkungan yang mendukung**

Dimensi 1 menilai kondisi nasional yang memungkinkan adanya transparansi pada sektor infrastruktur. Indikatornya ditentukan melalui penelitian desktop. Setiap indikator memerlukan masukan dari setidaknya dua evaluator, yang melakukan evaluasi awal secara independen untuk menghindari bias.

Apabila hasil dari kedua evaluator untuk masing-masing indikator sama, maka hasil tersebut dianggap final. Jika terdapat perbedaan di antara keduanya, maka evaluator ketiga akan menyelesaikan perbedaan tersebut. Evaluasi ketiga ini bertepatan dengan salah satu dari dua evaluasi pertama dan menganggap skor sebagai final.

Kualitas data yang dikumpulkan dalam dimensi 1 dicapai melalui pendekatan ini, yang memastikan bahwa observasi yang sama selalu diperoleh secara independen oleh dua evaluator yang berbeda.

### **Dimensi 2: Kapasitas dan proses**

Dimensi 2 menilai kelayakan prosedur dan kapasitas EP dalam mengungkapkan data dan informasi. Indikator-indikatornya dievaluasi melalui survei yang dilakukan satu kali oleh petugas di EP. ITI mencari seseorang yang memahami prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, data terbuka, partisipasi warga, kolaborasi dan inovasi.

Kualitas data yang dikumpulkan melalui survei diverifikasi dengan melakukan triangulasi hasil dengan sumber informasi lain yaitu:

- Pengesahan: Setiap petugas yang menyelesaikan survei telah menyetujui tanggapan yang diberikannya. Melalui pertukaran komunikasi formal, petugas ini juga secara resmi ditunjuk oleh EP untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh ITI.
- Bukti yang memvalidasi skor yang diberikan: Bersamaan dengan tanggapan survei, petugas juga memberikan bukti (seperti penjelasan, dokumen, situs web, papan pengumuman, dan surat kabar) untuk memvalidasi tanggapannya terhadap setiap pertanyaan survei. Informasi ini ditinjau oleh tim evaluasi. Jika informasi tidak sesuai dengan skor yang diberikan oleh petugas, tim penilai akan kembali menemui petugas untuk meminta informasi lebih lanjut dan/atau menyesuaikan skor berdasarkan bukti yang diberikan.

### **Dimensi 3: Partisipasi warga**

Dimensi 3 menilai peluang yang disediakan oleh EP untuk partisipasi masyarakat dan bagaimana masyarakat memanfaatkan informasi publik yang diungkapkan. Indikator-indikatornya dievaluasi melalui survei yang sama yang diselesaikan oleh petugas informasi di masing-masing EP.

Survei dilakukan oleh individu baik melalui penilaian diri atau wawancara. Pertanyaan-pertanyaan pada dimensi ini merupakan bagian dari survey dimensi kedua dan hasilnya ditinjau serta divalidasi dengan cara yang sama.

### **Dimensi 4: Keterbukaan informasi**

Dimensi 4 menilai cakupan, kuantitas dan kualitas data dan informasi yang diungkapkan oleh EP terpilih berdasarkan Standar Data Infrastruktur CoST atau OC4IDS. Indikator-indikatornya dievaluasi melalui riset desktop. Indikator-indikator ini memerlukan dua atau tiga orang evaluator, seperti pada Dimensi 1. Penilaian terhadap kualitas data yang dikumpulkan berasal dari metode yang sama, dimana satu observasi akan selalu diperoleh melalui evaluasi independen oleh dua orang yang berbeda.

## **2.2 Pengumpulan data**

### **Riset melalui komputer**

Survey yang dilakukan untuk melengkapi Dimension 1 adalah dengan melakukan pencarian/ browsing pada situs resmi pemerintahan. Indikator pada setiap variable maupun sub-variabel dicantumkan link jika mampu dibuktikan bahwa kita memiliki aturan-aturan serta kebijakan yang mendukung terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Pada Dimension 4 survey dilakukan dengan mengumpulkan data-data proyek yang dikerjakan dalam periode Tahun 2016-2022 pada halaman website resmi dari Kabupaten Lombok Barat yang disebut LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Data yang terkumpul dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil setiap instansi selama periode waktu tersebut adalah sebanyak dua sampel atau Proyek. Proyek pertama diambil dengan proyek yang memiliki nilai kontrak tertinggi, kemudian yang kedua dilakukan dengan sampling acak.

Proyek satu dan dua dilakukan evaluasi dengan mengecek indikator-indikator pada variable yang sudah ditentukan. Pengecekan data proyek dilakukan pada website resmi hanya di halaman LPSE Kabupaten Lombok Barat.

Beberapa situs web digunakan sebagai sumber data untuk penelitian melalui komputer antara lain:

1. LPSE Kabupaten Lombok Barat - Home ([lombokbaratkab.go.id](http://lombokbaratkab.go.id))

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) Kabupaten Lombok Barat **adalah** sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Loombok Barat yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem **LPSE** ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. <https://peraturan.go.id/>

Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan

### Survey Entitas Pengadaan

Survey dilakukan dengan pelatihan sebelumnya kepada surveyor dari masing-masing dinas yang telah ditunjuk oleh masing-masing pimpinan instansi yang menjadi peserta ITI. Survey kemudian dibagikan dengan pengisian self-assesment dalam jangka waktu tertentu. Setiap surveyor diberikan kontak ke Peneliti ITI jika terdapat pertanyaan atau bagian yang kurang jelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tahapannya sebagai berikut:

- Sekretariat ITI telah mengirimkan surat permohonan petugas yang akan bertugas untuk mengisi form survey ke Dinas-dinas terkait. Dinas akan menjawab dengan mengirimkan nama petugas yang akan membantu mengisi form survey yang akan diberikan. Pengumpulan Data pada Dimension 2&3 dilakukan dengan menyebarkan form isian yang kemudian diisi oleh petugas pada Dinas.
- Petugas dari Dinas akan menjawab pertanyaan pada form sesuai dengan kondisi terkini pada Dinas.
- Jika mengalami kesusahan dalam mengisi akan dibantu oleh tim ITI untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan survey.
- Petugas diberikan jangka waktu selama dua minggu untuk menjawab.
- Jika sampai dengan waktu yang disepakati form survey belum terkumpul, maka tim ITI akan mendatangi petugas di kantor tempat bekerja untuk menanyakan kendalanya.
- Data kemudian dilakukan analisa.

### Daftar koresponden survey ITI 2023

No.	Nama	Posisi/Jabatan	Instansi
1	Arum Padmarani Swarna Aurajati	Perencana Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Lalu Hariady dan Syaeful Hazah	Staff	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

3	Abdul hakim, S.Ak	Fungsional Perencana	Badan Pendapatan Daerah
4	Mohammad Munir, S.Pd	Fungsional Perencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Nursaid & Satriadi A.U.	Staff	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Lalu Gema Wahyu Aditya	Staff	Dinas Pertanian
7	Ni Luh Ayu Budiyanti	Kasubag Program	Dinas Perhubungan
8	Alwia	Staff Program	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Lalu Bushairi Sadikin	Staff	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Kadariusman ST	Jabatan Fungsional Penata Ruang	Dinas Perumahan dan Pemukiman
11	Atmayadi, S.Pd., M.Kes		Rumah Sakit Umum Daerah
12	Fathurrahman, Se	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
13	I Nyoman Gita Perbinta	Staff	Dinas Pariwisata
14	Acep Suhendra, S.STP	Kasubag. Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
15	Diniek Dewi Rahmawati	Staff OP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air
16	Riko Yano Pera, St	Analisis Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
17	Firman Wahyudi	Staff	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya

Tabel 2. Daftar koresponden survey ITI 2023

### Periode Pengumpulan Data

- Penyebaran form survey : 10 Mei 2023
- Pengumpulan form survey : 24 Mei 2023
- Evaluasi hasil survey : 23 Juni 2023

## 2.3 Sampel Entitas Pengadaan

Entitas pengadaan yang ikut serta dalam ITI adalah seluruh Instansi di Lombok Barat yang memiliki pekerjaan Infrastruktur dari tahun 2016-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar berikut

Proses:

1. Mendata semua pekerjaan proyek dalam periode tahun 2016-2022
2. Mengumpulkan data proyek per masing-masing Dinas
3. Mengurutkan berdasarkan nilai proyek tertinggi sampai dengan terendah pada masing-masing Dinas
4. Pengambilan dua proyek dengan proyek yang memiliki nilai kontrak tertinggi dan satu proyek acak.
5. Melakukan evaluasi sesuai form

Kriteria: Dinas yang memiliki pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Lombok Barat

Data yang digunakan:

1. Nilai proyek infrastruktur
2. Data sumber penganggaran harus bersumber pada APBD Kabupaten Lombok Barat.
3. Pelaksanaan proyek dilakukan di Lombok Barat
4. Sektor pekerjaan merupakan pembangunan infrastruktur publik

Daftar Entitas Pengadaan ITI 2023

No.	Nama Instansi
1.	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
3.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat
5.	Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat
6.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
9.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

10.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
11.	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
15.	Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3. Daftar Entitas Pengadaan ITI 2023

## 2.4 Sampel Proyek Infrastruktur

Secara umum sampel proyek diambil sebanyak dua proyek untuk masing-masing entitas pengadaan dengan proses sebagai berikut:

1. Langkah 1: Pengumpulan Data - Data proyek infrastruktur dari beberapa sumber termasuk BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Data ini mencakup detail proyek, seperti nama, jenis, sektor, anggaran, tahun pelaksanaan, dan sumber anggaran.
2. Langkah 2: Klasifikasi Proyek - Proyek-proyek diklasifikasikan berdasarkan sektor (misalnya, jalan, gedung, SPAM, jaringan irigasi, dan lain sebagainya) dan jumlah anggaran proyek.
3. Langkah 3: Seleksi Proyek - Dua proyek yang berbeda dipilih dari masing-masing kelompok sektor dan ukuran anggaran. Seleksi pertama dilakukan untuk nilai proyek tertinggi, selanjutnya pemilihan dilakukan secara acak, dan proyek-proyek yang telah dievaluasi lebih awal tidak dipilih lagi.

Kriteria pemilihan sampel proyek infrastuktur melibatkan klasifikasi berdasarkan EP dan jumlah anggaran. Proyek-proyek dipilih untuk mencakup keragaman EP guna memastikan cakupan yang komprehensif.

Cakupan data yang digunakan untuk seleksi proyek termasuk informasi dari basis data proyek, tahapan pelaksanaan proyek, data kontrak, nama proyek, anggaran, sektor proyek, dan tahun pelaksanaan.

Terkait dengan periode proyek infrastruktur diambil dari tahun 2016 hingga tahun 2022.

Daftar Proyek Infrastruktur ITI 2023

No.	Nama Proyek	Anggaran Proyek	Entitas Pengadaan
1	Pembangunan Dermaga Rakyat Tembowong	Rp. 8.841.187.000,00	Dinas Perhubungan
2.	Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir ( Fasilitas Darat ) Pelabuhan Tawun	Rp. 1.947.793.000,00	Dinas Perhubungan
3.	Pembangunan Pasar Gunungsari 4	Rp. 5.757.950.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4.	Pembangunan Pasar Eyat Mayang, Lembar	Rp. 1.414.203.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5.	Revitalisasi SMPN 1 Sekotong	Rp. 3.620.981.579,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Rehab Ruang Kelas SDN 1 Gelangsar	Rp. 754.620.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Renovasi Taman Giri Menang Square (GMS) Gerung Tender Ulang	Rp. 7.278.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Pemukiman
8.	Penataan Lampu Kawasan Giri Menang Square (GMS) Tender Ulang	Rp. 889.105.000,00	Dinas Perumahan Dan Pemukiman
9.	Pembangunan Gedung HCU (DAK)	Rp. 8.750.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
10.	Pembangunan Power House	Rp. 563.543.170,00	Rumah Sakit Umum Daerah
11.	Pembangunan Puskesmas Banyumulek (DAK AFIRMASI)	Rp. 9.570.524.806,00	Dinas Kesehatan
12.	Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada	Rp. 814.170.000,00	Dinas Kesehatan
13.	Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
14.	Lampu Taman Tenaga Surya (DAK)	Rp. 280.500.000,00	Dinas Pariwisata
15.	Pengadaan Rumah Kompos kapasitas1 ton/hari	Rp. 840.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada	Rp. 500.160.700,00	Dinas Pertanian

17.	Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK)	Rp. 332.500.000,00	Dinas Pertanian
18.	Integrasi Pergaraman	Rp. 328.633.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
19.	Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTERIAN KOPERASI dan UKM RI	Rp. 455.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
21.	Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi	Rp. 864.500.000,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
22.	Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari	Rp. 300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
23.	Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri	Rp. 300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
24.	Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar	Rp. 394.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Pembangunan Lanjutan GOR Mini	Rp. 4.800.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
27.	Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
28.	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan)	Rp. 6.458.579.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air
29.	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru- Suranadi	Rp.19.368.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga
30.	Paket I (satu) Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK Reguler Bidang Jalan) (003) Pelangan - Labuan Poh	Rp.10.160.616.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga

31.	Pembangunan Konstruksi Gedung IGD RSUD Patut Patuh Patju (Pinjaman Daerah)	Rp.80.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya
32.	Rehabilitasi Gedung Kantor PEMDA dampak Bencana	Rp.1.492.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya

Tabel 4. Daftar Proyek Infrastruktur ITI 2023

## 2.5 Protokol interaksi

Berikut merupakan tahapan dan protokol Interaksi dengan EP (Entitas Pengadaan) pada Setiap Tahap Proses Evaluasi:

1. Dalam proses evaluasi, interaksi dengan EP dimulai dengan mengirimkan undangan resmi untuk berpartisipasi dalam survei ITI. Survei ini mencakup dimensi-dimensi yang dievaluasi dan pertanyaan terkait transparansi proyek.
2. Proses berlanjut dengan pengiriman pengingat kepada EP yang belum merespons undangan setelah periode waktu 1 (satu) minggu setelah diberikan survey.
3. Jika EP merespons undangan, mereka diberikan diberikan form survei dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan panduan yang disediakan dalam batas waktu 1 (satu) minggu.
4. Jika EP mengalami penundaan atau tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan, proses selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat pengingat dan upaya komunikasi lanjutan untuk memfasilitasi partisipasi.

EP yang Tidak Melengkapi Survei ITI:

Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengundang dan berinteraksi dengan EP, terkadang ada EP yang tidak dapat atau tidak bersedia melengkapi survei ITI.

Ketentuan Proses:

1. Dalam kasus keterlambatan atau tidak respon dari EP, upaya komunikasi tambahan dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi. Ini termasuk pengiriman surat pengingat lebih lanjut, email, whatsapp, atau telepon jika kontak EP tersedia.
2. Selama proses komunikasi, ditekankan pentingnya partisipasi mereka dalam evaluasi untuk meningkatkan transparansi sektor infrastruktur.
3. Peringatan terakhir diberikan melalui surat resmi dari FLLAJ Kabupaten Lombok barat selaku CoST Lombok Barat.
4. Jika tidak ada respon dari instansi setelah surat terakhir diberikan maka nilai dari hasil survey akan dianggap 0 (nol). Positifnya, semua EP berhasil menyelesaikan survei.

## 2.6 Tantangan dan Batasan

### 1. Tantangan dalam Memilih EPs:

Keterbatasan Data Tersedia: Salah satu tantangan utama dalam pemilihan EP adalah keterbatasan data yang tersedia. Beberapa EP mungkin tidak memiliki data yang lengkap atau terbaru, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi transparansi mereka.

### 2. Tantangan dalam Memilih Proyek Infrastruktur:

Ketersediaan Data Proyek: Memilih proyek infrastruktur yang relevan dan mendukung evaluasi transparansi dapat menjadi sulit jika data proyek yang diperlukan tidak lengkap atau sulit diakses.

### 3. Tantangan dalam Menghubungi dan Mendapatkan Dukungan EP:

Beberapa EP mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan evaluasi atau pemahaman yang mengenai transparansi.

### 4. Tantangan dalam Penyelesaian Survei oleh EP:

Kompleksitas Survei: Survei ITI mungkin mengandung pertanyaan atau permintaan informasi yang detail bagi beberapa EP, yang bisa memperlambat proses penyelesaian.

### 5. Tantangan dalam Evaluasi Proyek Infrastruktur:

6. Data yang Tidak Lengkap: Terkadang data yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek mungkin tidak lengkap atau tidak sesuai.

7. Subjektivitas Penilaian: Penilaian terhadap tingkat transparansi proyek infrastruktur dapat memiliki elemen subjektivitas dan interpretasi yang berbeda oleh evaluators.

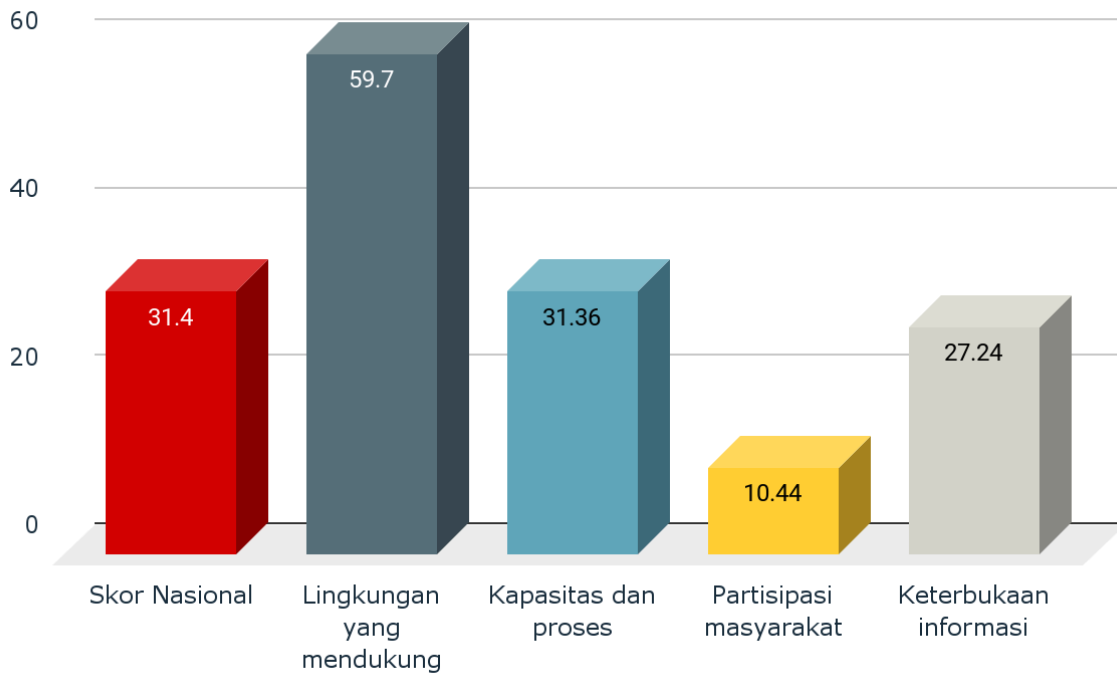
### 8. Tantangan spesifik lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan ITI:

1. Beberapa instansi belum pernah menerapkan cost
2. Beberapa instansi menunjuk surveyor yang berbeda dengan yang mengikuti pelatihan sebelumnya
3. Perubahan staff di instansi yang cukup cepat sehingga staff yang sebelumnya telah diberi pelatihan tentang CoST pindah ke Instansi lain.

# Bab 3 | Hasil

## 3.1 Skor ITI Sub-nasional

Berikut Merupakan grafik hasil ITI di Kabupaten Lombok Barat. Nilai pada grafik tersebut berada di skala 0-100.



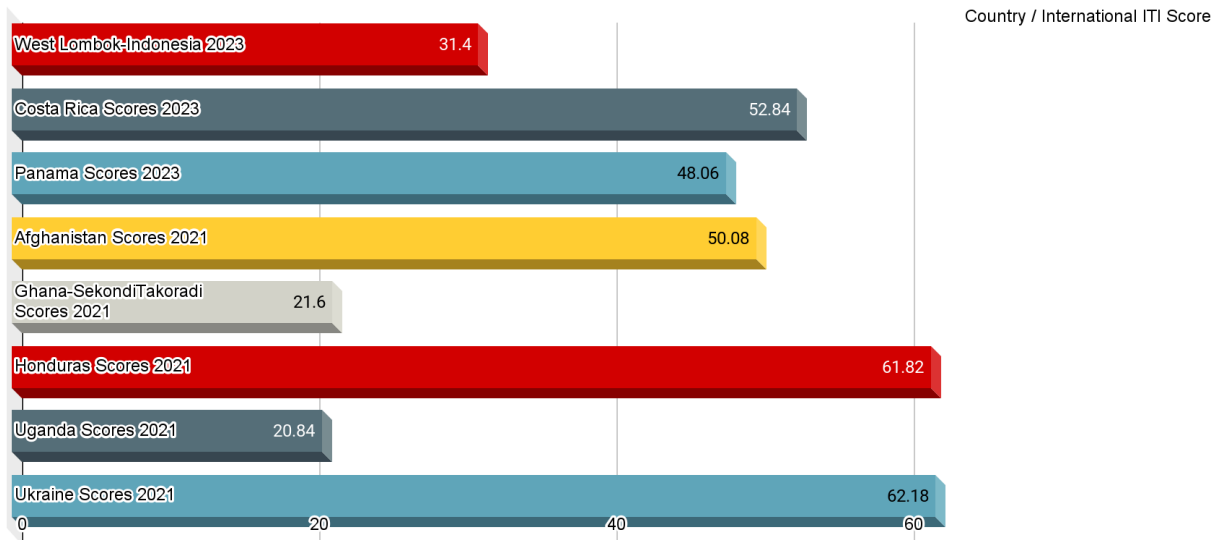
Gambar 2.Skor ITI Lombok Barat

Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hasil dari ITI menunjukkan perlu adanya perbaikan hampir di seluruh dimensi keterbukaan data.

nilai tertinggi terdapat pada dimensi Lingkungan yang mendukung. hal ini sesuai dengan regulasi yang digunakan oleh instansi merujuk dari undang-undang yang berlaku secara nasional. Dimensi dengan nilai terendah terdapat pada partisipasi masyarakat. diluar dari musrenbang, keterlibatan masyarakat dalam proses infrastruktur masih belum maksimal dan perlu adanya atensi terkait hal tersebut secara nyata. Untuk kapasitas, proses dan keterbukaan informasi, nilainya hampir sama namun cenderung rendah. hal ini dapat terlihat dari belum adanya staff khusus informasi di hampir semua instansi serta sistem keterbukaan data publik yang masih terbatas hanya di tahap tender saja.

### 3.1.1 Perbandingan Internasional

Pada bagian ini akan dibahas tentang perbandingan hasil ITI Kabupaten Lombok Barat dengan anggota CoST lainnya diseluruh dunia. Grafik 3 menunjukkan bahwa skor ITI Lombok Barat berada diatas beberapa program CoST lainnya namun masih cenderung berada dibawah keseluruhan program CoST.



Gambar 3. Perbandingan Internasional Skor ITI Lombok Barat

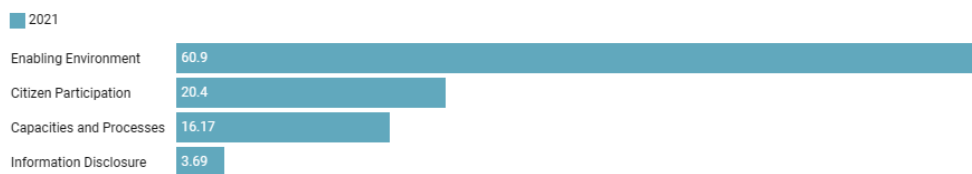
Lebih jauh lagi seperti terlihat di Gambar 4, nilai dari ITI untuk nasional maupun sub nasional memiliki trend yang hampir sama yaitu memiliki nilai lingkungan yang mendukung yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan secara regulasi setiap negara/daerah telah memiliki sistem yang cukup mampu untuk mengimplementasi keterbukaan data infrastruktur yang baik. Namun melihat dari tiga dimensi lain yang cukup rendah artinya adalah implementasi keterbukaan data, baik di sisi kapasitas dan proses, jumlah informasi yang dibuka, serta partisipasi masyarakat masih belum dirasakan keberadaannya ataupun belum terimplementasi secara maksimal.



Afghanistan National ITI scores



Costa Rica National ITI scores



Ghana: ITI Sub-national Score



Honduras ITI National Score



National ITI scores (2023): Panama



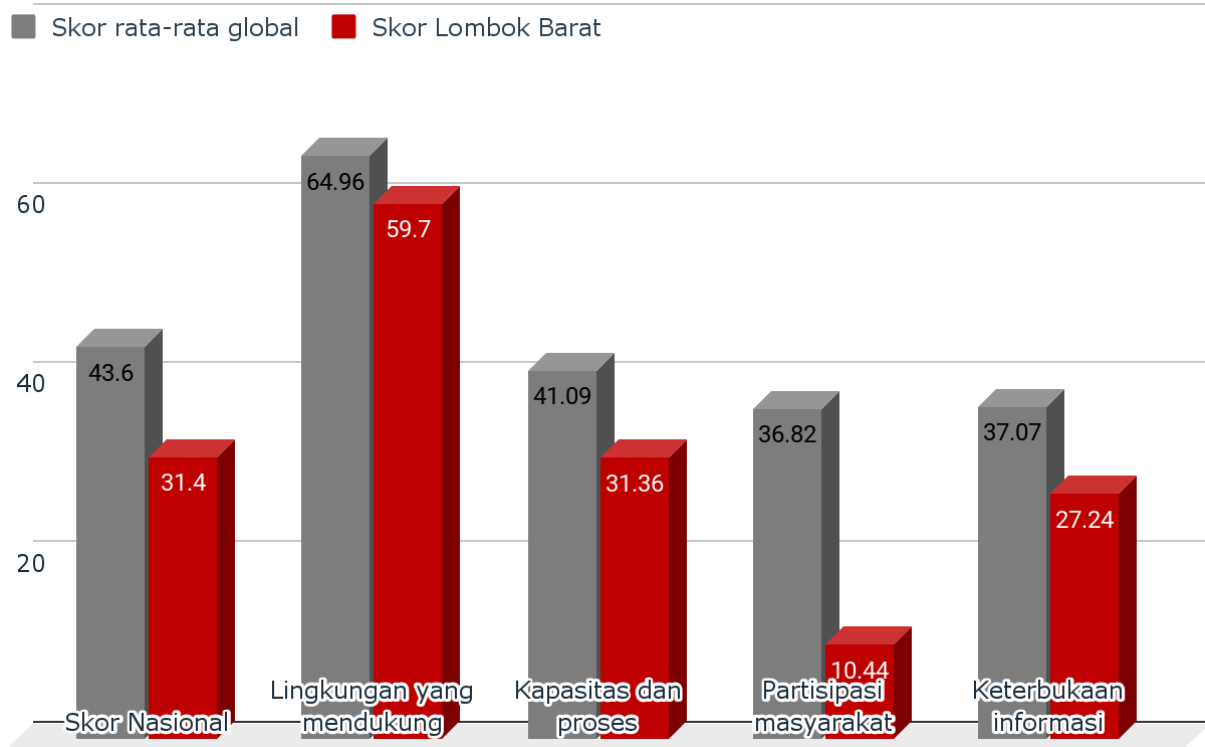
Uganda National ITI Scores



Ukraine National ITI Scores

Gambar 4. Detail Perbandingan Internasional Skor ITI

Gambar 5 berikut merupakan detail perbandingan antara rata-rata skor ITI internasional dengan skor ITI Lombok Barat

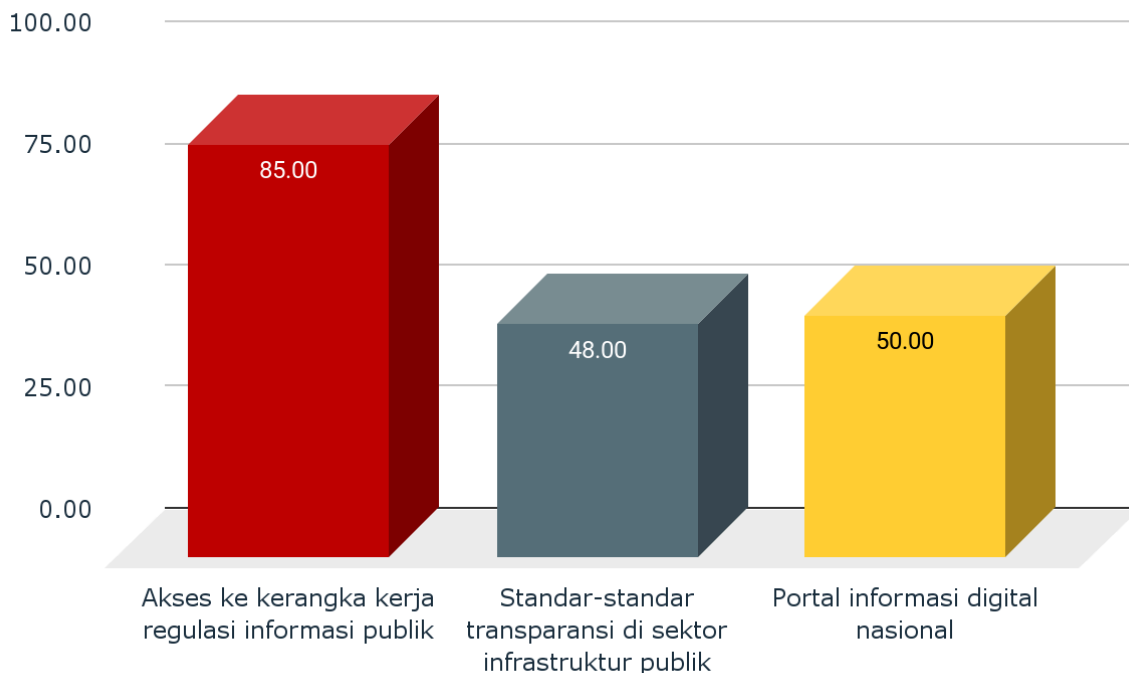


Gambar 5. Detail Perbandingan Internasional Skor ITI Lombok Barat

Secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa skor ITI baik Nasional maupun masing-masing dimensi untuk Kabupaten Lombok Barat berada di bawah rata-rata internasional namun memiliki trend yang hampir sama. Lombok Barat membutuhkan 12.2 point untuk berada di rata-rata internasional anggota CoST lainnya. Terkait skor masing-masing dimensi butuh sekitar 5 sampai 10 point untuk berada di rata-rata internasional kecuali dimensi 3 yaitu partisipasi masyarakat yang terpaut jauh 26.4 point. Hal ini menunjukkan perlu adanya atensi khusus pada dimensi ini untuk kedepannya.

### 3.1.2 Lingkungan yang mendukung

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dimensi pertama ITI, gambar 6 dibawah ini memuat hasil dari sub variabelnya:



Gambar 6. Skor sub variable dimensi 1 ITI Lombok Barat

Dapat dilihat dalam lingkup regulasi, sistem dasar untuk akses informasi publik sudah sangat baik tertera di dalam undang-undang keterbukaan data, mulai dari keterbukaan regulasi itu sendiri, sanksi yang jelas, serta ditunjang dengan website/sistem informasi digital yang sudah tersedia baik secara nasional maupun sub nasional.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat beberapa indikator penting yang mempengaruhi dimensi ini sebagai berikut:

**A. Indikator dengan nilai tertinggi**

1. Undang-undang akses terhadap informasi publik :100 Poin
2. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap mandat akses informasi publik :100 Poin
3. Hak untuk meminta informasi publik : 80 Poin
4. Kemudahan akses informasi dalam platform informasi digital : 80 Poin

**B. Indikator dengan nilai terendah**

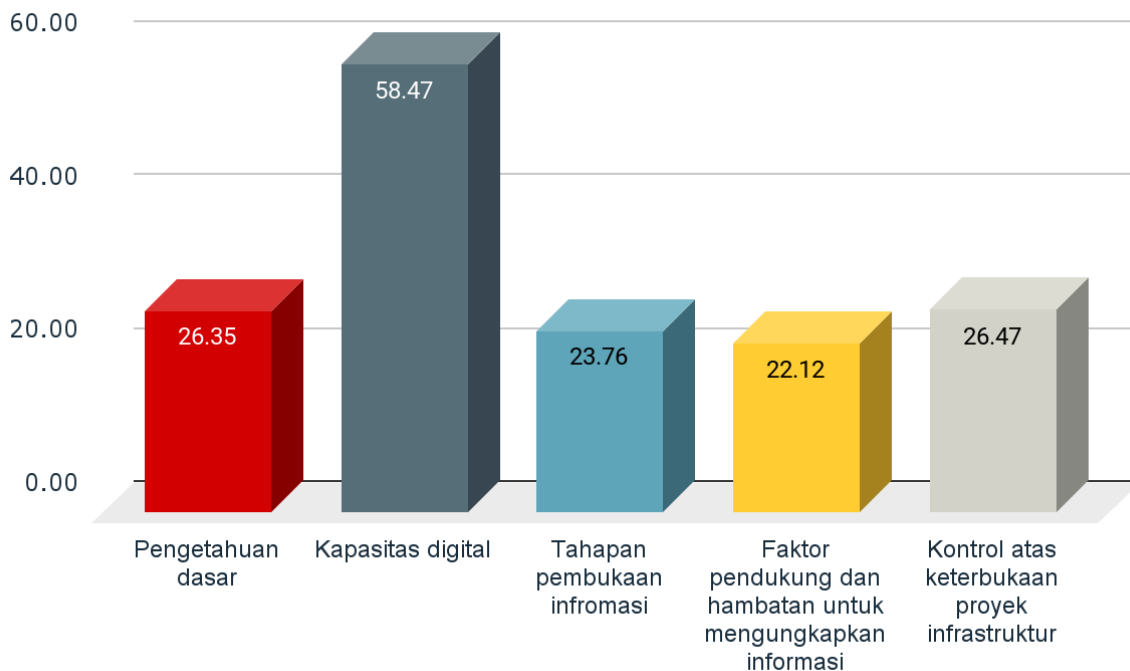
1. Sistem informasi geografis (GIS) proyek infrastruktur : 0 Poin
2. Standar keterbukaan data infrastruktur : 40 Poin
3. Publikasi informasi proyek infrastruktur publik secara proaktif : 40 Poin
4. Publikasi informasi proses pengadaan publik secara proaktif : 40 Poin

Untuk indikator terendah lebih terlihat dari belum adanya sistem GIS yang merupakan sistem informasi digital tingkat lanjut yang sangat baik guna menginformasikan kondisi proyek infrastruktur di suatu daerah. Selain itu belum adanya standar data yang jelas serta keharusan dalam mengupdate data secara berkala masih butuh perhatian lebih secara regulasi. Hal ini mungkin dapat diakomodir dengan adanya peraturan daerah yang mengatur

penggunaan suatu standar. secara khusus di lombok barat dikarenakan terdaftar sebagai anggota CoST, diharapkan dapat menggunakan standar tersebut secara tertulis melalui regulasi daerah berupa perbup ataupun perda.

### 3.1.3 Capacities and processes

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dimensi kedua ITI, gambar 7 dibawah ini memuat hasil dari sub variabelnya:



Gambar 7. Skor sub variable dimensi 2 ITI Lombok Barat

Gambar diatas merupakan grafik hasil rata-rata subnasional untuk dimensi kedua. Di lingkup variabel dapat dilihat bahwa kapasitas memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan proses. Di lingkup sub variabel nilai tertinggi berada di kapasitas digital diikuti oleh pengetahuan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa secara kapasitas digital maupun pengetahuan Instansi di lombok barat cukup mampu untuk menerapkan keterbukaan data yang baik. Namun di sisi proses, Lombok barat masih dapat berkembang terutama di sisi kendali keterbukaan datanya.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat beberapa indikator penting yang mempengaruhi dimensi ini sebagai berikut:

#### A. Indikator dengan nilai tertinggi

1. Situs web instansi : 71.76 Poin
2. Konektivitas ke internet : 70.59 Poin
3. Perangkat komputer : 64.71 Poin

## B. Indikator dengan nilai terendah

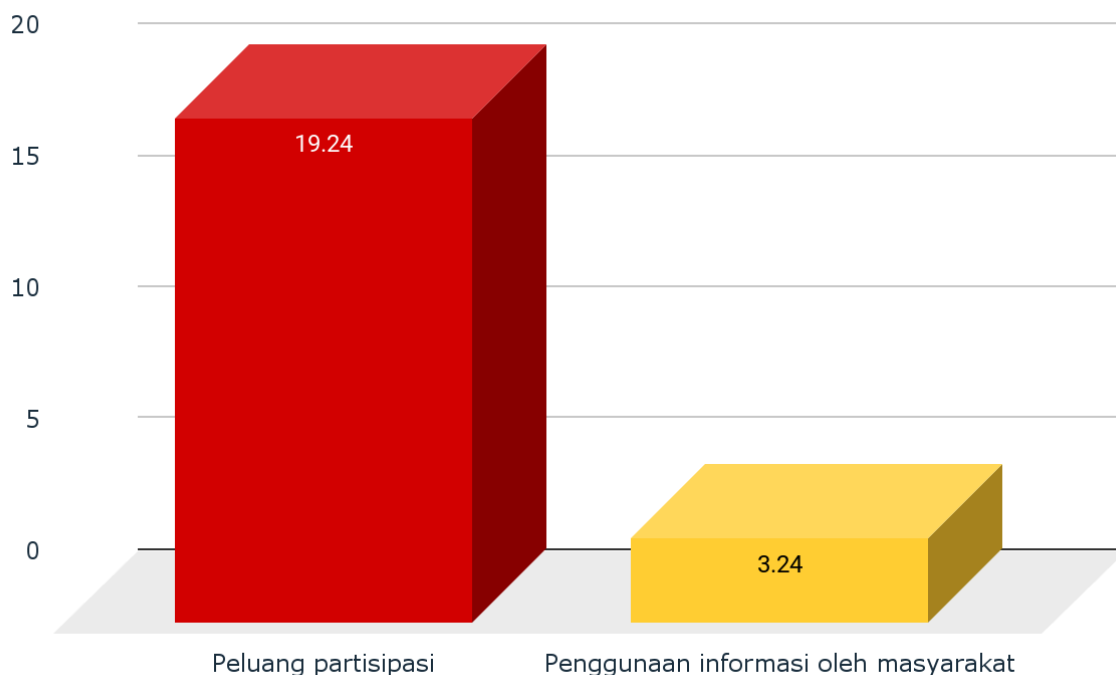
1. Rencanakan untuk mengurangi keterbatasan dalam mempublikasikan informasi : 0 Poin
2. Visualisasi berdasarkan data proyek infrastruktur : 3.53 Poin
3. Hambatan birokrasi untuk mempublikasikan informasi : 3.53 Poin

Dapat dilihat bahwa hal-hal terkait sarana dan prasarana cenderung memiliki nilai yang tinggi. Namun beberapa hal yang dapat dilakukan kedepannya agar meningkatkan skor dimensi ini antara lain terkait visualisasi data proyek infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan tabel, grafik, maupun jenis visualisasi lain guna memberikan gambaran informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait proyek infrastruktur di Lombok Barat.

Hal lain yang perlu perhatian lebih yaitu terkait dengan hambatan birokrasi maupun mitigasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat ataupun membatasi keterbukaan informasi di Lombok Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya studi visibilitas informasi proyek infrastruktur agar diketahui lebih jauh terkait dengan sistem birokrasi maupun batasan-batasan yang ada dalam penyampaian informasi proyek infrastruktur di Lombok Barat.

### 3.1.4 Citizen participation

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dimensi ketiga ITI, gambar 8 dibawah ini memuat hasil dari sub variabelnya:



Gambar 8. Skor sub variable dimensi 3 ITI Lombok Barat

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam proyek infrastruktur jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk penggunaan informasi publik dalam masyarakat. Dari hasil survey didapatkan bahwa kesempatan partisipasi ada dalam proses Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi. Selain itu terkait dengan kesempatan, pada beberapa proyek infrastruktur terdapat mekanisme konsultasi publik.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat beberapa indikator penting yang mempengaruhi dimensi ini sebagai berikut:

**A. Indikator dengan nilai tertinggi**

1. Kesadaran akan peluang partisipasi : 28.24 Poin
2. Partisipasi warga negara yang terlembaga : 22.35 Poin
3. Partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur : 18.82 Poin
4. Partisipasi warga negara yang permanen dan inklusif : 18.82 Poin

**B. Indikator dengan nilai terendah**

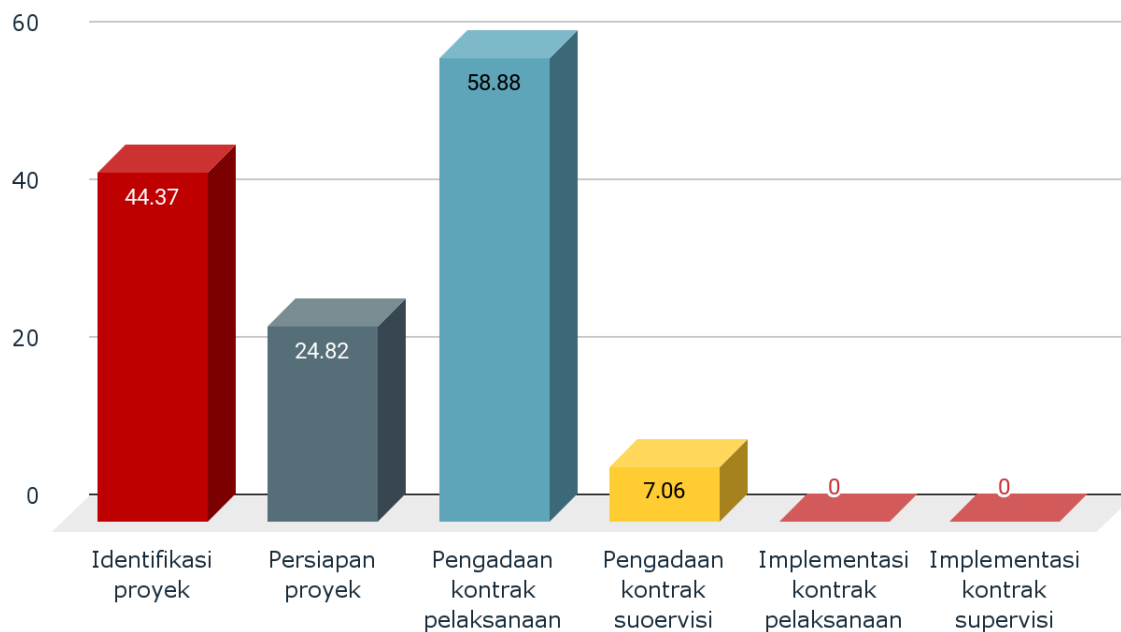
1. Bukti penggunaan institusional : 2.35 Poin
2. Warga menggunakan bukti : 0 Poin
3. Perbaikan sebagai respons terhadap partisipasi warga : 0 Poin

Dalam hal partisipasi masyarakat, konsultasi publik hanya didapatkan informasi pada beberapa surveyor saja. Untuk penanganan konsultasi publik sifatnya bervariasi, ada yang dilaksanakan oleh entitas pengadaan itu sendiri, melalui FLLAJ, maupun dilakukan oleh kontraktor. Secara umum informasi ini masih bersifat terbatas dan hanya diketahui oleh beberapa entitas pengadaan.

Terkait penggunaan informasi oleh publik masih terlihat kurang. Hal yang mungkin menjadi penyebab kurangnya akses informasi sangat beragam. Minat masyarakat untuk mengetahui data terkait infrastruktur, kesulitan masyarakat dalam mengakses portal informasi, kualitas sumber daya ataupun kurangnya informasi terkait portal data bisa menjadi faktor utama.

### **3.1.5 Information disclosure**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dimensi keempat ITI, gambar 9 dibawah ini memuat hasil dari sub variabelnya:



Gambar 9. Skor sub variable dimensi 4 ITI Lombok Barat

Pada dimensi 4 yaitu keterbukaan data dapat dilihat bahwa tahapan pengadaan/tender kontrak proyek konstruksi infrastruktur memiliki nilai tertinggi. Hal ini didukung dengan adanya portal LPSE yang diperuntukkan guna memberikan pasar yang terbuka bagi proyek infrastruktur. Dalam tahap ini yang perlu diperhatikan yaitu data terkait pelaksanaan proyek infrastruktur yang menempati nilai terendah pada bagian konstruksi proyek infrastruktur. Hal ini dikarenakan belum adanya data yang wajib dibuka untuk siklus proyek setelah dilakukan tender.

Untuk sisi supervisi, hampir tidak ada data yang ditemukan dalam portal keterbukaan data di Lombok Barat. Hal ini terjadi karena anggaran supervisi yang cenderung kecil dan belum masuk jenis informasi yang wajib untuk dibuka menurut undang-undang keterbukaan data. Hal ini tentu menjadi kendala yang sangat membutuhkan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas dan kuantitas keterbukaan data di Lombok Barat.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat beberapa indikator penting yang mempengaruhi dimensi ini sebagai berikut:

**A. Indikator dengan nilai tertinggi**

1. Pemilik proyek : 100 Poin
2. Lokasi proyek : 100 Poin
3. Sumber pendanaan : 100 Poin
4. Jumlah perusahaan yang menawar : 100 Poin
5. Jenis Kontrak : 100 Poin

**B. Indikator dengan nilai terendah**

1. Lingkup pekerjaan kontrak : 3.53 Poin

2. Sektor dan subsektor : 21.18

3. Durasi kontrak : 26.47

**C. Indikator dengan nilai nol**

1. Tujuan

2. Dampak lingkungan

3. Dampak lahan dan pemukiman

4. Detail kontak

5. Judul resmi kontrak

6. Semua indikator pada data supervisi proyek infrastruktur kecuali proses pengadaan dan jumlah perusahaan yang ikut dalam tender, sebagai contoh Perubahan harga kontrak dan Perubahan durasi kontrak supervisi.

7. Semua indikator dalam tahap pelaksanaan dari kontrak konstruksi proyek infrastruktur, sebagai contoh Perubahan harga kontrak dan Perubahan durasi kontrak pelaksanaan..

Dalam daftar diatas dapat dilihat bahwa data-data terkait tender sudah dinilai cukup baik dalam keterbukaannya. Namun perlu juga dicantumkan terkait dengan Sektor maupun Sub-sektor dari masing-masing proyek infrastruktur yang nantinya dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengelompokan proyek infrastruktur yang lebih baik. Durasi kontrak serta lingkup pekerjaan juga perlu dicantumkan agar masyarakat mendapatkan gambaran lebih terkait dengan infrastruktur utama maupun pendukung yang akan dibangun nantinya pada proyek tersebut.

Terkait dengan indikator yang bernilai 0 (nol) dikarenakan secara regulasi standar data yang digunakan belum mengharuskan untuk membuka informasi tersebut. Diharapkan dengan adanya standar CoST yang diterapkan di Lombok Barat melalui portal INTRAS dapat memberikan data-data yang belum lengkap tersebut guna gambaran yang lebih jelas terkait pekerjaan maupun pengawasan proyek infrastruktur di Lombok Barat

### 3.2 Skor ITI Entitas Pengadaan

(Please introduce the section and the table below, you need to say the table only includes the top 10 EP, or you can add the missing 7. The complete table maybe better in your case)

Peringkat	Entitas Pengadaan	Skor ITI	Skor Dimensi 2	Skor Dimensi 3	Skor Dimensi 4
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	31.71	38.22	35.25	23.8
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat	30.62	51.79	9	25.6
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat	29.73	43.6	19.8	23.8

4	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	29.54	45.39	9.9	27.95
5	Dinas Pertanian Lombok Barat	29.45	38.68	14.35	30.8
6	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	28.18	30.15	25.8	27.95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	26.89	44.89	0	27.95
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	25.28	32.84	5.4	31.1
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	25.11	28.45	15.9	27.95
10	Dinas Kesehatan Lombok Barat	24.41	32.26	5.1	29.6
	Dinas Pariwisata Lombok Barat	23.33			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya	20.82			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat	20.00			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga	18.86			
	Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat	18.77			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air	18.04			
	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	15.44			

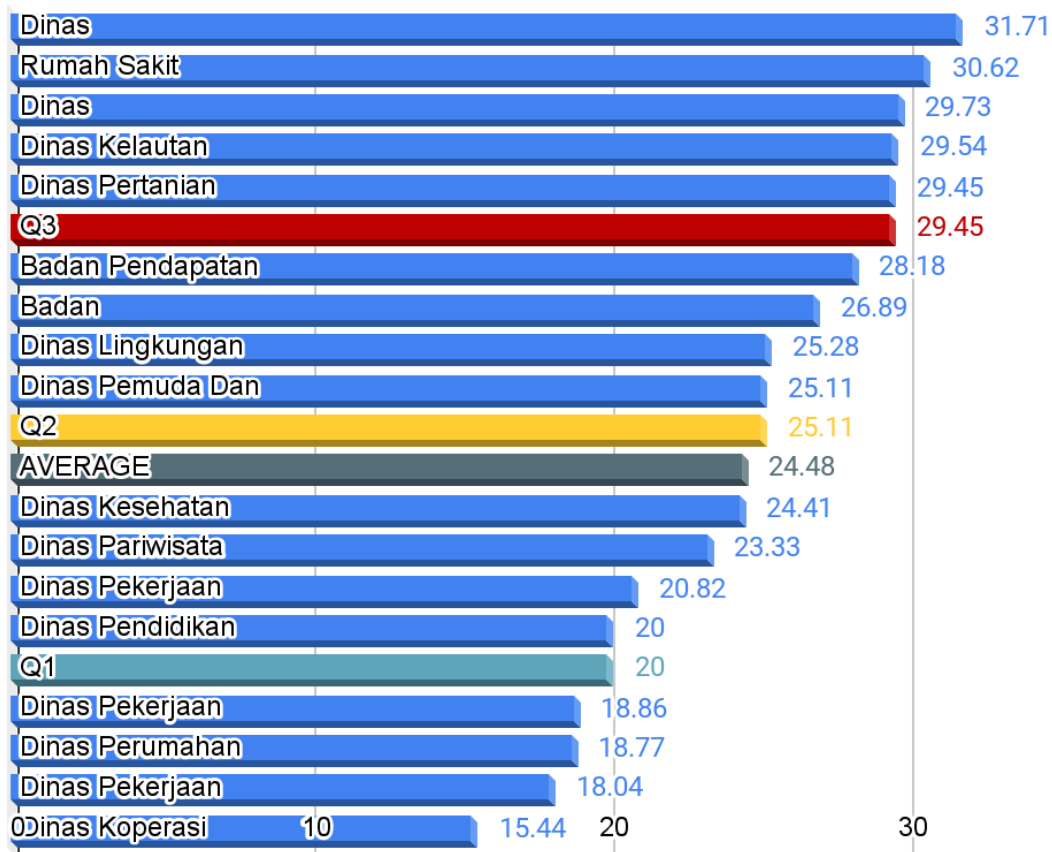
Tabel 5. Daftar Entitas Pengadaan (EP) ITI 2023

Tabel diatas merupakan tabel peringkat ITI untuk 10 Entitas Pengadaan teratas. Tiga entitas dengan peringkat tertinggi yaitu Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Melihat dari gap skor dari setiap Entitas Pengadaan, terlihat jelas bahwa kesenjangan yang cukup signifikan berada pada keterlibatan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat di peringkat pertama. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat berada di peringkat kedua dengan nilai pada dimensi 2 (kapasitas dan proses) keterbukaan data terbaik. Dimensi ini juga terlihat memiliki kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai dimensi keempat (keterbukaan informasi). Namun secara keseluruhan, gap dari masing-masing 10 Entitas Pengadaan teratas cukup

kecil yaitu maksimal sebesar 7.3 poin dengan hanya satu Entitas Pengadaan yang berada di bawah nilai rata-rata.

Gambar 6 dibawah ini memuat hasil ITI dari EP untuk setiap kuartil dan nilai rata-rata skor ITI.

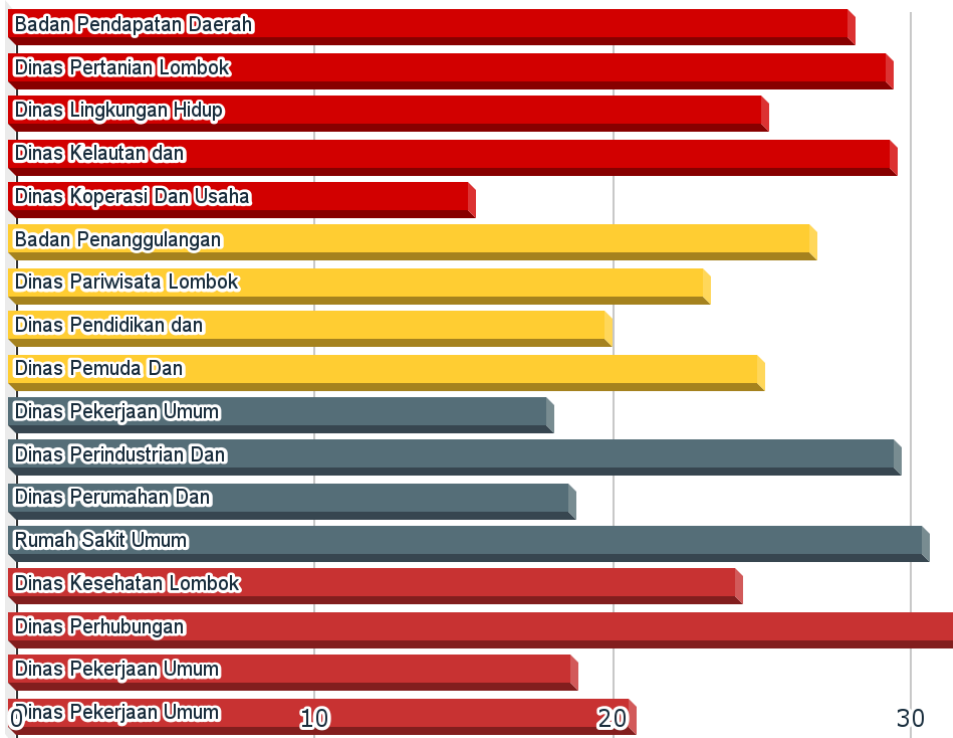


Gambar 10. Skor entitas pengadaan ITI Lombok Barat

Jika dilihat secara keseluruhan, terdapat 8 Entitas Pengadaan yang berada di bawah nilai rata-rata dan 9 entitas lainnya berada di atas nilai rata-rata. Gap yang terjadi untuk 8 Entitas Pengadaan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan 9 Entitas Pengadaan di atasnya. Hal ini diharapkan menjadi perhatian lebih agar nantinya setiap Entitas Pengadaan mencapai pemerataan sistem keterbukaan data yang optimal. Rata-rata kuartil keempat hampir dua kali lipat rata-rata kuartil pertama. Menampilkan banyaknya perbedaan antara kelompok entitas dengan kinerja terbaik dan terendah..

### 3.2.1 Results by procuring entities budget

Berikut merupakan gambar 11 yang menampilkan nilai skor ITI dari EP jika diurutkan berdasarkan kelompok jumlah anggaran dari yang terendah hingga yang tertinggi.



Gambar 11. Skor entitas pengadaan ITI Lombok Barat berdasarkan nilai total anggaran

Jika dilihat dari sisi jumlah anggaran, belum terlihat adanya keterkaitan khusus dengan skor ITI dari masing-masing Entitas Pengadaan. Namun yang menjadi perhatian adalah perlu adanya usaha lebih pada beberapa Entitas Pengadaan yang memiliki anggaran besar namun masih kurang dalam sistem keterbukaan datanya.

### 3.3 Skor ITI Proyek Infrastruktur

Berikut merupakan tabel yang menampilkan nilai skor ITI proyek tertinggi dari peringkat 1 hingga peringkat 5.

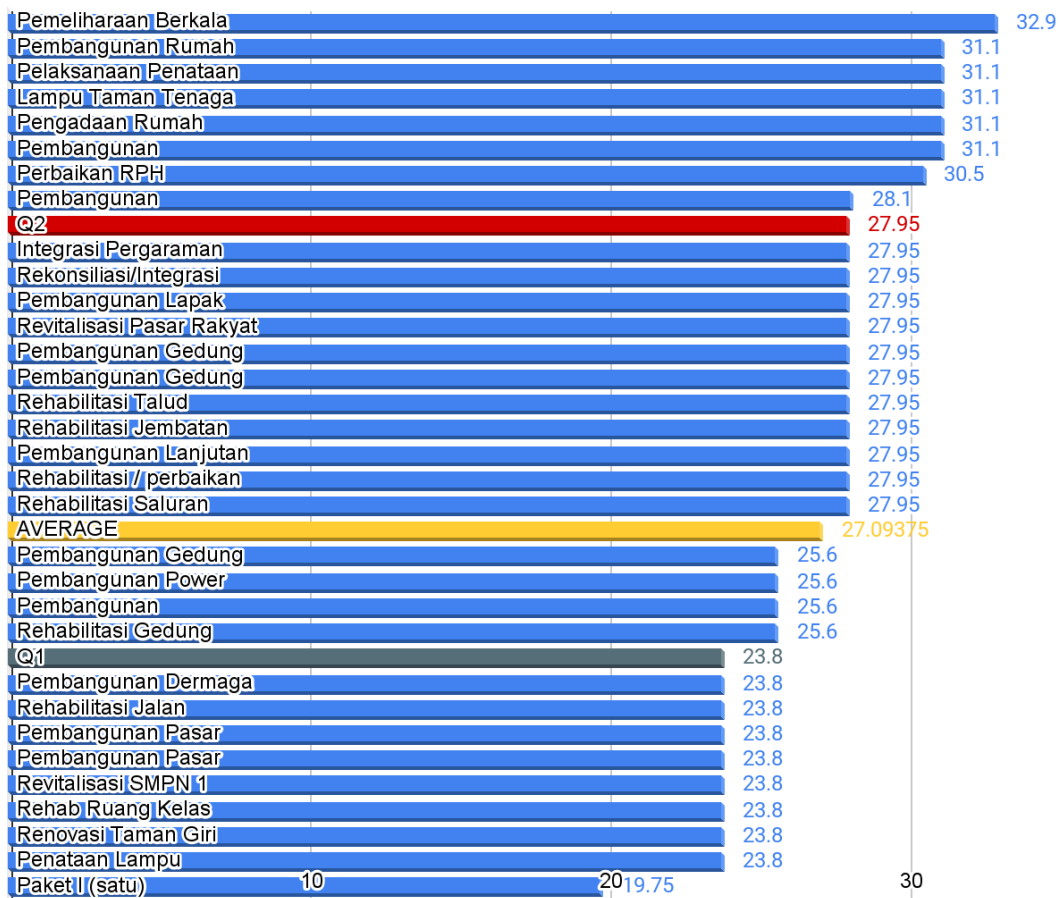
Peringkat	Entitas Pengadaan	Nama Proyek	Skor ITI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru	32.9
2	Dinas Kesehatan Lombok Barat	Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada	31.1
2	Dinas Pariwisata Lombok Barat	Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar	31.1
2	Dinas Pariwisata Lombok Barat	Lampu Taman Tenaga Surya (DAK)	31.1
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	Pengadaan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari	31.1

2	Dinas Pertanian Lombok Barat	Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada	31.1
3	Dinas Pertanian Lombok Barat	Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK)	30.5
4	Dinas Kesehatan Lombok Barat	Pembangunan Puskesmas Banyumulek (DAK AFIRMASI)	28.1
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Integrasi Pergaraman	27.95
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas	27.95
5	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTERIAN KOPERASI dan UKM RI	27.95
5	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi	27.95
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari	27.95
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri	27.95
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar	27.95
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong	27.95
5	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pembangunan Lanjutan GOR Mini	27.95
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air	Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan	27.95
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan)	27.95

Tabel 5. Daftar 5 Proyek Infrastruktur dengan skor tertinggi ITI 2023

Jika dilihat 10 Proyek Infrastruktur dengan skor tertinggi pada tabel 5, terlihat nilai berkisar antara 27.95 sampai 32.9 dengan gap sebesar 1-5 poin. Semua Proyek tersebut berada diatas rata-rata keseluruhan proyek infrastruktur yang menjadi sample pada analisis ini. Perlu diperhatikan skala penilaiannya berkisar dari 0 hingga 100. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan proyek dengan skor tertinggi (32,9) pun memiliki peluang peningkatan yang signifikan.

Berikut merupakan gambar 12 yang menunjukkan hasil skor ITI untuk semua proyek infrastruktur yang dibagi berdasarkan rata-rata dan kuartilnya.



Gambar 12. Skor entitas pengadaan ITI Lombok Barat berdasarkan nilai total anggaran

Jika dilihat secara rata-rata keseluruhan sample proyek, terdapat 13 Proyek Infrastruktur dengan skor ITI yang dibawah nilai rata-rata dan 19 Proyek lainnya berada diatas nilai rata-rata. Terdapat hal yang menarik dari data diatas yaitu Proyek dengan nilai ITI tertinggi dan terendah berasal dari satu Entitas Pengadaan yang sama yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga. Gap skor yang terjadi pada kedua proyek ini juga cukup besar yaitu sebesar 13.2 poin. Perbedaan standar keterbukaan data yang digunakan merupakan faktor yang mendasari kesenjangan pada kedua proyek ini. Proyek dengan nilai tertinggi merupakan proyek yang menggunakan standar CoST IDS yang telah diterapkan selama beberapa tahun di Entitas Pengadaan Tersebut. Sedangkan proyek dengan nilai terendah, merupakan proyek DAK yang belum menggunakan standar CoST IDS. Diharapkan nantinya dengan diterapkannya CoST IDS untuk semua proyek infrastruktur di Lombok Barat dapat meningkatkan rating keterbukaan data yang ada di seluruh Entitas Pengadaan.

# Kesimpulan

- Skor ITI Lombok Barat adalah 31.4 dari nilai maksimal 100, nilai ini masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST yaitu 43.6. Dibutuhkan tambahan skor 12.2 untuk berada di rata-rata internasional.
- Skor dimensi 1 (Lingkungan yang mendukung) merupakan skor tertinggi untuk nilai ITI Lombok Barat di angka 59.7. Skor masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 64.9. Dimensi 1 memiliki gap terendah dari dimensi lainnya yaitu sebesar 5.2.
- Sub variabel tertinggi di dimensi 1 ada pada Akses ke kerangka kerja regulasi informasi publik dan yang terendah pada Standar-standar transparansi di sektor infrastruktur publik
- Skor dimensi 2 (Kapasitas dan proses) merupakan skor tertinggi kedua dengan nilai 31.36. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 41. Dimensi 2 memiliki gap sebesar 9.64 dari rata-rata internasional.
- Sub variabel tertinggi di dimensi 2 ada pada Kapasitas digital dan yang terendah pada Faktor pendukung dan hambatan untuk mengungkapkan informasi
- Skor dimensi 3 (Partisipasi masyarakat) merupakan skor terendah dengan nilai 10.44. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 36.83. Dimensi 3 memiliki gap tertinggi yaitu sebesar 26.38 dari skor rata-rata internasional.
- Sub variabel tertinggi di dimensi 3 ada pada Peluang Partisipasi dan yang terendah pada Penggunaan informasi oleh masyarakat
- Skor dimensi 4 (Keterbukaan informasi) berada di skor 27.24. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 37.06. Dimensi 4 memiliki gap 9.82 dari skor rata-rata internasional.
- Sub variabel tertinggi di dimensi 4 ada pada Pengadaan kontrak pelaksanaan dan yang terendah pada Implementasi kontrak pelaksanaan dan supervisi
- Tidak ada entitas yang memiliki staff informasi resmi yang khusus menangani hal-hal terkait permintaan informasi maupun keterbukaan informasi.
- Portal keterbukaan data infrastruktur yang dapat diakses oleh publik yaitu Ipse (<http://www.lpse.lombokbaratkab.go.id/eproc4/>) yang merupakan portal untuk tahap tender pengadaan barang dan jasa. Portal ini tidak memberikan informasi tentang tahapan proyek lain yang relevan, seperti persiapan dan pelaksanaan.
- Tidak ditemukan portal keterbukaan data yang resmi terkait siklus proyek lainnya setelah proses tender.
- Tidak ditemukan adanya keterbukaan data untuk supervisi proyek infrastruktur.

# Rekomendasi

- Perlu adanya staff informasi dalam setiap entitas pengadaan atau terpusat yang menangani hal-hal terkait permintaan informasi dan keterbukaan data infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk satu staff dari masing-masing-PE untuk secara resmi menjadi staff informasi dan tertuang dalam suatu regulasi.
- Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk staff informasi terutama terkait standar data serta sanksi dalam pelanggaran undang-undang keterbukaan data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada staff informasi yang ditunjuk oleh masing-masing EP.
- Konsultasi publik perlu diadakan untuk semua proyek infrastruktur dan mengikutsertakan staff informasi agar dapat terdokumentasi dengan baik.
- Staff informasi yang ditunjuk wajib mengikuti Musrenbang dan mendokumentasikan hal-hal penting dalam kegiatan partisipasi publik lainnya.
- Perlu adanya portal keterbukaan informasi infrastruktur yang diperuntukkan untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan gratis dalam semua siklus pengadaan infrastruktur publik, berdasarkan standar CoST IDS atau OC4IDS.
- Staff informasi perlu melakukan perbaruan data berkala minimal tiga bulan sekali di portal keterbukaan data infrastruktur yang ada.
- Perlu adanya studi identifikasi birokrasi yang ada di dalam proses keterbukaan informasi infrastruktur.
- Perlu adanya sosialisasi terkait portal-portal keterbukaan data bagi masyarakat sipil dan pengamat transparansi infrastruktur maupun transparansi lainnya untuk membaca dan menggunakan informasi tersebut..
- Perlu peningkatan keterbukaan data untuk semua siklus pengadaan proyek infrastruktur.
- Perlu adanya keterbukaan data khusus untuk supervisi proyek infrastruktur.

# Lampiran 1 | Instrument Evaluasi

The Infrastructure Transparency Index (ITI) score (range 0–1) is calculated as follows:

$$\text{ITI score} = \sum w_d ( \sum w_v ( \sum w_{sv} ( \sum w_i \cdot i ) ) )$$

Where  $w_i$  is the weighting for each evaluated indicator score  $i$  (range 0–1) within each sub-variable,  $w_{sv}$  is the weighting for each sub-variable score within each variable,  $w_v$  is the weighting for each variable score within each dimension and  $w_d$  is the weighting for each dimension score within the ITI.

All dimensions, variables, sub-variables, indicators, indicator points scale and weightings are shown in the following table.

When calculating a national or sub-national ITI score, the dimension 2 and 3 scores are calculated by adding the respective dimension scores for each procurement entity and then dividing each one by the number of procuring entities ( $n_e$ ) to provide the average values. For dimension 4, the scores for each project are added together and then divided by the number of projects ( $n_p$ ).

When calculating a procuring entity ITI score (individually or in groups), dimension 1 and its indicators, sub-variables and variables are not included and larger values of  $w_d$  are used for dimensions 2, 3 and 4 (see weighting column in table below). Again for dimension 4, the scores for each project are added together and then divided by the number of projects ( $n_p$ ).

No.	Level	Name	Description	Indicator evaluation source	Indicator scoring scale (0 points = 0, 1 point = 0.2, 2 points = 0.4, 3 points = 0.6, 4 points = 0.8, 5 points = 1)	Weighting	Indicator type
1	Dimension	Enabling environment	Evaluates national or sub-national conditions enabling transparency for the infrastructure sector considering the legal and regulatory framework and the centralised digital information tools.		The indicators of this dimension are evaluated just once at the national or sub-national level.	0.20 when calculating the national or sub-national ITI score  0.00 when calculating the procuring entity score (i.e. not used)	
1.1	Variable	Legal framework and digital tools				1.00	
1.1.1	Sub-variable	Access to public information regulatory framework	Evaluates the existence of a national regulation on access to public information, or other related regulation, relevant to the infrastructure sector.			0.30	
1.1.1.1	Indicator	Access-to-public information regulatory framework	There is a regulatory framework that guarantees the access to public information in all public sector institutions, which applies to all material held by or on behalf of public authorities with only few exceptions contained in the same law.	Official websites on national legislation	0 = The regulation does not exist; 2 = It exists, but based on the text does not apply to all public institutions and does not apply to all material; 3 = It exists and complies with only one of the two previous conditions; 5 = It exists and complies with the two conditions.	0.25	National or sub-national

1.1.1.2	Indicator	Right to request public information	There exists within the national regulatory framework the right of citizens to request and obtain non-published public information with <ul style="list-style-type: none"> <li>· access to both information and records/documents</li> <li>· no need to provide reasons for their requests</li> <li>· clear maximum timelines</li> <li>· access to all public institutions.</li> </ul>	Official websites on national legislation	0 = This provision does not exist in the regulation or there is no regulation of access to information; 1 = The provision to request non-published information exists but none of the four conditions are covered; 2 = The provision exists but only one condition is covered; 3 = The provision and two conditions are covered; 4 = The provision and three conditions are covered; 5 = The provision and the four conditions are covered.	0.25	National or sub-national
1.1.1.3	Indicator	Sanctions over non-compliance with access to public information mandates	Within the national regulatory framework there are sanctions for non-compliance on the mandates of access to public information.	Official websites on national legislation	0 = No sanctions exist in the regulation or no regulation of access to information exists; 3 = The sanctions only apply to some of the mandates, and/or do not apply to all public sector institutions; 5 = There are sanctions in the regulation for non-compliance with any of the mandates, and they apply to all public sector institutions.	0.25	National or sub-national
1.1.1.4	Indicator	Organisation guaranteeing the sanctions	Within the national regulatory framework there are organisations or mechanisms that are <ul style="list-style-type: none"> <li>· protected against political and financial interference</li> <li>· responsible for overseeing the compliance of access-to-information requirements</li> <li>· compliant with the sanctions determined by law.</li> </ul>	Official websites on national legislation	0 = There is no organisation or mechanism in charge of enforcing compliance with the access-to-information regulation, or there is no access to information regulation; 1 = There are organisations or mechanisms but none of the three conditions are covered; 2 = There are organisations or mechanisms with only one of the three conditions covered; 3 = There are organisations or mechanisms with two of the three conditions covered; 5 = There are organisations or mechanisms with the three conditions covered.	0.25	National or sub-national
1.1.2	Sub-variable	Transparency standards in the public infrastructure sector	Evaluates the existence of laws and regulations that guarantee access to information in accordance with a transparency data standard for public infrastructure.			0.40	
1.1.2.1	Indicator	Proactive publication of information on public procurement processes	There is a regulatory framework that guarantees proactive disclosure of public procurement information: <ul style="list-style-type: none"> <li>· in all public sector institutions</li> <li>· in purchases of all goods and services, (included public infrastructure)</li> <li>· in all procurement stages (namely: tendering, awarding, contracting and implementation).</li> </ul>	Official websites on national legislation	0 = It is not required by the regulation, or there is no regulation of access to information; 1 = It is required but none of the three conditions are covered; 2 = It is required but only one condition is covered; 3 = It is required but only two conditions are covered; 5 = It is required and the three conditions are covered.	0.20	National or sub-national
1.1.2.2	Indicator	Proactive publication of information on public infrastructure projects	There is a regulatory framework that specifically guarantees proactive disclosure of all public infrastructure projects in all public sector institutions, considering the complete project's cycle (identification, preparation, implementation, completion).	Official websites on national legislation	0 = It is not required by the regulation, or there is no regulation of access to information; 1 = It is required but none of the three conditions are specified (all projects, all stages, and all institutions) 2 = It is required but only one of the three conditions is covered; 3 = It is required but only two conditions are covered; 5 = It is required and the three conditions are covered by the regulation.	0.20	National or sub-national

1.1.2.3	Indicator	Infrastructure data disclosure standard	There is a regulatory framework that defines a data disclosure standard in public infrastructure (such as a formal disclosure requirement (FDR)): <ul style="list-style-type: none"> <li>- based on CoST IDS or OC4IDS</li> <li>- that must be complied with by all procuring entities</li> <li>- in all public infrastructure projects.</li> </ul>	Official websites on national legislation	0 = The FDR or infrastructure disclosure standard does not exist in the regulation; 1 = Exists but none of the three conditions are covered; 2 = Exists but only one condition is covered; 3 = Exists but only two conditions are covered; 5 = Exists and the three conditions are covered.	0.20	National or sub-national
1.1.2.4	Indicator	Infrastructure data disclosure standard requests open data	The national regulatory framework with the infrastructure data disclosure standard requests proactive disclosure of all infrastructure projects as open data.	Official websites on national legislation	0 = Formal disclosure of open data is not required, or there is no regulation providing the standard for the data publication; 3 = Formal disclosure of open data is specifically required but with partial coverage, because does not apply to all public sector, or does not apply to the full data standard (that is the CoST IDS or OC4IDS), or does not apply to all infrastructure projects, or the definition of open data is incomplete; 5 = It requires the publication of all the data standard (that is the CoST IDS or OC4IDS) as open data in all public sector entities and all infrastructure projects.	0.20	National or sub-national
1.1.2.5	Indicator	Organisation responsible for the infrastructure data disclosure standard	Within regulatory framework there is an organisation responsible for overseeing the compliance of the publication of information according to the infrastructure data disclosure standard.	Official websites on national legislation	0 = There is no organisation responsible for overseeing compliance with the regulation, or there is no relation between and existing organization with the standard for data publication; 3 = There is an organisation related to the data disclosure standard but it does not have the power to oversee compliance; 5 = There is an organisation and it oversees compliance with the standard.	0.20	National or sub-national
1.1.3	Sub-variable	National digital information tools	Evaluates the availability of national digital tools that facilitate transparency in public infrastructure.			0.30	
1.1.3.1	Indicator	Centralised digital information platforms	There are centralised national or sub-national digital platforms (one or more) with complete information on public infrastructure projects, covering: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all public sector procuring entities</li> <li>- all projects' lifecycle (identification, preparation, implementation and completion)</li> <li>- without missing data fields in those included in the platform.</li> </ul>	National websites	0 = There are none; 2 = There are, but with limitations on the three items; 3 = There are but with limitations on two items; 4 = There are but with limitations on one item; 5 = There are and the access to information they offer is complete.	0.30	National or sub-national
1.1.3.2	Indicator	Easy access to information in digital information platforms	The information that offer the centralised digital information platforms is: <ul style="list-style-type: none"> <li>- easily accessible for the average citizen</li> <li>- available in an orderly and structured manner</li> <li>- available to download in machine-readable format</li> <li>- updated.</li> </ul>	National websites	0 = There are no centralised digital information platforms; 1 = There are but with limitations on the four items; 2 = There are but with limitations on three items; 3 = There are but with limitations on two items; 4 = There are but with limitations on one item; 5 = There are and do not have limitations on the four items.	0.40	National or sub-national

1.1.3.3	Indicator	Infrastructure projects geographic information system (GIS)	There is a web platform tailored to the needs of citizens that allows access to a GIS database of infrastructure projects with: <ul style="list-style-type: none"> <li>· all public sector procuring entities</li> <li>· all infrastructure projects</li> <li>· key information on works under execution or recently executed</li> <li>· easily accessible for the average citizen</li> <li>· updated.</li> </ul>	National websites	0 = There is no platform for geographical visualisation; 1 = There is but with limitations on the five items; 2 = There is but with limitations on four items; 3 = There is but with limitations on three or two items; 4 = There is but with limitations on one item; 5 = There is and do not have limitations on the five items.	0.30	National or sub-national
2	Dimension	Capacities and processes	Evaluates the soundness of procuring entities' procedures and capacities to disclose data and information.		The indicators of this dimension are evaluated "n <sub>e</sub> " times at the procuring entity level.	0.25 when calculating the national or sub-national ITI score  0.35 when calculating the procuring entity ITI score	
2.1	Variable	Institutional capacities				0.40	
2.1.1	Sub-variable	Basic knowledge	Assesses the knowledge of public officers on subjects of access to information and transparency in public infrastructure.			0.5	
2.1.1.1	Indicator	Knowledge about the access-to-information regulatory framework	The officer who completes the survey knows the national access-to-information regulation on public information and the main provisions on: <ul style="list-style-type: none"> <li>· proactive publication</li> <li>· request of access</li> <li>· response periods</li> <li>· roles and responsibilities</li> <li>· sanctions over non-compliance</li> <li>· organisation that guarantees compliance.</li> </ul>	Survey of public officials	0 = The officer does not know the regulation; 1 = Only knows it exists without being able to quote its content; 2 = Can quote key elements on one or two provisions; 3 = Can quote key elements on three provisions; 4 = Can quote key elements on four or five provisions; 5 = Describes key elements on the six provisions.	0.2	Institutional
2.1.1.2	Indicator	Knowledge about transparency initiatives in the infrastructure sector	The officer who completes the survey knows the existence of the transparency initiative in the infrastructure sector, including its features on: <ul style="list-style-type: none"> <li>· What is CoST</li> <li>· the multisectoral group</li> <li>· the data disclosure</li> <li>· the assurance</li> <li>· the social accountability.</li> </ul>	Survey of public officials	0 = The officer does not know about CoST initiative; 1 = Only knows it exists, without being able to quote on its scope; 2 = Can quote key elements on one feature; 3 = Can quote key elements on two or three features; 4 = Can quote key elements on four features; 5 = Describes key elements on the five features.	0.2	Institutional
2.1.1.3	Indicator	Knowledge about the transparency data standard in the infrastructure sector	The officer who completes the survey knows the national or sub-national transparency data standard for the infrastructure sector and its requirements.	Survey of public officials	0 = The officer does not know it or it does not exist; 1 = Only knows it exists without being able to quote its scope; 3 = Can quote the framework that contains it and its scope; 4 = Besides the previous, can quote some of its data points by stage; 5 = Besides the previous, indicates the level of adoption of his/her institution; or knows there is no data standard (if it were so).	0.2	Institutional

2.1.1.4	Indicator	Knowledge about sanctions due to non-compliance on the access-to-public-information regulatory framework	The officer who completes the survey knows the sanctions applied for non-compliance with the standards of access to public information and/or State contracts, including their: <ul style="list-style-type: none"> <li>· processes</li> <li>· roles and responsibilities</li> <li>· penalties.</li> </ul>	Survey of public officials	0 = The officer does not know about sanctions; 2 = Knows there are sanctions but cannot quote key elements; 3 = Knows key elements of one feature; 4 = Knows key elements of two features; 5 = Knows key elements of the three features; or knows that the regulations do not include sanctions (if it were so).	0.2	Institutional
2.1.1.5	Indicator	Knowledge about different data categories	The officer who completes the survey knows what constitutes and the differences between: <ul style="list-style-type: none"> <li>· public data</li> <li>· personal data</li> <li>· sensitive data</li> <li>· confidential data</li> <li>· state secret data.</li> </ul>	Survey of public officials	0 = The officer does not know what the quoted type of data is; 1 = Knows the categories but cannot mention key elements; 2 = Knows key elements on one category; 3 = Knows key elements on two or three categories; 4 = Knows key elements on four categories; 5 = Knows key elements on the five categories.	0.2	Institutional
2.1.2	Sub-variable	Digital capacities	Assesses institutional capacities on the use of digital technologies to facilitate efficiency and transparency.			0.5	
2.1.2.1	Indicator	Computer equipment	The entity has functional computer equipment for all personnel performing any type of administrative work.	Survey of public officials	0 = There is no access to functional computer equipment for any officer at the entity; 2 = A portion lower than half of officers performing administrative work have functional computer equipment; 3 = About half of officers performing administrative work have computer equipment; 4 = A portion above half of officers performing administrative work have computer equipment; 5 = All officers performing administrative work have functional computer equipment.	0.2	Institutional
2.1.2.2	Indicator	Connectivity to the internet	The entity has an internet connection that offers an adequate bandwidth: <ul style="list-style-type: none"> <li>· for the systems operations</li> <li>· the personnel labor</li> <li>· with minimum or none downtimes.</li> </ul>	Survey of public officials	0 = There is no access to the internet; 2 = There is access but there are limitations on the three items; 3 = There is access but there are limitations on two items; 4 = There is access but there are limitations on one item; 5 = The bandwidth is the optimal for the entity's activity.	0.2	Institutional
2.1.2.3	Indicator	Institutional website	The institution has its own website and is capable of managing its content and services in real time.	Survey of public officials	0 = The institution does not have a website; 2 = Does have a website but depends on a third party for content management; 4 = Does have a website and manages its content internally but with limitations; 5 = Has total control internally and can update information in real time.	0.2	Institutional
2.1.2.4	Indicator	Information systems for infrastructure projects	The institution has a functional digital system to record all information related to public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = The institution records are on paper; 2 = Some records are digital; 3 = Records are mainly digital on spreadsheets, like Excel or others; 5 = All the records are in information systems.	0.1	Institutional
2.1.2.5	Indicator	Use of information systems	Officers use available information systems for activities related to public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = Information systems are not used, or there are no systems; 3 = The systems are only partially used; 5 = They are fully used.	0.1	Institutional
2.1.2.6	Indicator	Infrastructure open data publication	The entity publishes data of all its infrastructure projects complying with the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>· structured</li> <li>· updated</li> <li>· processable by computer</li> <li>· free of payment</li> <li>· with a license allowing their free use</li> </ul>	Survey of public officials	0 = The entity does not publish infrastructure data; 1 = The entity publishes data but only complies with one condition; 2 = Publishes data and comply with two or three conditions; 3 = Publishes data and complies with four or five conditions; 4 = Publishes data and complies with six conditions; 5 = Publishes infrastructure data	0.1	Institutional

			<ul style="list-style-type: none"> <li>using the IDS or OC4IDS standards</li> <li>on all the entity's projects.</li> </ul>		complying with all seven conditions.		
2.1.2.7	Indicator	Visualisations based on infrastructure projects data	The entity uses visualisations that facilitate the presentation and interpretation of information referring to public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = The entity does not publish visualisations on this subject; 3 = Publishes but not regularly; 5 = Publishes visualisations regularly on its different projects (it can be on the web or other media such as print).	0.1	Institutional
2.2	Variable	Institutional processes				0.60	
2.2.1	Sub-variable	Procedures to disclose information	Evaluates institutional procedures to guarantee transparency of data and information related to public infrastructure.			0.35	
2.2.1.1	Indicator	Procedure for the publication of information	There is a documented and formalized institutional procedure for the proactive disclosure of information of public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no procedure, or the officer does not know if any exists; 2 = There is a procedure, but it does not cover the projects' cycle (e.g. only covers procurement) and is not formalized 3 = There is a procedure but either covers the project's life cycle or it is formalized; 5 = The procedure covers the project's life cycle and is formalized.	0.2	Institutional
2.2.1.2	Indicator	Responsibilities for disclosure	The procedure for proactive disclosure refers to named officers (or roles) who are responsible for the various stages of the proactive disclosure of infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no procedure, or the procedure does not name anybody; 3 = The procedure names only some people/roles; 5 = The procedure names all people/roles per stage so there is always someone accountable.	0.2	Institutional
2.2.1.3	Indicator	Information officer profile	There is a documented and formalized professional profile in the institution for an "information officer", "information unit", or similar, that describes the professional requirements and main tasks for this person or unit.	Survey of public officials	0 = There is no documented profile or the officer does not know if there is any; 3 = There is a profile, but is not formalized or in practice includes unrelated responsibilities (other activities besides the ones related to public information access); 5 = There is a formal profile and all performed responsibilities in practice are related to it.	0.2	Institutional
2.2.1.4	Indicator	Information officer	There is a person nominated for the position of information officer and the person fully complies with the job profile.	Survey of public officials	0 = There is no person assigned, or there is no profile; 3 = There is an assigned person but does not comply with the profile requirements; 5 = The assigned person complies with all requirements.	0.2	Institutional
2.2.1.5	Indicator	Procedure for information requests	There is a documented and formalized institutional procedure to attend and track information requests on infrastructure projects that come from citizens or any other actor.	Survey of public officials	0 = There is no procedure or tracking mechanism on information requests, or the officer does not know if one exists; 3 = There is a tracking mechanism but presents weaknesses that might result in a lack of response; 5 = There is an internal tracking mechanism on which no information request can be lost or unanswered.	0.2	Institutional
2.2.2	Sub-variable	Enablers and barriers to disclose information	Evaluates conditions at the entity facilitating or limiting the public information publication.			0.35	

2.2.2.1	Indicator	Internal policy to publish infrastructure information	There is in the entity an internal policy or an internal officialization of a national or sub-national regulation, issued from the institutional authorities, for the publication of information containing, among other data, those referring to infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no internal policy or officialization of a regulation or standard, or the officer does not know if any exists; 2 = There is one, but the entity does not fully comply with it; 3 = There is one and the entity fully complies in practice with it; 5 = There is one, it is based on the IDS or OC4IDS, and the entity fully complies in practice with it.	0.2	Institutional
2.2.2.2	Indicator	Disclosure training programme	There is an internal disclosure training programme or dissemination process that makes personnel aware at all levels on matters of access to public information that includes infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no training programme, or the officer does not know if there is one; 3 = There is a programme but is only applied to some personnel; 5 = There is a programme and is applied to all institutional personnel.	0.2	Institutional
2.2.2.3	Indicator	Identification of limitations for publishing information	The internal limitations to publishing infrastructure projects information have been clearly identified.	Survey of public officials	0 = The officer does not recognise the existence of limitations; 3 = The officer knows the limitations but does not describe them adequately; 5 = The officer knows the limitations, describes them and they are documented, or the officer may prove there are no limitations.	0.15	Institutional
2.2.2.4	Indicator	Plan to mitigate limitations for publishing information	There is a document that contains the plan to reduce or eliminate the present limitations to publishing information that includes infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no documented plan to reduce or eliminate the limitations; 2 = There is a plan but it is not comprehensive and there is no evidence of its implementation; 3 = There is a non-comprehensive plan but there is evidence of its implementation; 4 = There is a comprehensive plan but there is no evidence of its implementation; 5 = There is a comprehensive plan and there is evidence of its implementation.	0.15	Institutional
2.2.2.5	Indicator	Bureaucratic barriers to publish information	The process of proactive and reactive publication of public information, in practice, is not hindered by internal bureaucracy, as for example when it is necessary to obtain approval from multiple parties.	Survey of public officials	0 = The process is highly bureaucratic, or the officer cannot describe whether this type of problem is present; 3 = It is considered that these obstacles are few; 5 = It is considered there are no bureaucratic obstacles to publish public information.	0.15	Institutional
2.2.2.6	Indicator	Documentation and reaction to non-compliance and sanctions	There is documentation at the entity acknowledging, reacting and following-up on non-compliance and sanctions imposed by controlling entities due to non-compliance with the access-to-information and/or state contracts regulatory framework.	Survey of public officials	0 = There is no documentation, or the officer does not know if there is some; 2 = There is documentation but no reaction and follow-up (of the non-compliances and/or sanctions), or the follow-up cannot be described; 3 = There is documentation, reaction and follow-up (of the non-compliances and/or sanctions); 5 = The officer can show from the specific documentation that they have not received sanctions from controlling entities at the present year.	0.15	Institutional
2.2.3	Sub-variable	Control over infrastructure projects disclosure	Assesses the awareness of how much information related to all the entities' infrastructure projects is been disclosed.			0.3	
2.2.3.1	Indicator	Level of disclosed infrastructure projects	Proportion of projects on which information is disclosed, complying with the national or sub-national infrastructure data standard, compared with the total number of projects managed by the procuring entity, expressed as a percentage.	Survey of public officials and/or national or sub-national websites	0 = 0-10%, or if the officer could not give any numbers; 1 = 11-29%; 2 = 30-49%; 3 = 50-65%; 4 = 66-85%; 5 = 86-100% (approximate calculations according to the available information).	0.5	Institutional

2.2.3.2	Indicator	Level of investment represented by disclosed infrastructure projects	Amount of investment represented by projects on which information is proactively disclosed by the procuring entity, complying with the national or sub-national infrastructure data standard, as a proportion of the total amount of investment on infrastructure projects, expressed as a percentage.	Survey of public officials and/or national or sub-national websites	0 = 0-10%, or if the officer could not give any numbers; 1 = 11-29%; 2 = 30-49%; 3 = 50-65%; 4 = 66-85%; 5 = 86-100% (approximate calculations according to the available information).	0.5	Institutional
3	Dimension	Citizen participation	Evaluates the opportunities provided by procuring entities for citizen participation and how citizens use the disclosed public information.		The indicators of this dimension are evaluated "n <sub>e</sub> " times at the procuring entity level.	0.20 when calculating the national or sub-national ITI score  0.25 when calculating the procuring entity ITI score	
3.1	Variable	Participation practices				1.00	
3.1.1	Sub-variable	Participation opportunities	Assesses the formalisation of citizens participation opportunities and online mechanisms to facilitate this participation.			0.45	
3.1.1.1	Indicator	Citizen participation regulatory framework	There are formal citizen participation opportunities based on existing regulatory framework that allow the procuring entity to listen and implement requests from the citizenship, that may be used for public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There are no laws, regulations, or policies that can be used as foundation for citizens participation; 2 = There is only a national or sub-national regulatory framework for participation, with no internal (institutional) framework; 3 = There are both, external and internal frameworks for participation; 5 = There are both external and internal frameworks and there are also efficient documented procedures for citizens' participation.	0.2	Institutional
3.1.1.2	Indicator	Permanent and inclusive citizen participation	The citizens participation opportunities (instruments of citizens engagement) are permanently available or are available with a constant periodicity through a variety of inclusive channels (such as digital and non-digital), that may be used for public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There are no formal participation opportunities; 2 = There are participation opportunities, but are not permanent and are not available through a variety of inclusive channels; 3 = Participation opportunities are either permanent or available through a variety of inclusive channels; 5 = Participation spaces are both, permanent and available throughout different participation inclusive channels.	0.1	Institutional
3.1.1.3	Indicator	Citizen participation in infrastructure projects	The entity conducts formal citizen consultation processes to identify, define, prioritize and monitor public infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = The entity does not conduct these consultation processes on infrastructure projects, or the officer is not sure if they do them; 2 = The entity has consultation in infrastructure projects, but is not for all project stages and is not for all projects; 3 = The entity has consultation in infrastructure projects in all project stages, but is not applied to all infrastructure projects, or the opposite; 5 = The consultation applies to all	0.25	Institutional

					infrastructure project stages and to all infrastructure projects.		
3.1.1.4	Indicator	Citizen attention office	There is in the entity an office for citizen service (called the Transparency Office, Complaints Office, Information Office, etc.) that can see, online and offline, subjects related to infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no office, or the officer is not sure if there is one; 3 = There is one but it has limitations to serve the citizens (e.g. only works offline); 5 = There is one and it serves citizens efficiently.	0.15	Institutional
3.1.1.5	Indicator	Online engagement form	There is an online form by which any person may request information, perform a consultation, or present a complaint or a recommendation referring to an infrastructure project and receive an effective response.	Survey of public officials	0 = The entity does not have an online form, or has one that does not work; 2 = It has one but has to be downloaded, printed, completed and scanned or physically taken to the entity; 3 = The entity does have an online form but without a follow-up mechanisms (such as request identity number); 5 = The online form has a specific follow-up mechanism for the applicant.	0.1	Institutional
3.1.1.6	Indicator	Promotion of participation opportunities	The institution makes an effort to ensure that citizens are aware of existing participation opportunities and of the availability of information related infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = The entity does not make any effort, or the officer does not know if it has; 3 = The entity makes an effort but not in a consistent, permanent and/or inclusive manner; 5 = Makes consistent, permanent and inclusive efforts for both things.	0.2	Institutional
3.1.2	Sub-variable	Use of information by citizens	Assesses the use of information related to infrastructure projects by citizens, stemming from case evidence.			0.55	
3.1.2.1	Indicator	Actions from citizen complaints	There is a mechanism that documents citizens' complaints related to public infrastructure projects, generates a log, manages responses in an orderly fashion, and reports what actions were taken.	Survey of public officials	0 = There is no centralisation of citizens' complaints, or there is no evidence of its existence; 2 = There is one, but it does not work optimally; 3 = There is one, it works optimally, but it does not generate of a report with actions that were taken for specific infrastructure projects; 5 = It exists, works optimally and reports the actions that we take on specific infrastructure projects.	0.1	Institutional
3.3.2.2	Indicator	Access to information performance	Access-to-information requests and responses are categorized and recorded, and generate metrics of the entity's performance.	Survey of public officials	0 = The officer cannot show how many requests were there, or there is no record of requests; 3 = The officer can show how many requests and how many responses were there, but with no specific categorisation and/or performance analysis; 5 = The officer can show how many of the total responses were positive (that is, containing the information requested by the citizens), how many were referred to other agencies (because they were the wrong agency) and how many requests were about the same information, with the responses performance metrics.	0.1	Institutional
3.3.2.3	Indicator	Institutional response capacity	The response to citizens' access-to-information requests is provided according to the period established by the regulatory framework.	Survey of public officials	0 = There is no capacity of response in the period established by the regulatory framework, or there is no control over the response time, or there is no information about requests; 2 = Only some cases receive response within the established period; 4 = Most cases are responded within the established period; 5 = 100% of cases are responded to within the period established by the regulatory framework.	0.15	Institutional

3.3.2.4	Indicator	Institutional use evidence	The institution provides the public with feedback, such as reports or announcements, on how citizens' inputs have been used in infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = There is no feedback made public, or it is not known if there is internal use of citizens participation; 2 = There is internal use of citizens participation that can be referenced, but is not well documented; 3 = There is internal use and is documented, but not made public; 5 = The internal documented use of citizens participation in infrastructure projects is made public.	0.15	Institutional
3.3.2.5	Indicator	Knowledge of citizens use	The information made public regarding infrastructure projects is used by the citizens, civil society organisations, academia, media, private sector, or any other actor.	Survey of public officials	0 = The officer does not know if there is any type of use; 3 = The officer knows and quotes an example in this present year; 5 = The officer knows and quotes more than one example in this present year.	0.15	Institutional
3.3.2.6	Indicator	Evidence of joint projects	The entity has developed joint projects with other actors out of the entity as a result of the disclosed information on infrastructure projects.	Survey of public officials	0 = The officer does not know if there has been a joint project; 3 = The officer knows and quotes an example in this present year; 5 = The officer knows and quotes more than an example in this present year.	0.15	Institutional
3.3.2.7	Indicator	Improvements as a response to citizen participation	Changes or reforms have been made to infrastructure projects in response to feedback, evaluation, or some other type of citizen participation.	Survey of public officials	0 = There are no cases, or the officer does not know if there are any; 3 = There is evidence in a project in this current year; 5 = There is evidence of improvement in more than one project during this present year.	0.2	Institutional
4	Dimension	Information disclosure	Evaluates the amount of data and information disclosed by procuring entities on infrastructure projects according to the CoST IDS or the OC4IDS.		The indicators of this dimension are evaluated " $n_p$ " times at the infrastructure project level of each of the " $n_e$ " evaluated procuring entities.	0.35 when calculating the national or sub-national ITI score  0.40 when calculating the procuring entity ITI score	
4.1	Variable	Disclosure practices				1.00	
4.1.1	Sub- variable	Project identification				0.1	
4.1.1.1	Indicator	Project reference number	There is a number or code assigned to the project that uniquely identifies it.	Project data on the web	0 = It is not available; 3 = It is available, but it changes, or it is not the same in all registries; 5 = It is always available and the same.	0.075	Institutional by project
4.1.1.2	Indicator	Project owner	The entity in charge of project development and execution contract is clearly identified.	Project data on the web	0 = It is not available; 5 = It is available.	0.1	Institutional by project
4.1.1.3	Indicator	Sector and sub-sector	The sector and sub-sector are identified according to the government structure, for which the project is being developed (e.g. transport, road transport).	Project data on the web	0 = They are not available; 3 = Only one is available; 5 = Both are available.	0.1	Institutional by project
4.1.1.4	Indicator	Project name	The project is clearly identified with the same name throughout the project cycle.	Project data on the web	0 = It is not identified; 3 = It is identified but it changes; 5 = It is identified with no changes through the project cycle.	0.075	Institutional by project
4.1.1.5	Indicator	Project location	The physical location of the project is clearly identified.	Project data on the web	0 = It is not available; 5 = It is available.	0.15	Institutional by project

4.1.1.6	Indicator	Project description	The project's description is available, indicating what it is about and the infrastructure outputs that are part of it.	Project data on the web	0 = It is not available; 3 = It is available, but it is insufficient; 5 = It is available, clear and comprehensive.	0.25	Institutional by project
4.1.1.7	Indicator	Purpose	There is a project purpose expressed in terms of public infrastructure and its intended social and economic impact.	Project data on the web	0 = It is not available; 3 = It is available, but it is insufficient; 5 = It is available, clear and comprehensive.	0.25	Institutional by project
4.1.2	Sub-variable	Project preparation				0.15	
4.1.2.1	Indicator	Environmental impact	A document that identifies, evaluates and describes the environmental impacts produced by the project on its surroundings is available; including reference to relevant additional studies (soil, topography, hydrogeology, etc.)	Project data on the web	0 = It is not available; 3 = Only a summary is available; 5 = The document is available, is clear and comprehensive.	0.3	Institutional by project
4.1.2.2	Indicator	Land and settlement impact	A document that identifies, assesses and describes the impacts on human settlements and population centres, produced by the project, is available.	Project data on the web	0 = It is not available; 3 = Only a summary is available; 5 = The document is available, is clear and comprehensive.	0.3	Institutional by project
4.1.2.3	Indicator	Contact details	Information identifies the contact details of the officer responsible for the project in the procuring entity.	Project data on the web	0 = It is impossible to know who is responsible; 2 = Only names are available; 3 = Only names and positions are available; 5 = All names, positions and contact information are available.	0.1	Institutional by project
4.1.2.4	Indicator	Project budget and date of approval	The total required budget for the development of the project and its date of approval are available.	Project data on the web	0 = They are not available; 3 = Only one of the two is available; 5 = Both are available.	0.2	Institutional by project
4.1.2.5	Indicator	Funding sources	The sources where the funds are coming from are identified (e.g. from the national budget, cooperation, multilateral organisations, or others).	Project data on the web	0 = It is not available; 5 = It is available	0.1	Institutional by project
4.1.3	Sub-variable	Construction contract procurement				0.3	
4.1.3.1	Indicator	Procuring entity and contact details	The entity in charge of contracting the construction of the infrastructure project and its contact details are clearly identified.	Contract data on the web	0 = They are not identified; 3 = Only one of the two data points is identified; 5 = Both are identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.2	Indicator	Procurement process	The type of procurement process that was applied to award the contract is clearly identified (e.g. international bidding, national bidding).	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.3	Indicator	Number of firms bidding	The number of companies participating in the bidding process for the infrastructure construction is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.4	Indicator	Contract type	The type of contract to be signed is clearly identified (e.g. design, construction, supervision).	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.5	Indicator	Contract title	The official name of the signed contract is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.6	Indicator	Contract price	The final amount of the construction contract is clearly stated.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project

4.1.3.7	Indicator	Contract start date	The date when the construction contract started is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.8	Indicator	Contract duration	The contract duration is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified, either because it is clearly provided or because it can be calculated with a starting and ending date.	0.1	Institutional by project
4.1.3.9	Indicator	Contractor(s)	The · name · identification number · contact information of the winning contractor is clearly identified.	Contract data on the web	0 = They are not identified; 2 = Only one of the three data points are identified; 3 = Two of the three data points are identified; 5 = The three data points are identified.	0.1	Institutional by project
4.1.3.10	Indicator	Contract scope of work	The description of the work, services and outputs (including type and quantity of units) that the firm has to provide under the signed contract are clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 3 = It is identified but is not comprehensive; 5 = It is identified, clear and comprehensive.	0.1	Institutional by project
4.1.4	Sub-variable	Supervision contract procurement				0.2	
4.1.4.1	Indicator	Procuring entity and contact details	The entity in charge of contracting the supervision of the infrastructure and its contact details are clearly identified.	Contract data on the web	0 = They are not identified; 3 = Only one of the two data points is identified; 5 = Both are identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.2	Indicator	Procurement process	The type of procurement process applied to award the contract is clearly identified (e.g. international bidding, national bidding).	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.3	Indicator	Number of firms/individuals bidding	The number of companies or individuals participating in the bidding process for the supervision is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.4	Indicator	Contract type	The type of contract signed is clearly identified (e.g. design, construction, supervision).	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.5	Indicator	Contract title	The official name of the signed contract is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.6	Indicator	Contract price	The final amount of the supervision contract is clearly stated.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.7	Indicator	Contract start date	The date when the supervision contract started is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.8	Indicator	Contract duration	The contract duration is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 5 = It is identified, either because it is clearly provided or because it can be calculated with a starting and ending date.	0.1	Institutional by project
4.1.4.9	Indicator	Contract firm/individual	The name, the professional (in case of companies) and contact information of the awarded company or individual to implement the supervision contract is clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 3 = Only the name is identified, without all the details; 5 = The name, contact information and professional in charge are identified.	0.1	Institutional by project
4.1.4.10	Indicator	Contract scope of work	The description of the work, services and outputs that the firm or individual has to provide under the signed contract are clearly identified.	Contract data on the web	0 = It is not identified; 3 = It is identified but has deficiencies; 5 = It is identified, clear and comprehensive.	0.1	Institutional by project

4.1.5	Sub-variable	Construction contract implementation				0.15	
4.1.5.1	Indicator	Variation to construction contract price	It is clearly indicated whether variations to the contract price have been made.	Contract data on the web	0 = There is no price information, or price variations are not pointed out when there is evidence that they exist, or the price at the end of the contract is not available (to compare with the initial awarded price); 5 = The price variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no price variations were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.5.2	Indicator	Reasons for construction price changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract price are available.	Contract data on the web	0 = There is no price information, or the reasons for price changes are not available and price changes were observed, or the payed price at the end of the contract is not available (to compare with awarded price); 3 = There are reasons for price changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available and reasonable, or there were no changes to the contracted price.	0.25	Institutional by project
4.1.5.3	Indicator	Variation to construction contract duration	Contract duration modifications are clearly indicated, if made.	Contract data on the web	0 = There is no duration information, or variations to the contract duration are not pointed out when there is evidence that they exist, or the duration at the end of the contract is not available (to compare with the awarded duration); 5 = Variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no variations to the contract duration were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.5.4	Indicator	Reasons for construction duration changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract duration are available.	Contract data on the web	0 = There is no duration information, or the reasons for changes in the duration are not available and term changes were observed, or the duration at the end of the contract is not available (to compare with the awarded duration); 3 = There are reasons for term changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available and reasonable, or no changes to the contracted term were observed.	0.25	Institutional by project
4.1.5.5	Indicator	Variation to construction contract scope	Modifications to the project scope, if they exist, are clearly indicated.	Contract data on the web	0 = There is no scope information, or variations to the contract scope are not pointed out when there is evidence that they exist, or the scope/outputs at the end of the contract are not available (to compare with the awarded scope); 5 = Variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no variations to the contract scope were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.5.6	Indicator	Reasons for construction scope changes	Justifications with arguments why changes were made to project scope are available.	Contract data on the web	0 = There is no scope information, or the reasons for changes in the project scope are not available and changes were observed, or the scope/outputs at the end of the contract are not available (to compare with the awarded scope); 3 = There are reasons for scope changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available and reasonable, or no changes to the contracted scope were observed.	0.2	Institutional by project

4.1.6	Sub-variable	Supervision contract implementation				0.1	
4.1.6.1	Indicator	Variation to supervision contract price	It is clearly indicated whether variations to the contract price have been made.	Contract data on the web	0 = There is no price information, or price variations are not pointed out when there is evidence that they exist, or the price at the end of the contract is not available (to compare with the initial awarded price); 5 = The price variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no price variations were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.6.2	Indicator	Reasons for supervision price changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract price are available.	Contract data on the web	0 = There is no price information, or reasons for price changes are not available and price changes were observed, or payed price at the end of the contract is not available (to compare with the awarded price); 3 = There are reasons for price changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available, or no changes to the contracted price were observed.	0.25	Institutional by project
4.1.6.3	Indicator	Variation to supervision contract duration	Contract duration modifications are clearly pointed out, if made.	Contract data on the web	0 = There is no duration information, or variations to the contract duration are not pointed out when there is evidence that they exist, or the duration at the end of the contract is not available (to compare with the awarded duration); 5 = Variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no variations to the contract duration were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.6.4	Indicator	Reasons for supervision duration changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract duration are available.	Contract data on the web	0 = There is no duration information, or the reasons for changes in the duration are not available and duration changes were observed, or the duration at the end of the contract is not available (to compare with the awarded duration); 3 = There are reasons for term changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available, or no changes to the contracted term were observed.	0.25	Institutional by project
4.1.6.5	Indicator	Variation to supervision contract scope	Modifications to the project scope, if they exist, are clearly pointed out.	Contract data on the web	0 = There is no scope information, or variations to the contract scope are not pointed out when there is evidence that they exist, or the scope/outputs at the end of the contract are not available (to compare with the awarded scope); 5 = Variations are clearly pointed out if there is evidence that they exist, or no variations to the contract scope were observed.	0.1	Institutional by project
4.1.6.6	Indicator	Reasons for supervision scope changes	Justifications with arguments why changes were made to project scope are available.	Contract data on the web	0 = There is no scope information, or the reasons for changes in the project scope are not available and they were observed, or the scope/outputs at the end of the contract are not available (to compare with the awarded scope); 3 = There are reasons for scope changes, but they are partial; 5 = The reasons for all changes are available, or no changes to the contracted scope were observed.	0.2	Institutional by project

## Lampiran 2 | Survey Entitas Pengadaan

### Survei

#### Indeks Transparansi Infrastruktur

### Pernyataan kebenaran informasi

Penyelesaian kuesioner secara jujur dan akurat akan memberikan kontribusi penting untuk mengevaluasi Indeks Transparansi Infrastruktur CoST (ITI). ITI dirancang untuk memberikan penilaian tentang pengetahuan, prosedur, kemampuan digital, ruang partisipasi warga negara dan penggunaan informasi publik. Hasil evaluasi ITI berfungsi memberikan penjelasan tentang dimana dan bagaimana cara meningkatkan transparansi dalam infrastruktur publik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai sosial dan ekonomi dari sumber daya publik.

Pertanyaan survei ini harus dijawab dengan jujur, objektif, dan ringkas yang memuat informasi terkini, jelas, dan konsisten secara internal. Sementara beberapa pertanyaan membutuhkan data pendukung sebagai bukti (misalnya bagian dari dokumen, situs web, papan pengumuman dan surat kabar), semuanya memerlukan deskripsi singkat untuk menguraikan tanggapan dan memvalidasinya untuk analisis selanjutnya.

Cakupan informasi yang dirujuk dalam kuesioner ini terbatas pada apa yang wajib diumumkan kepada publik sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku.

Bisakah Anda mengonfirmasi bahwa informasi yang akan Anda bagikan dalam survei ini secara akurat mencirikan instansi dan pengetahuan Anda?

Harap lengkapi informasi berikut:

Nama Instansi/Dinas \_\_\_\_\_

Nama Responden \_\_\_\_\_

Jabatan Responden \_\_\_\_\_

Telepon/Whatsapp Responden \_\_\_\_\_

Email Responden \_\_\_\_\_

Tanda tangan Responden \_\_\_\_\_

Nama penilai (Diisi oleh CoST) \_\_\_\_\_

Tempat dan tanggal pengisian Survey \_\_\_\_\_

# Variabel 2.1: Kapasitas Kelembagaan

## Subvariabel 2.1.1: Pengetahuan dasar

5 pertanyaan dari sub-variabel ini harus dijawab dengan pengetahuan yang Anda miliki dan dengan kata-kata Anda sendiri. Tolong jangan mencari atau menyalin teks dari sumber lain agar yakin serta jujur dalam memahami kondisi saat ini (Berikan tanda rumput pada jawaban yang anda pilih).

1. Apakah Anda mengetahui kerangka regulasi nasional untuk akses informasi publik?

- Ya
- TIDAK

1.1. Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat poin-poin berikut: i) publikasi data proaktif, ii) permintaan informasi publik, iii) waktu tanggapan, iv) peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama, v) sanksi atas ketidakpatuhan, dan vi) organisasi yang memastikan kepatuhan?

---

---

---

---

2. Apakah Anda mengetahui adanya inisiatif/organisasi transparansi di sektor infrastruktur (CoST)?

- Ya
- TIDAK

2.1. Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat poin-poin berikut: i) apa itu CoST, ii) kelompok multi-stakeholder, iii) Keterbukaan Data, iv) Assurance/Penjaminan, dan v) akuntabilitas/audit Sosial?

---

---

---

---

3. Apakah Anda mengetahui Standar Data Infrastruktur CoST, juga dikenal sebagai IDS atau OC4IDS (sesuai dengan nama bahasa Inggrisnya)?

- Ya
- TIDAK

3.1. Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat: i) apa itu IDS/OC4IDS, ii) aturan pemerintah apa yang sesuai dengan standar tersebut, ii) jenis data apa yang diperlukan dalam standar IDS/OC4IDS, iv) seberapa jauh instansi/dinas anda menggunakan standar tersebut?

---

---

---

---

---

4. Apakah Anda mengetahui sanksi yang diterapkan pada ketidakpatuhan terhadap undang undang akses informasi publik dan aturan pemerintah terkait kontrak pekerjaan infrastruktur?

- Ya  
 TIDAK

4.1 Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat: i) proses penerapannya sanksi, ii) peran dan tanggung jawab pelaku yang terlibat, iii) sanksi yang diterapkan?

---

---

---

5. Apakah Anda mengetahui perbedaan antara: data publik, data pribadi, data sensitif, data rahasia, dan data rahasia negara?

- Ya  
 TIDAK

5.1. Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat masing-masingnya?

---

---

---

### **Sub-variabel 2.1.2: Kapasitas digital**

7 pertanyaan dari sub-variabel ini tidak bersifat teknis, tetapi mungkin memerlukan dukungan (jika dianggap perlu) dari unit lain, misalnya dinas komunikasi dan informasi, untuk memberikan gambaran atau bukti.

1. Apakah di instansi/dinas anda, ada peralatan komputer untuk semua personel yang melakukan beberapa jenis pekerjaan administratif?

- Tidak ada akses ke peralatan komputer untuk setiap pejabat di dinas  
 Kurang dari sebagian petugas yang melakukan pekerjaan administrasi memiliki perlengkapan komputer  
 Hampir sebagian dari petugas yang melakukan pekerjaan administrasi memiliki peralatan komputer  
 Lebih dari sebagian petugas yang melakukan pekerjaan administrasi memiliki perlengkapan komputer  
 Semua petugas yang melakukan pekerjaan administrasi memiliki peralatan komputer fungsional

Keterangan/bukti:

---

---

---

**2. Apakah instansi memiliki koneksi Internet dengan bandwidth optimal untuk: i) pengoperasian sistem informasi; ii) tugas-tugas yang dilakukan oleh semua staf, iii) dan memiliki gangguan minimal atau nol?**

- Tidak ada akses internet
- Ada akses internet tetapi memiliki keterbatasan di tiga item
- Ada akses tetapi memiliki keterbatasan di dua item
- Ada akses tetapi memiliki keterbatasan di satu item
- Bandwidth optimal, tanpa batasan dan tanpa gangguan

Keterangan/bukti:

---

---

**3. Apakah instansi memiliki website sendiri dan apakah ada petugas khusus yang mengelola kontennya dan dapat melakukan perubahan/update konten secara real time?**

- instansi tidak memiliki website
- Ada satu, tetapi instansi bergantung pada pihak ketiga untuk mengelola perubahan/update website
- Ada satu dan instansi dapat melakukan perubahan/update secara internal, tetapi ada batasannya
- Ada satu dan instansi memiliki kontrol penuh secara real time terhadap keseluruhan isi website

Keterangan/bukti:

---

---

**4. Apakah ada sistem atau platform informasi digital untuk menyimpan semua informasi tentang proyek infrastruktur publik?**

- Catatan/data proyek infrastruktur disimpan di atas kertas
- Beberapa catatan/data disimpan secara digital
- Catatan sebagian besar ada di spreadsheet, seperti Excel atau lainnya
- Semua catatan ada di dalam sistem informasi

Keterangan/bukti:

---

---

**5. Apakah pejabat pemerintah di instansi/dinas menggunakan sistem informasi digital yang tersedia untuk aktivitas terkait proyek infrastruktur publik?**

- Sistem tidak digunakan, atau tidak ada sistem sama sekali untuk proyek infrastruktur
- Sistem digunakan hanya sebagian
- Sistem digunakan sepenuhnya

**6. Apakah instansi/dinas anda mempublikasikan informasi proyek infrastruktur sebagai data publik?**

- Ya
- TIDAK

6.1. Jika Anda menjawab “ya”, apakah informasi dari semua proyek infrastruktur tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: i) terstruktur, ii) diperbarui secara berkala, iii) dapat diproses oleh komputer, iv) bebas dan tidak berbayar, v) menggunakan lisensi namun bebas dan tidak berbayar, vi) menggunakan standar IDS atau OC4IDS, dan vii) berlaku untuk semua proyek di dinas/instansi anda?

- Instansi/dinas tidak mempublikasikan data infrastruktur
- Instansi/dinas menerbitkan data tetapi hanya memenuhi satu syarat
- Menerbitkan data dan memenuhi dua atau tiga persyaratan
- Menerbitkan data dan memenuhi empat atau lima persyaratan
- Menerbitkan data dan memenuhi enam persyaratan
- Menerbitkan data untuk semua proyeknya dan memenuhi tujuh persyaratan

Keterangan/bukti:

---

---

**7. Apakah instansi/dinas anda menerbitkan visualisasi/grafik di website atau tempat lain (misalnya media cetak) yang secara grafis dapat mencakup penyajian dan dimengerti oleh masyarakat, berkaitan dengan informasi proyek infrastruktur?**

- Instansi tidak mempublikasikan visualisasi/grafik tentang pekerjaan infrastruktur
- Menerbitkan tetapi tidak teratur
- Menerbitkan visualisasi secara teratur pada proyeknya yang berbeda (bisa di web atau di media lain, seperti cetak)

Keterangan/bukti:

---

---

## Variabel 2.2: Proses kelembagaan

### Subvariabel 2.2.1: Tata cara pembukaan informasi

5 pertanyaan dari sub-variabel ini harus dijawab sesuai dengan dokumentasi resmi yang berlaku di instansi/dinas anda, mencakup jenis informasi yang aktif dan reaktif, serta tentang bagaimana prosedur keterbukaan data berjalan dalam penerapannya.

#### 1. Apakah ada prosedur terdokumentasi internal untuk mempublikasikan informasi secara proaktif tentang proyek infrastruktur?

- Tidak ada prosedur, atau Anda tidak tahu ada atau tidaknya
- Ada prosedur, tetapi tidak formal dan tidak mencakup siklus proyek (mis. hanya mencakup kontrak/tender saja dan bukan tahap sebelumnya atau selanjutnya)
- Ada prosedur, tetapi hanya memenuhi salah satu dari dua syarat ini: prosedur publikasi data formal/resmi, atau mencakup seluruh siklus proyek (tidak keduanya)
- Prosedur formal/resmi dan mencakup keseluruhan siklus proyek

Keterangan/bukti:

---

---

#### 2. Apakah prosedur instansi/dinas dalam publikasi informasi proaktif mencantumkan nama (atau jabatan) pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahapan prosedur ini?

- Tidak ada prosedur, atau prosedur tidak mencantumkan nama siapa pun
- Prosedur hanya menyebutkan beberapa orang/jabatan pada siklus proyek tertentu saja,
- Prosedur menyebutkan semua orang/jabatan penanggung jawab untuk setiap tahapan.

Keterangan/bukti:

---

---

#### 3. Apakah ada profil staff terdokumentasi dalam instansi/dinas sebagai “petugas informasi”, “unit informasi”, atau jabatan serupa, yang menjelaskan persyaratan staff dan tugas utama staff/unit ini?

- Tidak ada profil yang terdokumentasi atau Anda tidak tahu apakah ada atau tidak
- Ada profil, tetapi tidak formal, atau dalam praktiknya staff/unit memiliki tanggung jawab lain (kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan akses informasi publik)



Ada profil staff terdokumentasi secara formal dan semua tanggung jawab yang dilakukan dalam praktiknya terkait dengan akses informasi publik

Keterangan/bukti:

---

---

**4. Apakah ada orang yang ditugaskan untuk posisi petugas informasi dan orang tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratan profil?**

- Tidak ada orang yang ditugaskan untuk posisi tersebut, atau profil dan posisi tersebut tidak ada
- Ada orang yang ditugaskan tetapi tidak memenuhi persyaratan profil
- Orang yang ditugaskan memenuhi semua persyaratan

Keterangan/bukti:

---

---

**5. Apakah ada prosedur internal yang formal untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi tentang proyek infrastruktur yang datang dari masyarakat atau pihak lain?**

- Tidak ada mekanisme tindak lanjut atas permintaan informasi, atau Anda tidak tahu jika ada
- Ada mekanisme tetapi ada kelemahan yang bisa mengakibatkan kurangnya respon
- Terdapat mekanisme dimana permintaan informasi tidak boleh putus atau tidak terjawab

Keterangan/bukti:

---

---

### **Sub-variabel 2.2.2: Pendukung dan hambatan keterbukaan informasi**

6 pertanyaan dari sub-variabel ini dijawab sesuai dengan dokumentasi instansi/dinas dan sesuai dengan bagaimana berbagai aspek yang dikonsultasikan bekerja dalam penerapannya.

**1. Apakah instansi memiliki kebijakan internal atau formalisasi internal terkait peraturan nasional atau daerah, yang dikeluarkan oleh otoritas instansi/dinas, untuk mempublikasikan informasi yang berisi, salah satunya, data yang terkait dengan proyek infrastruktur?**

- Tidak ada kebijakan internal atau formalisasi peraturan nasional, atau, Anda tidak tahu apakah ada peraturan serupa
- Ada satu, tetapi instansi tidak sepenuhnya melaksanakannya dalam penerapannya

---

---

- Ada satu dan instansi sepenuhnya melaksanakannya dalam penerapannya
- Ada satu, instansi sepenuhnya melaksanakannya dalam penerapannya, serta didasarkan pada standar data infrastruktur IDS atau OC4IDS

Keterangan/bukti:

---

---

**2. Apakah ada program pelatihan internal atau sejenisnya untuk meningkatkan kesadaran pegawai di semua tingkatan dalam hal akses informasi publik, termasuk proyek infrastruktur?**

- Tidak ada program pelatihan atau Anda tidak tahu apakah ada
- Ada satu tapi itu hanya diikuti pada beberapa staff
- Ada satu dan diikuti oleh semua staff instansi/dinas

Keterangan/bukti:

---

---

**3. Apakah ada batasan internal untuk mempublikasikan informasi terkait proyek infrastruktur publik?**

- Ya
- TIDAK

Jika Anda menjawab ya, dapatkah Anda menjelaskannya dan/atau memberikan bukti dokumentasinya?

Jika Anda menjawab tidak, dapatkah Anda menjelaskan alasannya dan/atau memberikan bukti?

---

---

---

**4. Apakah ada dokumen yang berisi rencana untuk mengurangi atau menghilangkan batasan saat ini terkait publikasi informasi proyek infrastruktur?**

- Tidak ada dokumen rencana mitigasi
- Ada rencana tetapi tidak menyeluruh dan tidak ada bukti pelaksanaannya
- Ada rencana yang tidak menyeluruh tetapi ada bukti pelaksanaannya
- Ada rencana yang menyeluruh tetapi tidak ada bukti pelaksanaannya
- Ada rencana yang menyeluruh dan ada bukti pelaksanaannya

Keterangan/bukti:

---

---

**5. Apakah proses publikasi proaktif dan reaktif menjadi lamban atau terhambat karena birokrasi internal, misalnya diharuskan mendapatkan persetujuan dari atasan yang berbeda?**

- Prosesnya sangat birokratis atau Anda tidak tahu apakah ada masalah seperti ini
- Hambatan birokrasi sangat sedikit
- Tidak ada hambatan birokrasi untuk mempublikasikan informasi publik

Keterangan/bukti:

---

---

**6. Apakah ada suatu dokumentasi di instansi/dinas yang mengakui dan menindaklanjuti ketidakpatuhan dan sanksi yang ditentukan oleh instansi pengawas, karena ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait akses informasi publik dan/atau peraturan kontrak kerja?**

- Tidak ada dokumentasi, atau Anda tidak tahu apakah ada
- Ada dokumentasi ketidakpatuhan tetapi tidak ada dokumentasi respon atau tindak lanjut oleh instansi
- Ada dokumentasi ketidakpatuhan, bersama dengan dokumentasi respon dan tindak lanjut oleh instansi
- Anda dapat menunjukkan bahwa instansi anda tidak menerima sanksi dari instansi pengawas dalam setahun terakhir

Keterangan/bukti:

---

---

### **Sub-variabel 2.2.3: Pengendalian terhadap pembukaan data proyek infrastruktur**

4 pertanyaan dari subvariabel ini dijawab sesuai dengan banyaknya informasi proyek infrastruktur yang dipublikasikan secara proaktif. Jika Anda tidak tahu atau tidak dapat mengidentifikasi angka pastinya, Anda dapat menjawab dengan angka perkiraan.

**1. Berapa proyek infrastruktur publik/konstruksi yang dikelola instansi/dinas**

**pada tahun ini dan tahun sebelumnya? (Jika angka pastinya tidak diketahui, perkiraan tepat valid)**

Tahun ini: \_\_\_\_\_

Tahun sebelumnya: \_\_\_\_\_

- Anda tidak dapat memperkirakan angka

**1.1 Berapa banyak dari proyek tersebut yang mengungkapkan informasi sesuai dengan standar data infrastruktur (berdasarkan Cost IDS atau OC4IDS)?**

Tahun ini: \_\_\_\_\_

Tahun sebelumnya: \_\_\_\_\_

( ) Anda tidak dapat memperkirakan suatu angka atau Anda tidak mengetahui standar datanya  
Keterangan/bukti:

---

---

**2. Berapa nilai anggaran proyek infrastruktur yang dikelola instansi/dinas pada tahun ini dan tahun sebelumnya? (Jika angka pastinya tidak diketahui, perkiraan tepat valid)**

Tahun ini : \_\_\_\_\_

Tahun sebelumnya : \_\_\_\_\_

( ) Anda tidak dapat memperkirakan angka

2.1 Berapa jumlah anggaran dari proyek-proyek yang dipublikasikan sesuai standar data infrastruktur (berdasarkan Cost IDS atau OC4IDS)?

Tahun ini : \_\_\_\_\_

Tahun sebelumnya : \_\_\_\_\_

( ) Anda tidak dapat memperkirakan suatu angka atau Anda tidak mengetahui standar datanya

Keterangan/bukti:

---

---

## Variabel 3.1: Partisipasi warga

### Sub-variabel 3.1.1: Peluang partisipasi

Enam pertanyaan dari sub-variabel ini dijawab sesuai dengan dokumentasi instansi dan menurut bagaimana berbagai aspek yang dikonsultasikan bekerja dalam prakteknya.

**1. Apakah ada ruang formal untuk partisipasi warga negara berdasarkan kerangka peraturan yang memungkinkan instansi mendengarkan dan melaksanakan permintaan warga, yang dapat digunakan dalam proyek infrastruktur publik?**

( ) Tidak ada undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang dapat menjadi dasar partisipasi warga negara

( ) Hanya ada kerangka peraturan nasional atau subnasional untuk partisipasi, tanpa kerangka peraturan internal (dihasilkan oleh instansi)

( ) Ada kerangka peraturan eksternal (nasional) dan internal (dihasilkan oleh instansi).

( ) Ada kerangka peraturan eksternal dan internal, serta prosedur terdokumentasi dari instansi yang efisien untuk partisipasi warga negara

Keterangan/bukti:

---

---

**2. Apakah ruang partisipasi (dan instrumen) warga tersedia secara permanen atau tersedia secara berkala melalui berbagai saluran inklusif (seperti digital dan non-digital), yang dapat digunakan untuk proyek infrastruktur publik?**

- Tidak ada kesempatan formal untuk berpartisipasi
- Ada peluang untuk berpartisipasi, tetapi tidak permanen dan tidak tersedia melalui berbagai saluran inklusif
- Peluang partisipasi bersifat permanen atau tersedia melalui berbagai saluran inklusif (hanya memenuhi salah satu dari dua syarat)
- Peluang partisipasi bersifat permanen dan tersedia melalui berbagai saluran partisipasi inklusif

Keterangan/bukti:

---

---

**3. Apakah instansi melakukan proses konsultasi formal warga untuk mengidentifikasi, menentukan, memprioritaskan, dan memantau proyek infrastruktur publik?**

- Instansi tidak melakukan proses konsultasi dalam proyek infrastruktur, atau anda tidak yakin apakah proses tersebut dilakukan
- Instansi berkonsultasi mengenai proyek infrastruktur, tetapi tidak melakukannya di semua tahapan proyek, maupun di semua proyek infrastrukturnya
- Instansi berkonsultasi tentang proyek infrastruktur di semua tahapan proyek, tetapi instansi tidak melakukannya di semua proyek infrastruktur, atau sebaliknya (di semua proyek tetapi tidak di semua tahapan)
- Konsultasi warga dilakukan di semua tahapan proyek infrastruktur dan untuk semua proyek infrastruktur

Keterangan/bukti:

---

---

**4. Apakah di badan tersebut ada kantor pelayanan masyarakat (bisa disebut Kantor Transparansi, Kantor Pengaduan, Kantor Informasi, dll.) yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan proyek infrastruktur?**

- Tidak ada kantor atau Anda tidak tahu apakah ada
- Ada satu tetapi memiliki keterbatasan untuk melakukan tugasnya (misalnya hanya bekerja secara pribadi)
- Ada satu dan secara efisien menyertakan warga

Keterangan/bukti:

---

---

**5. Apakah ada formulir online di mana setiap orang dapat meminta informasi, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan keluhan terkait proyek infrastruktur, dan mendapatkan tanggapan yang efektif?**

- Tidak ada formulir online, atau ada tetapi tidak berfungsi
- Ada satu tetapi harus diunduh, dicetak, dilengkapi, dipindai dan diserahkan atau secara fisik dibawa ke instansi
- Ada, tetapi tidak ada mekanisme tindak lanjut (mekanisme ini memungkinkan pemohon untuk kemudian mengidentifikasi permintaannya, seperti permintaan nomor ID)
- Ada dan memiliki mekanisme tindak lanjut khusus bagi pemohon

Keterangan/bukti:

---

**6. Apakah instansi melakukan semacam upaya agar warga mengetahui adanya peluang partisipasi dan ketersediaan informasi terkait proyek infrastruktur?**

- Tidak ada upaya, atau anda tidak tahu ada upaya yang dilakukan
- Ada upaya, tetapi tidak konsisten, permanen, dan inklusif
- Ada upaya yang konsisten, permanen, dan inklusif bagi warga untuk mengetahui ada ruang partisipasi dan informasi proyek infrastruktur

Keterangan/bukti:

---

### **Sub-variabel 3.1.2: Penggunaan informasi oleh warga**

Tujuh pertanyaan dari sub-variabel ini dijawab berdasarkan kapasitas partisipasi warga negara, dan kasus partisipasi yang berharga atau kreasi bersama. Jika ada bukti dokumenter tentang kasus tersebut, misalnya pers, penting untuk dilampirkan. Jika tidak, kasus harus dijelaskan untuk evaluasi.

**1. Apakah ada mekanisme yang mendokumentasikan keluhan warga terkait proyek infrastruktur publik, yang menghasilkan catatan, mengelola tanggapan secara teratur, dan menginformasikan tindakan apa yang diambil?**

- Tidak ada mekanisme yang terpusat dan mengelola pengaduan warga, atau tidak ada bukti keberadaannya
- Ada satu, tapi tidak bekerja optimal
- Ada satu, bekerja secara optimal, tetapi tidak menghasilkan laporan dengan tindakan yang diambil dalam proyek infrastruktur tertentu
- Ada satu, bekerja secara optimal, dan melaporkan tindakan yang dilakukan dalam proyek infrastruktur tertentu

Keterangan/bukti:

---

---

**2. Apakah akses ke permintaan informasi dan tanggapan yang dikategorikan dan dicatat, dan apakah mereka menghasilkan metrik kinerja untuk instansi?**

- Anda tidak tahu berapa banyak permintaan akses ke informasi yang ada dalam setahun terakhir, atau tidak ada catatan untuk jumlah permintaan
- Anda tahu berapa banyak permintaan yang diterima instansi dalam setahun terakhir, dan berapa banyak tanggapan yang ada, tetapi tanpa kategorisasi khusus dan/atau metrik kinerja
- Anda tahu berapa total tanggapan yang positif (yaitu, berisi informasi yang diminta oleh warga), berapa yang dikirim ke lembaga lain (yang benar untuk menyelesaikan permintaan), berapa banyak yang memiliki jenis informasi yang sama (beberapa orang yang meminta data yang sama), antara berbagai kategori; dan untuk semua kategori ada tanggapan metrik kinerja

Keterangan/bukti:

---

---

**3. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi warga diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh kerangka peraturan?**

- Tidak ada kapasitas untuk menjawab dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kerangka peraturan, atau tidak ada kendali atas waktu tanggapan, atau tidak ada informasi tentang permintaan
- Hanya beberapa kasus yang menerima tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kerangka kerja
- Sebagian besar kasus ditanggapi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kerangka kerja
- 100% kasus ditanggapi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kerangka kerja

Keterangan/bukti:

---

---

**4. Apakah instansi memberikan umpan balik kepada publik, seperti laporan atau pengumuman, tentang bagaimana kontribusi warga telah digunakan dalam proyek infrastruktur?**

- Umpan balik tidak dipublikasikan, atau Anda tidak tahu apakah ada penggunaan secara internal partisipasi warga, atau tidak ada partisipasi warga
- Ada penggunaan secara internal partisipasi warga yang dapat dirujuk, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
- Penggunaan internal didokumentasikan dengan baik, tetapi tidak dipublikasikan
- Dokumentasi internal menggunakan partisipasi warga dalam proyek infrastruktur dipublikasikan

Keterangan/bukti:

---

---

**5. Tahukah Anda jika informasi yang dipublikasikan tentang proyek infrastruktur digunakan dengan cara apa pun oleh warga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, sektor swasta, atau aktor lainnya?**

- Anda tidak tahu jika ada berbagai jenis penggunaan
- Anda mengetahui dan dapat menjelaskan salah satu contoh dalam setahun terakhir
- Anda mengetahui dan dapat menjelaskan lebih dari satu contoh dalam setahun terakhir

Keterangan/bukti:

---

---

**6. Tahukah Anda jika instansi telah mengembangkan proyek bersama dengan pelaku lain di luar instansi (sebagai proyek kreasi bersama), untuk menghasilkan semacam nilai dari informasi publik tentang proyek infrastruktur?**

- Anda tidak tahu jika ada proyek kreasi bersama
- Anda mengetahui dan dapat menjelaskan salah satu contoh dalam setahun terakhir
- Anda mengetahui dan dapat menjelaskan lebih dari satu contoh dalam setahun terakhir

Keterangan/bukti:

---

---

**7. Apakah ada bukti perubahan atau reformasi yang telah dilakukan pada proyek infrastruktur sebagai tanggapan atas umpan balik, evaluasi, atau beberapa jenis partisipasi masyarakat?**

- Tidak ada kasus atau Anda tidak tahu jika ada
- Ada bukti perbaikan dalam satu proyek pada tahun lalu
- Ada bukti perbaikan di lebih dari satu proyek dalam setahun terakhir

Keterangan/bukti:

---

---

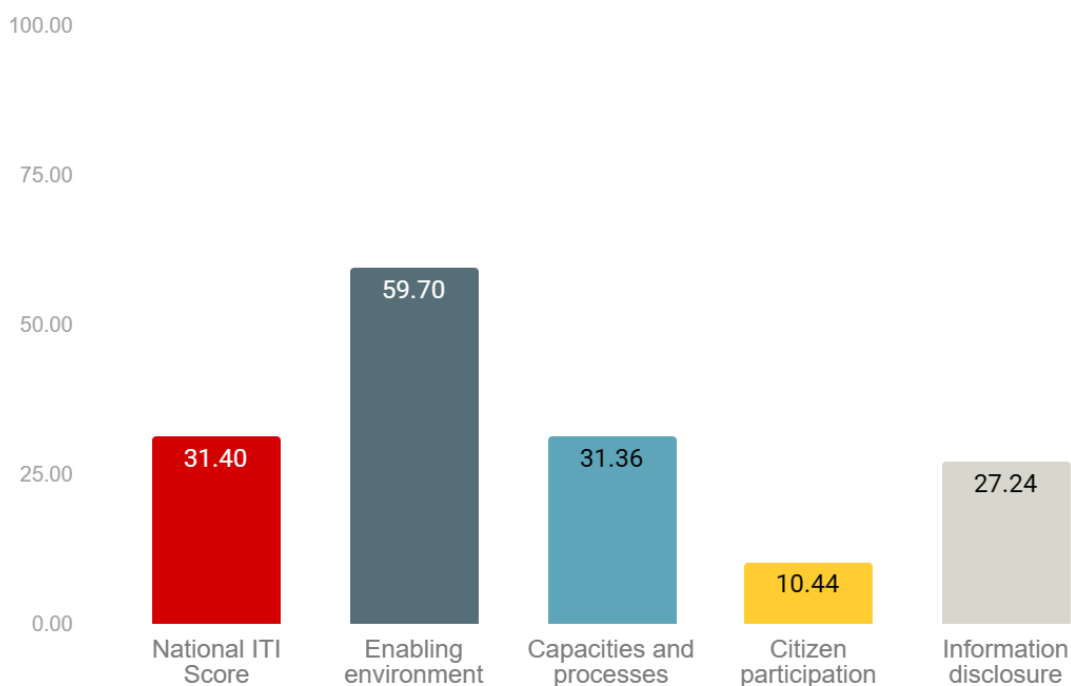
Kontak Tim ITI (Whatsapp):

Imam Arief Putrajaya : 085338516662

Fera Fitri Salsabila : 081223700356

Moh. Aminullah : 081907645545

## Lampiran 3 | Skor Indikator ITI Nasional



No.	Level	Name	Description	Indonesia-West Lombok Scores 2023
		<b>National ITI Score</b>		<b>31.40</b>
1	Dimension	Enabling environment	Evaluates national or sub-national conditions enabling transparency for the infrastructure sector considering the legal and regulatory framework and the centralised digital information tools.	<b>59.70</b>
1.1	Variable	Legal framework and digital tools		<b>59.70</b>
1.1.1	Sub-variable	Access to public information regulatory framework	Evaluates the existence of a national regulation on access to public information, or other related regulation, relevant to the infrastructure sector.	<b>85.00</b>
1.1.1.1	Indicator	Access-to-public information law	There is a national law that guarantees the access to public information in all public sector institutions, which applies to all material held by or on behalf of public authorities with only few exceptions contained in the same law.	<b>100.00</b>
1.1.1.2	Indicator	Right to request public information	There exists within the national legal framework the right of citizens to request and obtain non-published public information with <ul style="list-style-type: none"> <li>· access to both information and records/documents</li> <li>· no need to provide reasons for their requests</li> <li>· clear maximum timelines</li> <li>· access to all public institutions.</li> </ul>	<b>80.00</b>

1.1.1.3	Indicator	Sanctions over non-compliance with access to public information mandates	Within the national legal framework there are sanctions for non-compliance on proactive and reactive disclosure of information.	<b>100.00</b>
1.1.1.4	Indicator	Organisation guaranteeing the sanctions	<p>Within the national legal framework there are organisations or mechanisms that are</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· protected against political and financial interference</li> <li>· responsible for overseeing the compliance of access-to-information requirements</li> <li>· compliant with the sanctions determined by law.</li> </ul>	<b>60.00</b>
1.1.2	Sub-variable	Transparency standards in the public infrastructure sector	Evaluates the existence of laws and regulations that guarantee access to information in accordance with a transparency data standard for public infrastructure.	<b>48.00</b>
1.1.2.1	Indicator	Proactive publication of information on public procurement processes	There is a national act or regulation that guarantees proactive disclosure of public procurement information in all public sector institutions.	<b>40.00</b>
1.1.2.2	Indicator	Proactive publication of information on public infrastructure projects	There is a national act or regulation that guarantees proactive disclosure on public infrastructure projects in all public sector institutions.	<b>40.00</b>
1.1.2.3	Indicator	Infrastructure data disclosure standard	There is a national act or regulation that defines a data disclosure standard in public infrastructure (such as a formal disclosure requirement (FDR) requesting for the data of CoST IDS or OC4IDS), that must be complied with by all national or sub-national procuring entities.	<b>40.00</b>
1.1.2.4	Indicator	Infrastructure data disclosure standard proactively published as open data	The national act or regulation with the infrastructure data disclosure standard requests proactive disclosure of infrastructure projects as open data.	<b>60.00</b>
1.1.2.5	Indicator	Organisation responsible for the infrastructure data disclosure standard	Within the law or regulation there is an organisation responsible for overseeing the compliance of the publication of information according to the infrastructure data disclosure standard.	<b>60.00</b>
1.1.3	Sub-variable	National digital information tools	Evaluates the availability of national digital tools that facilitate transparency in public infrastructure.	<b>50.00</b>
1.1.3.1	Indicator	Centralised digital information platforms	There are centralised national or sub-national digital platforms with information on public infrastructure projects.	<b>60.00</b>
1.1.3.2	Indicator	Easy access to information in digital information platforms	The information that offers the details of public infrastructure projects, used for example for verification reports, is easily accessible, complete and available in an orderly manner in digital format.	<b>80.00</b>
1.1.3.3	Indicator	Infrastructure projects geographic information system (GIS) platform	There is a web platform tailored to the needs of citizens that allows in a simple and visual manner, access to a GIS database of infrastructure projects with key information on works under execution or recently executed.	<b>0.00</b>
2	Dimension	Capacities and processes	Evaluates the soundness of procuring entities' procedures and capacities to disclose data and information.	<b>31.36</b>
2.1	Variable	Institutional capacities		<b>42.41</b>
2.1.1	Sub-variable	Basic knowledge	Assesses the knowledge of public officers on subjects of access to information and transparency in public infrastructure.	<b>26.35</b>

2.1.1.1	Indicator	Knowledge about the access-to-information law	The officer who completes the survey knows the national access-to-information law on public information and the main provisions.	<b>29.41</b>
2.1.1.2	Indicator	Knowledge about transparency initiatives in the infrastructure sector	The officer who completes the survey knows the existence of the transparency initiatives in the infrastructure sector and their objectives.	<b>24.71</b>
2.1.1.3	Indicator	Knowledge about the transparency data standard in the infrastructure sector	The officer who completes the survey knows the national or sub-national transparency data standard for the infrastructure sector and its requirements.	<b>11.76</b>
2.1.1.4	Indicator	Knowledge about sanctions due to non-compliance on the access-to-public-information law	The officer who completes the survey knows the sanctions applied for non-compliance with the standards of access to public information and/or State contracts.	<b>9.41</b>
2.1.1.5	Indicator	Knowledge about different data categories	The officer who completes the survey knows what constitutes and the differences between: public data, personal data, sensitive data, confidential data and reserved data.	<b>56.47</b>
2.1.2	Sub-variable	Digital capacities	Assesses institutional capacities on the use of digital technologies to facilitate efficiency and transparency.	<b>58.47</b>
2.1.2.1	Indicator	Computer equipment	The entity has computer equipment for all personnel performing any type of administrative work.	<b>64.71</b>
2.1.2.2	Indicator	Connectivity to the internet	The entity has an internet connection that offers an adequate bandwidth for the systems operations and the personnel.	<b>70.59</b>
2.1.2.3	Indicator	Institutional website	The institution has its own website and is capable of managing its content and services in real time.	<b>71.76</b>
2.1.2.4	Indicator	Information systems for infrastructure projects	The institution has a digital system to record all information related to public infrastructure projects.	<b>49.41</b>
2.1.2.5	Indicator	Use of digital information systems	Officers use available digital systems for activities related to public infrastructure projects.	<b>56.47</b>
2.1.2.6	Indicator	Infrastructure open data publication	The entity publishes information of its infrastructure projects in this format, complying with the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>· tabulated</li> <li>· updated</li> <li>· complete</li> <li>· processable by computer</li> <li>· free of payment</li> <li>· with a license allowing their free use.</li> </ul>	<b>61.18</b>
2.1.2.7	Indicator	Visualisations based on infrastructure projects data	The public entity uses visualisations that facilitate the presentation and interpretation of information referring to public infrastructure projects.	<b>3.53</b>
2.2	Variable	Institutional processes		<b>24.00</b>
2.2.1	Sub-variable	Procedures to disclose information	Evaluates institutional procedures to guarantee transparency of data and information related to public infrastructure.	<b>23.76</b>

2.2.1.1	Indicator	Procedures for the publication of information	There is a documented institutional procedure for the proactive disclosure of information linked to public infrastructure projects.	<b>45.88</b>
2.2.1.2	Indicator	Responsibilities for disclosure	The procedure for proactive disclosure refers to named officers who are responsible for the various stages of the proactive disclosure of information process.	<b>16.47</b>
2.2.1.3	Indicator	Information officer profile	There is a documented professional profile in the institution for an "information officer", "information unit", or similar, that describes the professional requirements and main tasks for this person or unit.	<b>14.12</b>
2.2.1.4	Indicator	Information officer	There is a person nominated for the position of information officer and the person fully complies with the job profile.	<b>16.47</b>
2.2.1.5	Indicator	Follow-up mechanisms on information requests	There are procedures to provide an internal follow-up to public infrastructure project information requests that come from citizens or other actors.	<b>25.88</b>
2.2.2	Sub-variable	Enablers and barriers to disclose information	Evaluates conditions at the entity facilitating or limiting the public information publication.	<b>22.12</b>
2.2.2.1	Indicator	Internal policy for information publication	There is in the entity an internal policy, issued from the institutional authorities, for the publication of information containing, among other data, those referring to infrastructure projects.	<b>40.00</b>
2.2.2.2	Indicator	Disclosure training programme	There is an internal disclosure training programme or dissemination process that makes personnel aware at all levels on matters of access to public information that includes infrastructure projects.	<b>35.29</b>
2.2.2.3	Indicator	Identification of limitations for publishing information	The internal limitations to publishing infrastructure projects information have been clearly identified.	<b>27.06</b>
2.2.2.4	Indicator	Plan to mitigate limitations for publishing information	There is a document that contains the plan to reduce or eliminate the present limitations to publishing information related to infrastructure projects.	<b>0.00</b>
2.2.2.5	Indicator	Bureaucratic barriers to publish information	The process of proactive and reactive publication of public information, in practice, is not hindered by internal bureaucracy, as for example when it is necessary to obtain approval from multiple parties.	<b>3.53</b>
2.2.2.6	Indicator	Documentation of non-compliance and sanctions	There is documentation at the entity acknowledging and following-up on non-compliance and sanctions imposed by controlling entities due to non-compliance with the access-to-information standards and/or state contracts.	<b>16.47</b>
2.2.3	Sub-variable	Control over infrastructure projects disclosure	Assesses the existence of disclosure control mechanisms and their practical impact in improving data disclosure.	<b>26.47</b>
2.2.3.1	Indicator	Level of disclosed infrastructure projects	Proportion of projects on which information is disclosed, complying with the infrastructure data standard, compared with the total number of projects managed by the procuring entity, expressed as a percentage.	<b>27.06</b>
2.2.3.2	Indicator	Level of investment represented by disclosed infrastructure projects	Amount of investment represented by projects on which information is proactively disclosed by the procuring entity, complying with the infrastructure data standard, as a proportion of the total amount of investment on infrastructure projects, expressed as a percentage.	<b>25.88</b>
3	Dimension	Citizen participation	Evaluates the opportunities provided by procuring entities for citizen participation and how citizens use the disclosed public information.	<b>10.44</b>
3.1	Variable	Participation practices		<b>10.44</b>
3.1.1	Sub-variable	Participation opportunities	Assesses the formalisation of citizens participation opportunities and online mechanisms to facilitate this participation.	<b>19.24</b>

3.1.1.1	Indicator	Institutionalised citizen participation	The institution has formal citizen participation opportunities that allow the procuring entity to listen and implement requests from the citizenship, that may be used for public infrastructure projects.	<b>22.35</b>
3.1.1.2	Indicator	Permanent and inclusive citizen participation	The citizens participation opportunities are permanently available or are available with a constant periodicity through a variety of inclusive channels.	<b>18.82</b>
3.1.1.3	Indicator	Citizen participation in infrastructure projects	The entity conducts formal citizen consultation processes to identify, define, prioritize and monitor public infrastructure projects.	<b>18.82</b>
3.1.1.4	Indicator	Citizen attention office	There is in the institution an office for citizen service (called the Transparency Office, Complaints Office, Information Office, etc.) that sees subjects related to infrastructure projects.	<b>10.59</b>
3.1.1.5	Indicator	Online form for consultation or requests	There is an online form by which any person may request information, perform a consultation, or present a complaint referring to an infrastructure project and receive an effective response.	<b>9.41</b>
3.1.1.6	Indicator	Awareness of participation opportunities	The institution makes an effort to ensure that citizens are aware of existing participation opportunities and of the availability of information related infrastructure projects.	<b>28.24</b>
3.1.2	Sub-variable	Use of information by citizens	Assesses the use of information related to infrastructure projects by citizens, stemming from case evidence.	<b>3.24</b>
3.1.2.1	Indicator	Centralised citizen complaints	There is a mechanism that documents citizens' complaints related to public infrastructure projects, generates a log and manages responses in an orderly fashion.	<b>9.41</b>
3.3.2.2	Indicator	Requests and responses of access to information	Access- to-information requests and responses there were from the entity are recorded.	<b>7.06</b>
3.3.2.3	Indicator	Institutional response capacity	The response to citizens' access-to-information requests is provided according to the period established by law.	<b>4.71</b>
3.3.2.4	Indicator	Institutional use evidence	The institution provides the public with feedback, such as reports or announcements, on how citizens' inputs have been used in infrastructure projects.	<b>2.35</b>
3.3.2.5	Indicator	Citizens use evidence	The information made public regarding infrastructure projects is used by the citizens, civil society organisations, academia, media, private sector, or any other actor.	<b>0.00</b>
3.3.2.6	Indicator	Evidence of joint projects	The institution has developed joint projects with other actors out of the institution as a result of the information on infrastructure projects.	<b>3.53</b>
3.3.2.7	Indicator	Improvements as a response to citizen participation	Changes or reforms have been made to infrastructure projects in response to feedback, evaluation, or some other type of citizen participation.	<b>0.00</b>
4	Dimension	Information disclosure	Evaluates the amount of data and information disclosed by procuring entities on infrastructure projects according to the CoST IDS or the OC4IDS.	<b>27.24</b>
4.1	Variable	Disclosure practices		<b>27.24</b>
4.1.1	Sub- variable	Project identification		<b>44.37</b>
4.1.1.1	Indicator	Project reference number	There is a number or code assigned to the project that uniquely identifies it.	<b>74.12</b>
4.1.1.2	Indicator	Project owner	The entity in charge of project development and execution contract is clearly identified.	<b>100.00</b>

4.1.1.3	Indicator	Sector and sub-sector	The sector and sub-sector are identified according to the government structure, for which the project is being developed.	<b>21.18</b>
4.1.1.4	Indicator	Project name	The project is clearly identified with the same name throughout the project cycle.	<b>61.76</b>
4.1.1.5	Indicator	Project location	The physical location of the project is clearly identified.	<b>100.00</b>
4.1.1.6	Indicator	Project description	The project's description is available, indicating what it is about and the infrastructure outputs that are part of it.	<b>28.24</b>
4.1.1.7	Indicator	Purpose	There is a project purpose expressed in terms of public infrastructure and its intended social and economic impact.	<b>0.00</b>
4.1.2	Sub-variable	Project preparation		<b>24.82</b>
4.1.2.1	Indicator	Environmental impact	A document that identifies, evaluates and describes the environmental impacts produced by the project on its surroundings is available; including reference to relevant additional studies (soil, topography, hydrogeology, etc.)	<b>0.00</b>
4.1.2.2	Indicator	Land and settlement impact	A document that identifies, assesses and describes the impacts on human settlements and population centres, produced by the project, is available.	<b>0.00</b>
4.1.2.3	Indicator	Contact details	Information identifies the contact details of the officer responsible for the project in the procuring entity.	<b>0.00</b>
4.1.2.4	Indicator	Project budget and date of approval	The total required budget is available for the development of the project and the date of approval provided.	<b>74.12</b>
4.1.2.5	Indicator	Funding sources	The sources where the funds are coming from are identified, e.g. from the national budget, cooperation, multilateral organisations, or others.	<b>100.00</b>
4.1.3	Sub-variable	Execution contract procurement		<b>58.88</b>
4.1.3.1	Indicator	Procuring entity and contact details	The entity in charge of contracting the execution of the infrastructure project and its contact details are clearly identified.	<b>67.65</b>
4.1.3.2	Indicator	Procurement process	The type of procurement process that was applied to award the contract is clearly identified.	<b>73.53</b>
4.1.3.3	Indicator	Number of firms bidding	The number of companies participating in the bidding process for the infrastructure execution is clearly identified.	<b>100.00</b>
4.1.3.4	Indicator	Contract type	The type of contract to be signed is clearly identified.	<b>100.00</b>
4.1.3.5	Indicator	Contract title	The official name of the signed contract is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.3.6	Indicator	Contract price	The final amount of the execution contract is clearly stated.	<b>97.06</b>
4.1.3.7	Indicator	Contract start date	The date when the contract execution starts is clearly identified.	<b>61.76</b>
4.1.3.8	Indicator	Contract duration	The contract duration is clearly identified.	<b>26.47</b>
4.1.3.9	Indicator	Contractor(s)	The · name · identification number · contact information of the winning contractor is clearly identified.	<b>58.82</b>

4.1.3.10	Indicator	Contract scope of work	The description of the work and services that the firm has to provide under the signed contract are clearly identified.	<b>3.53</b>
4.1.4	Sub-variable	Supervision contract procurement		<b>7.06</b>
4.1.4.1	Indicator	Procuring entity and contact details	The entity in charge of contracting the supervision of the infrastructure and its contact details are clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.2	Indicator	Procurement process	The type of tender management process applied to award the contract is clearly identified.	<b>35.29</b>
4.1.4.3	Indicator	Number of firms/individuals bidding	The number of companies or individuals participating in the bidding process for the supervision is clearly identified.	<b>35.29</b>
4.1.4.4	Indicator	Contract type	The type of contract signed is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.5	Indicator	Contract title	The official name of the signed contract is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.6	Indicator	Contract price	The final amount of the supervision contract is clearly provided.	<b>0.00</b>
4.1.4.7	Indicator	Contract start date	The start date of the supervision contract started is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.8	Indicator	Contract duration	The contract duration is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.9	Indicator	Contract firm/individual	The name and information of the awarded company or individual to implement the project supervision is clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.4.10	Indicator	Contract scope of work	The description of the work and services that the firm or individual has to provide under the signed contract are clearly identified.	<b>0.00</b>
4.1.5	Sub-variable	Execution contract implementation		<b>0.00</b>
4.1.5.1	Indicator	Variation to contract price	It is clearly indicated whether variations to the contract price have been made.	<b>0.00</b>
4.1.5.2	Indicator	Reasons for price changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract price are available.	<b>0.00</b>
4.1.5.3	Indicator	Variation to contract duration	Contract duration modifications are clearly indicated, if made.	<b>0.00</b>
4.1.5.4	Indicator	Reasons for contract duration changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract duration are available.	<b>0.00</b>
4.1.5.5	Indicator	Variation to contract scope	Modifications to the project scope, if they exist, are clearly indicated.	<b>0.00</b>
4.1.5.6	Indicator	Reasons for scope changes	Justifications with arguments why changes were made to project scope are available.	<b>0.00</b>
4.1.6	Sub-variable	Supervision contract implementation		<b>0.00</b>
4.1.6.1	Indicator	Variation to contract price	It is clearly indicated whether variations to the contract price have been made.	<b>0.00</b>
4.1.6.2	Indicator	Reasons for price changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract price are available.	<b>0.00</b>
4.1.6.3	Indicator	Variation to contract duration	Contract duration modifications are clearly pointed out, if made.	<b>0.00</b>
4.1.6.4	Indicator	Reasons for duration changes	Justifications with arguments why changes were made to the contract duration are available.	<b>0.00</b>

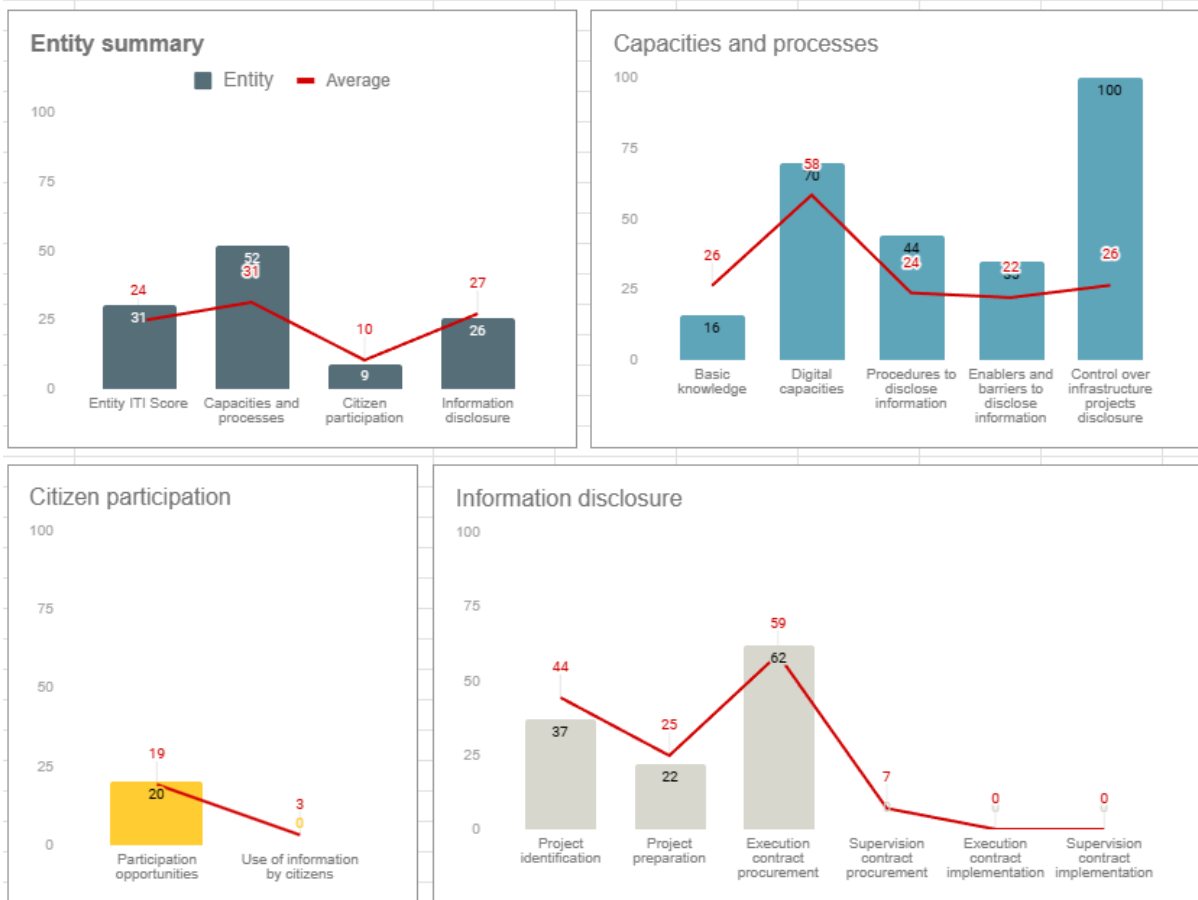
4.1.6.5	Indicator	Variation to contract scope	Modifications to the project scope, if they exist, are clearly pointed out.	<b>0.00</b>
4.1.6.6	Indicator	Reasons for scope changes	Justifications with arguments why changes were made to project scope are available.	<b>0.00</b>

# Lampiran 4 | Rangkuman Skor Entitas Pengadaan

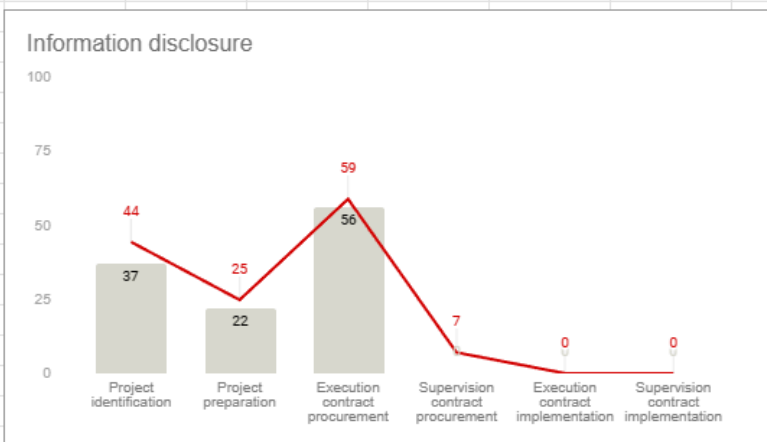
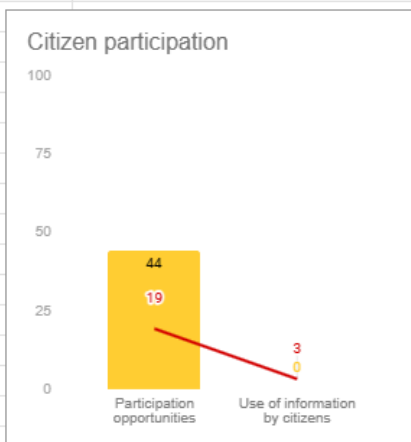
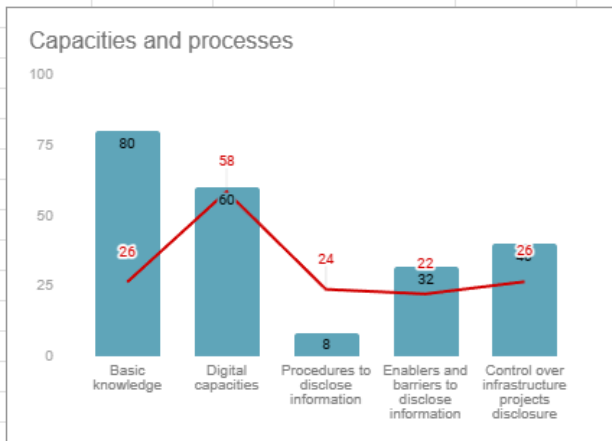
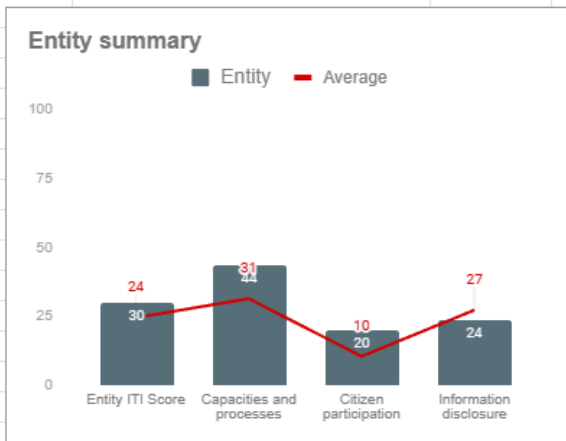
Position 1: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat



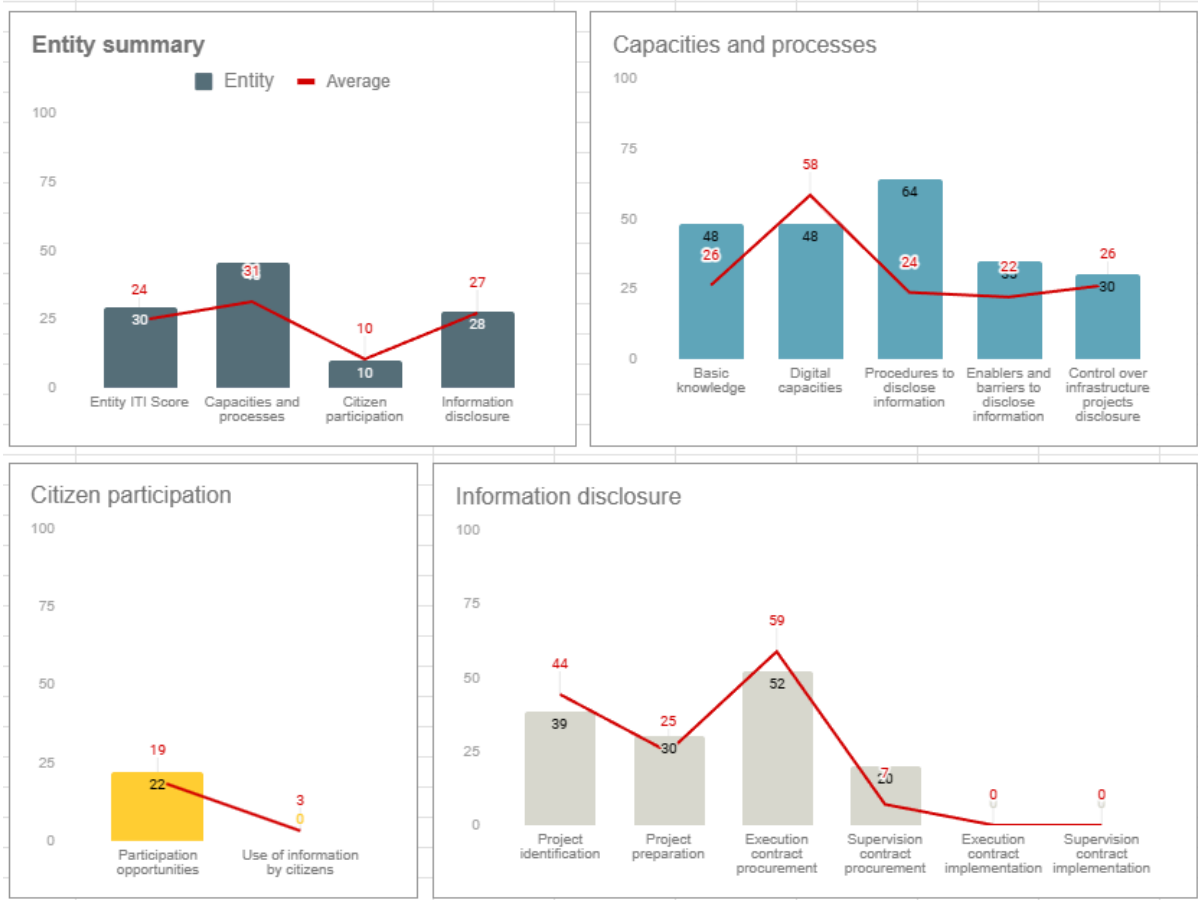
Position 2: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat



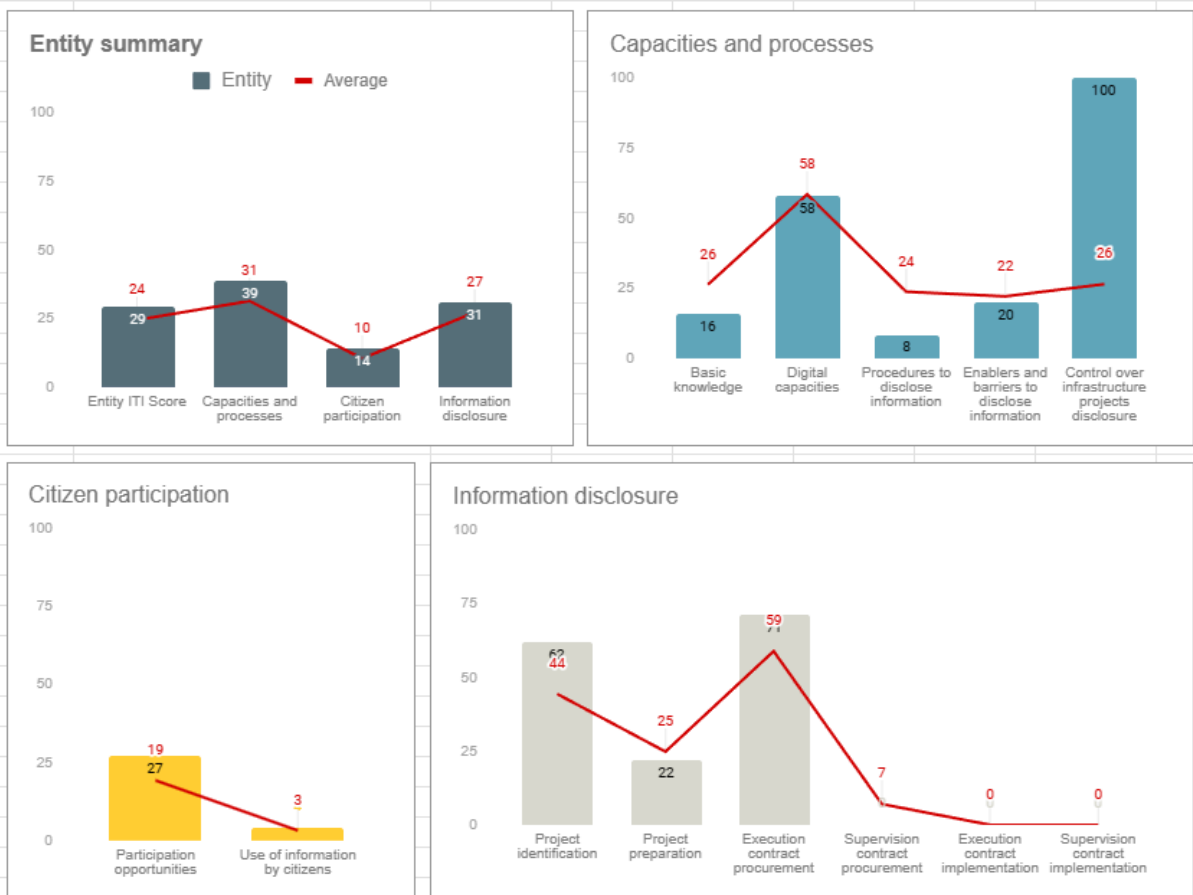
Position 3: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat



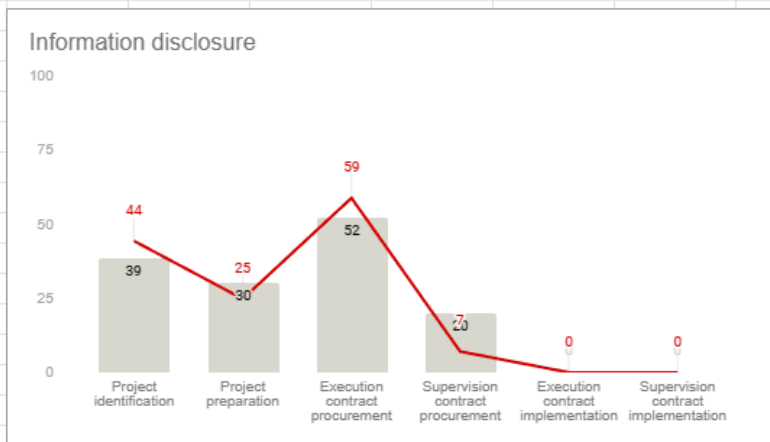
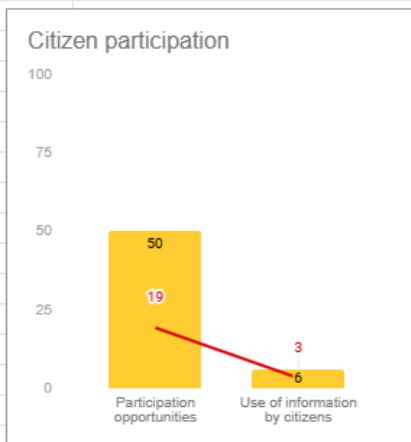
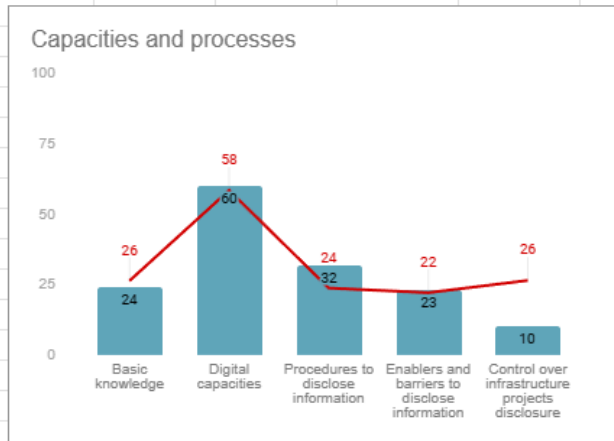
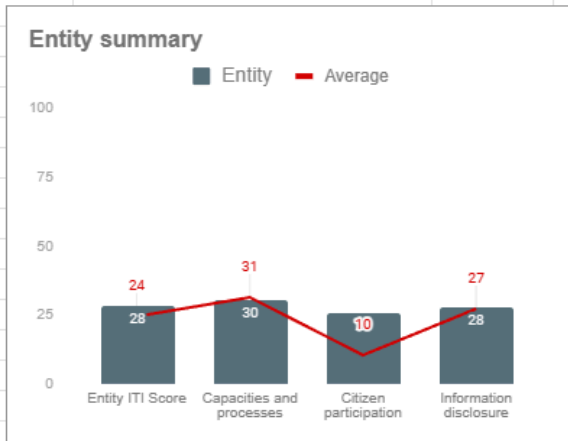
Position 4: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



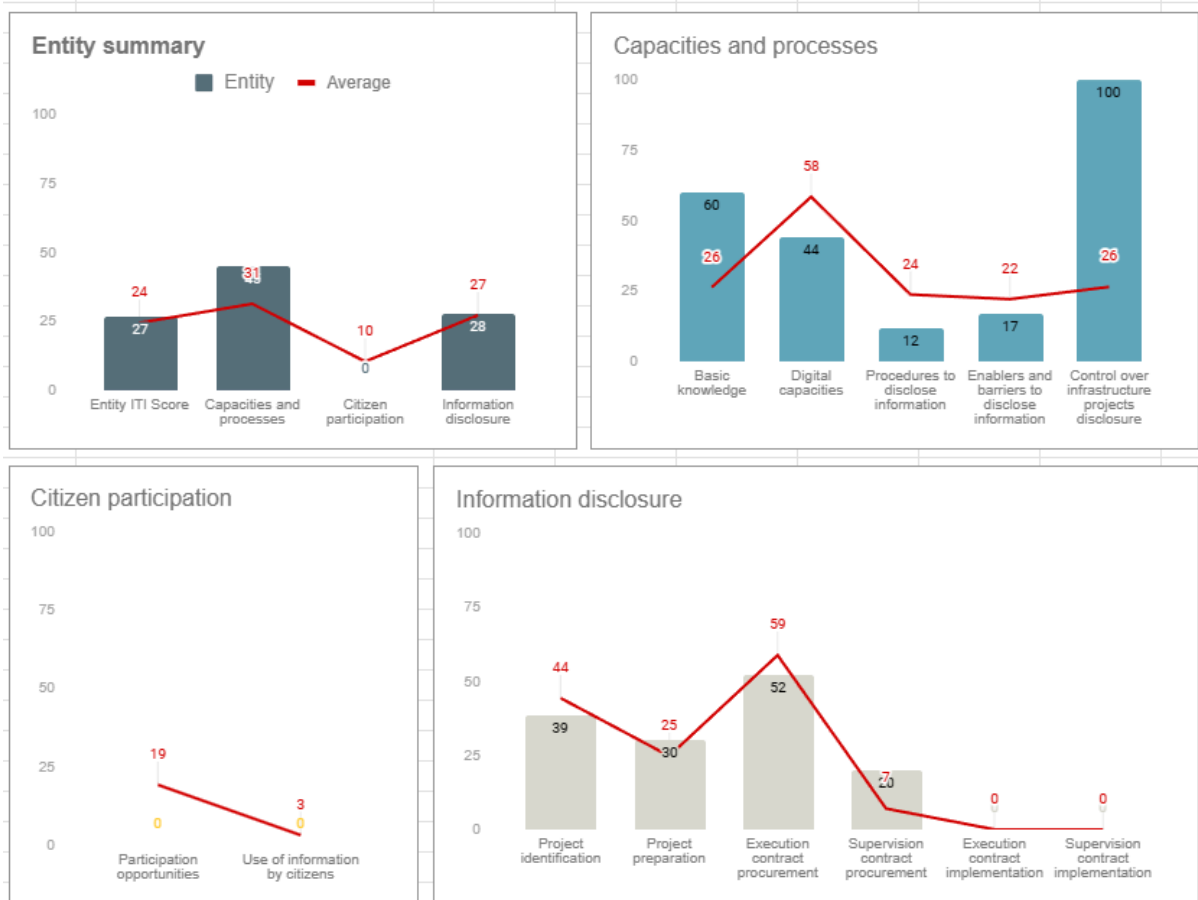
Position 5: Dinas Pertanian Lombok Barat



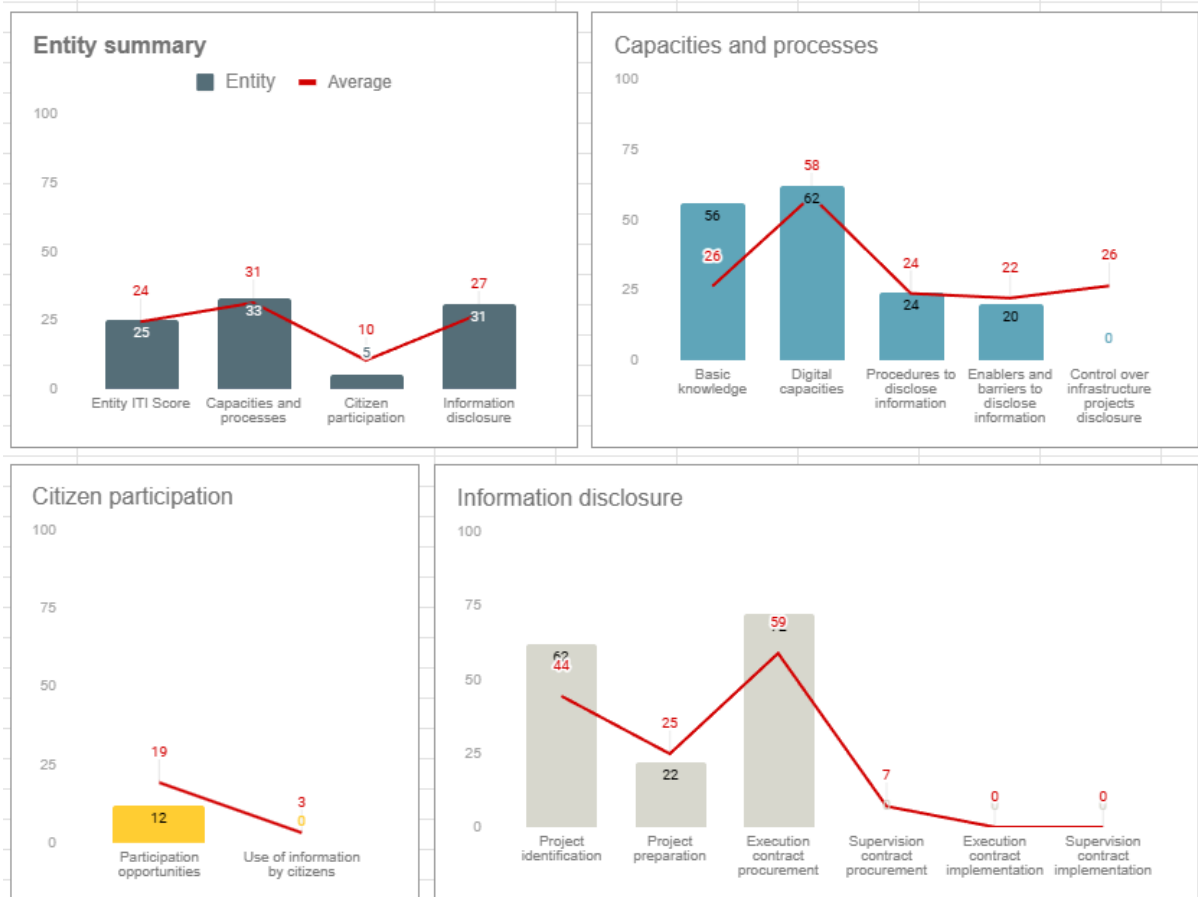
Position 6: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat



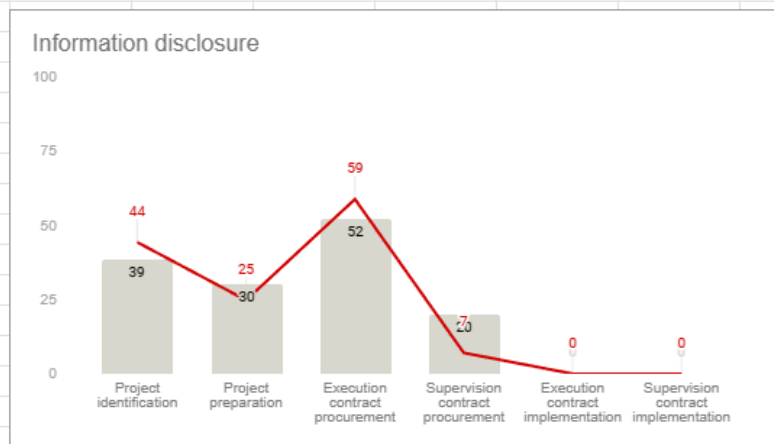
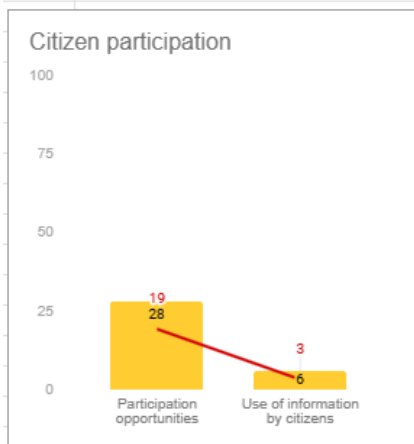
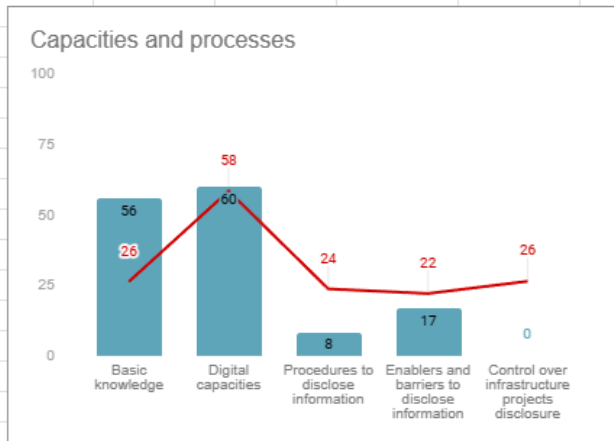
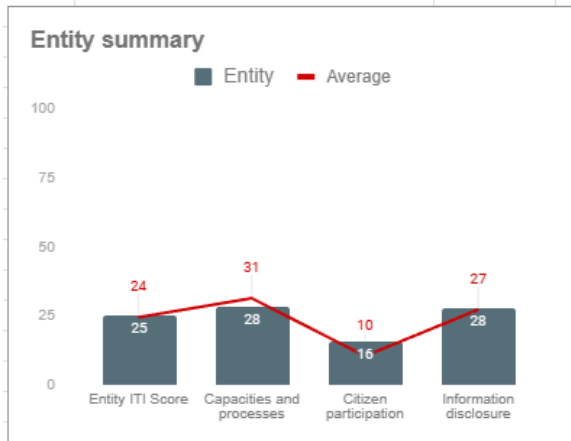
Position 7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



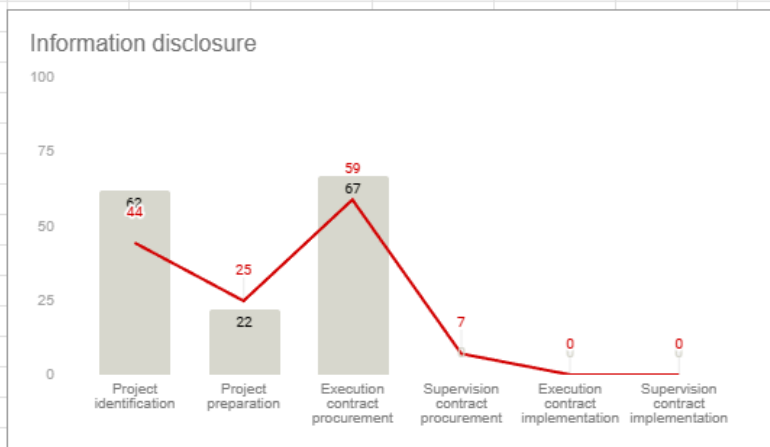
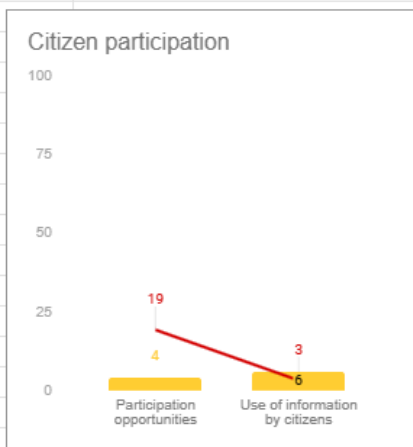
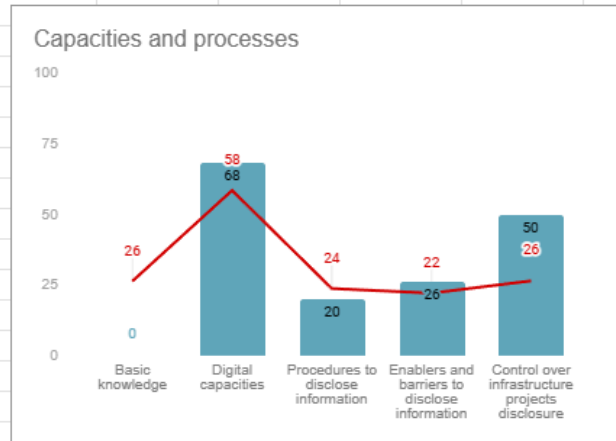
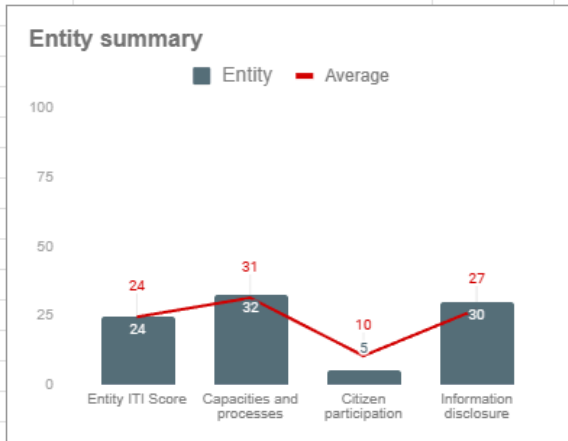
Position 8: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat



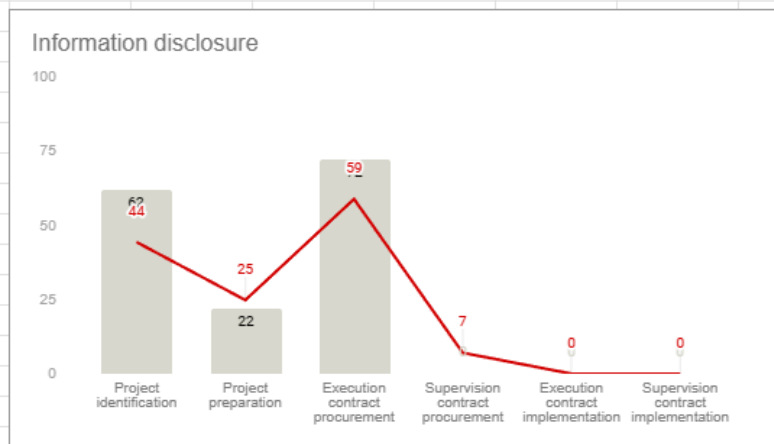
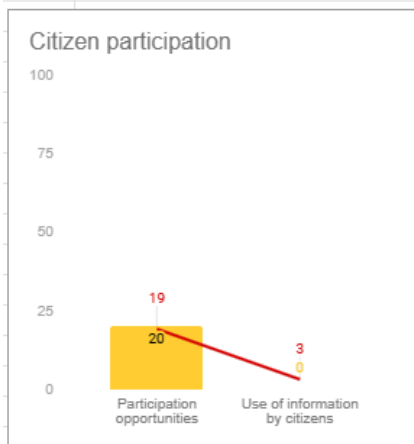
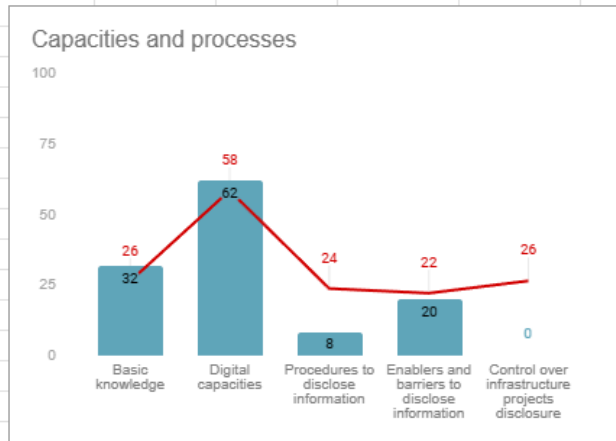
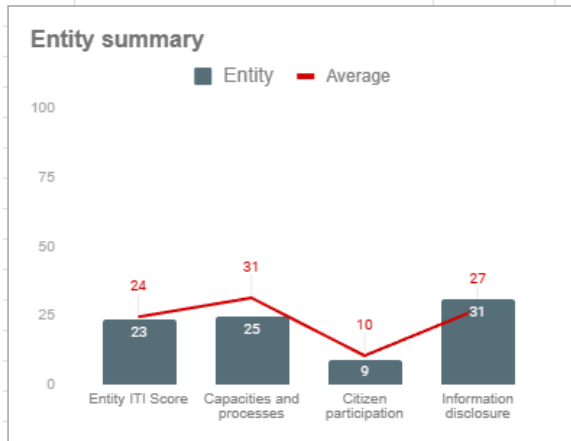
Position 9: Dinas Pemuda Dan Olahraga



Position 10: Dinas Kesehatan Lombok Barat



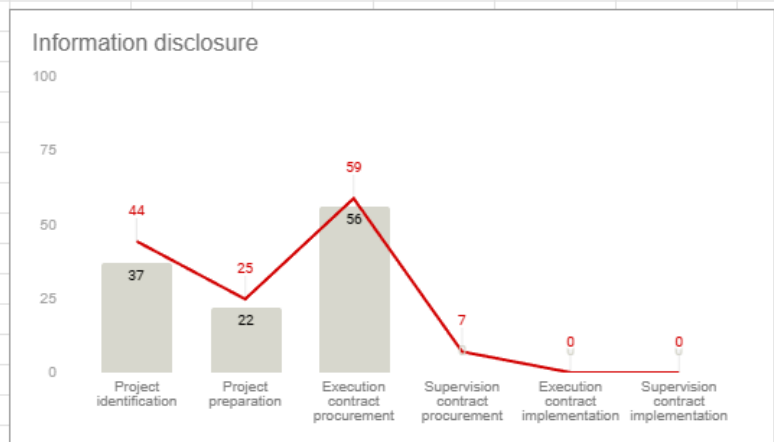
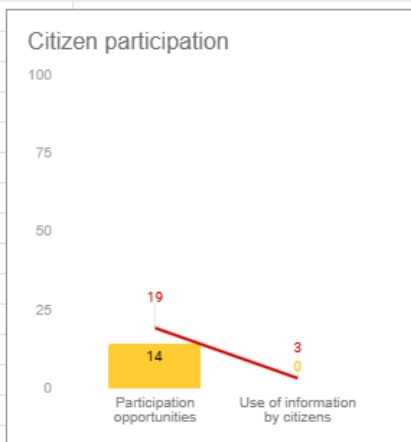
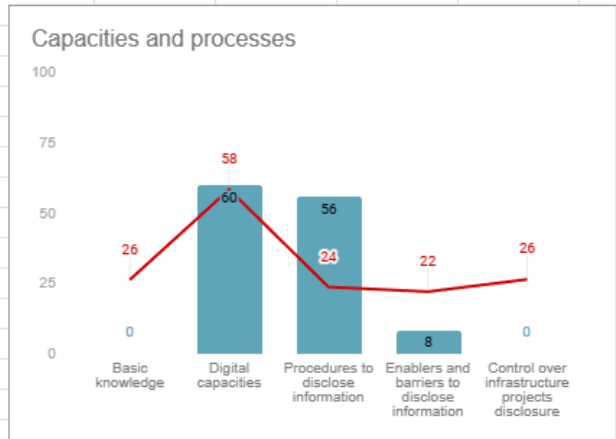
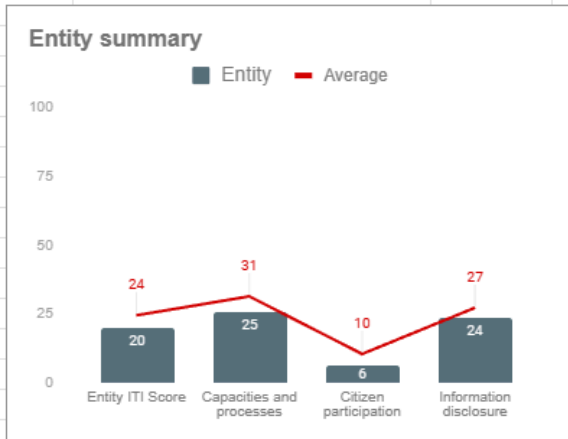
Position 11: Dinas Pariwisata Lombok Barat



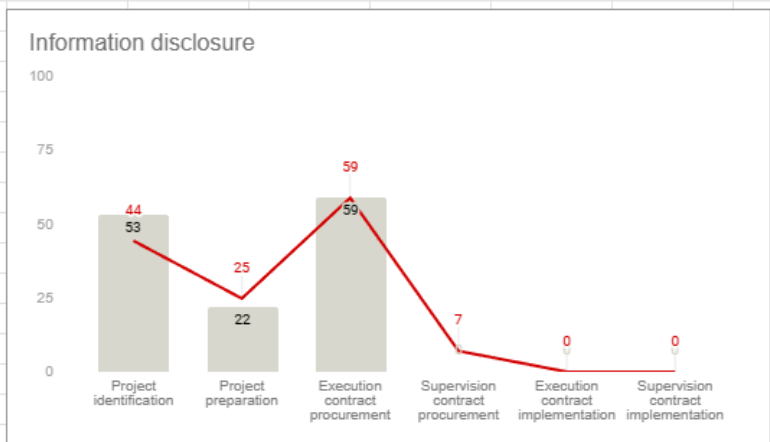
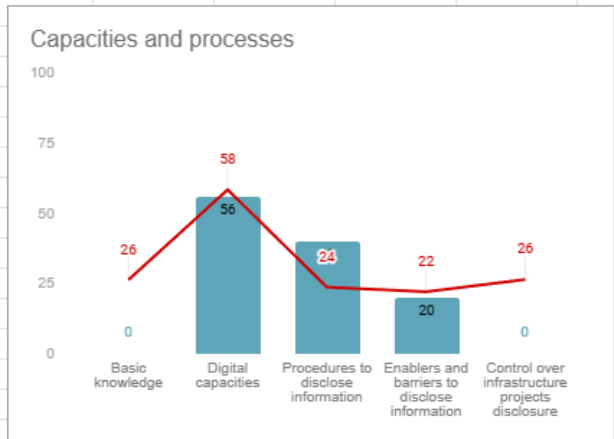
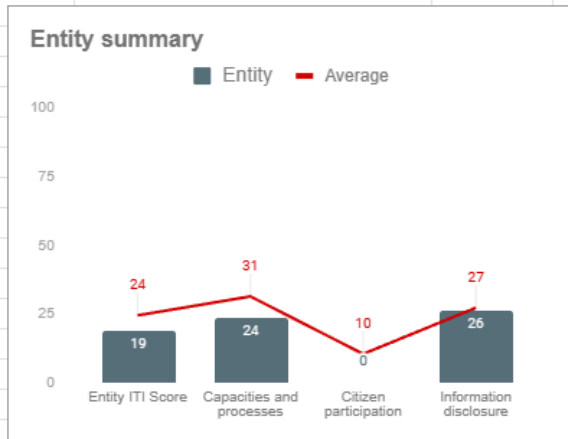
Position 12: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya



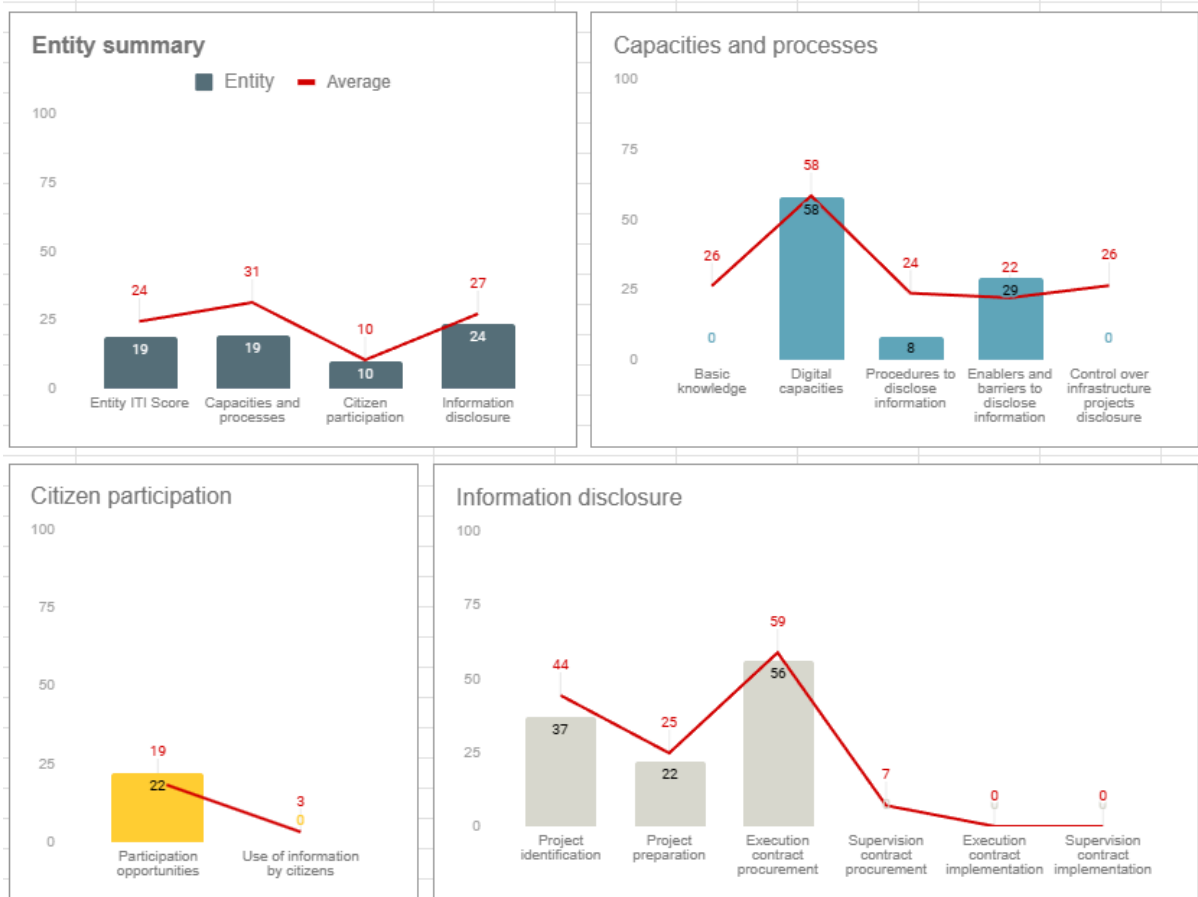
Position 13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat



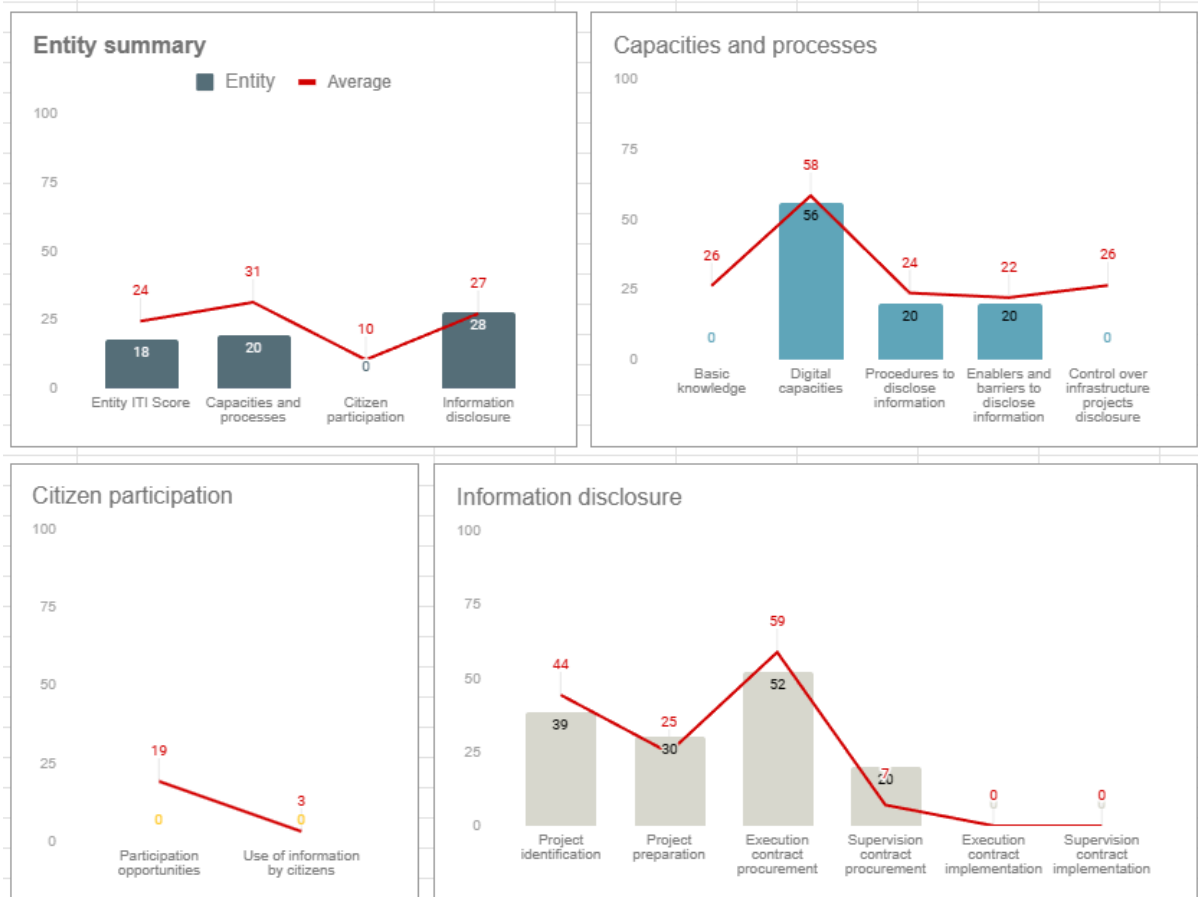
Position 14: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga



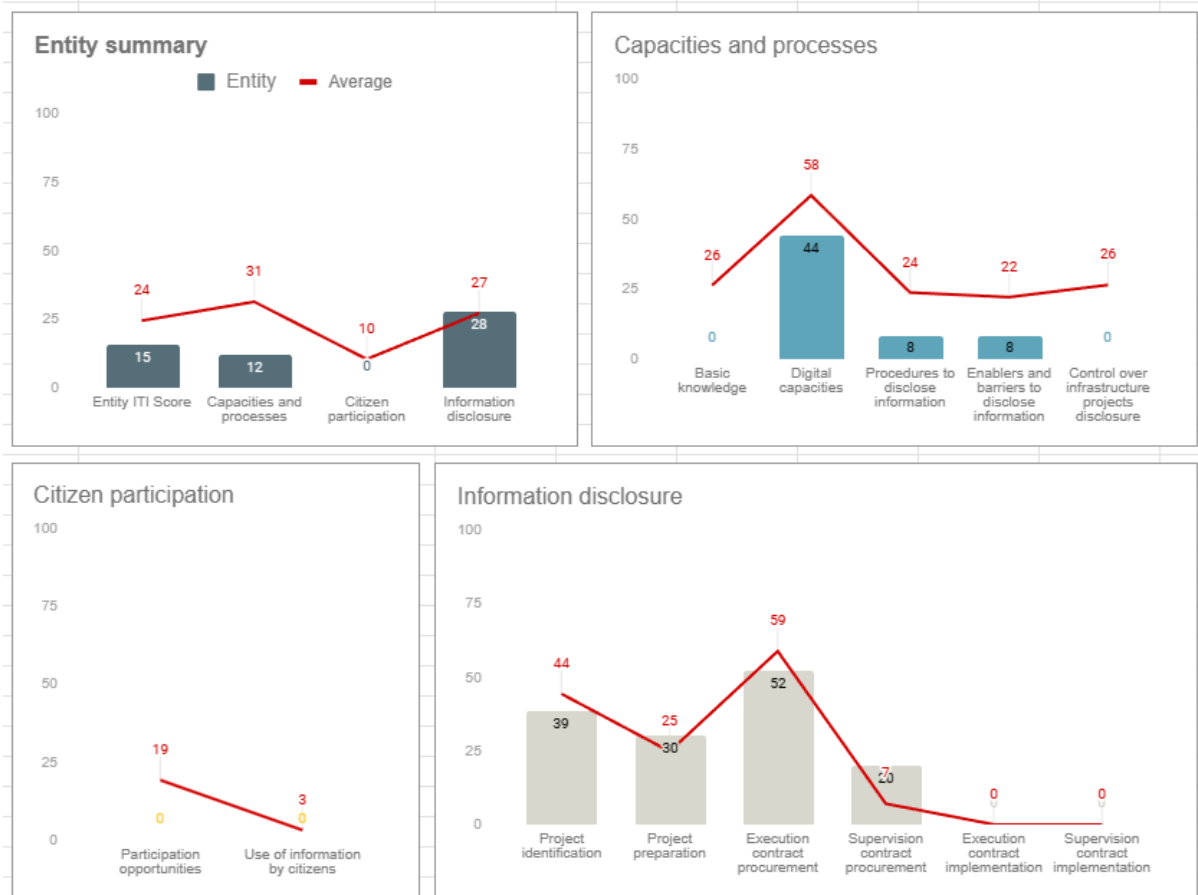
Position 15: Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat



Position 16: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air



Position 17: Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah



## Lampiran 5 | Terminologi

EP = Entitas Pengadaan

MSG = Multi-Stakeholder Grup / Kelompok Multi Pemangku Kepentingan

CoST = Construction Sector Transparency Initiatives

ITI = Indeks Transparansi Infrastruktur